

DR. H. MUKHTAR MAS'UD, M.A.

**KORELASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DENGAN MAJELIS TAKLIM
DALAM UPAYA MENINGKATKAN
JIWA AGAMA**

**Dalam Bidang
Pendidikan, Keagamaan, Sosial
Kemasyarakatan, dan Profesi**

**Pengantar:
Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.**

**Penerbit :
Badan Penerbit UNM, Makassar**

H. MUKHTAR MAS'UD

**KORELASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM DALAM
UPAYA MENINGKATKAN JIWA AGAMA**

**Dalam Bidang
Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan,
Keagamaan, dan Profesi**

Penerbit :
Badan Penerbit UNM

Makassar

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mas'ud, Mukhtar

KOREASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENINGKATKAN JIWA AGAMA: Dalam Bidang: Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi/ Mukhtar Mas'ud, Makassar, Badan Penerbit UNM, 2020.

vi, hlm.; x cm.

ISBN:

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Desain Cover :

Layouter :

Penerbit :

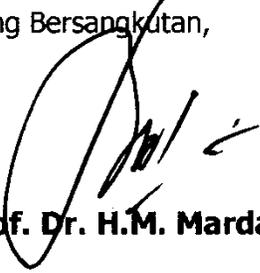
KATA PENGANTAR

Masalah jiwa agama adalah sesuatu yang krusial dan esensial bagi manusia, baik pelajar, mahasiswa, orang dewasa, dan orang lanjut usia, seyogyanya ada upaya agar jiwa agamanya perlu ditingkatkan. Inisiasi **Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**, dalam menulis buku ini dengan judul: "*Korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam Upaya Meningkatkan Jiwa Agama: Dalam Bidang Pendidikan, Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Profesi*" patut kita apresiasi sehingga dapat dibaca oleh pelajar, mahasiswa, dan warga masyarakat pada umumnya.

Upaya meningkatkan jiwa agama sebaiknya menjadi fokus perhatian bagi Dosen dan Guru Pendidikan Agama Islam. Kurangnya jiwa agama bagi umat Islam tentunya mempengaruhi pelaksanaan ibadah yang dilakukannya. Korelasi Dosen dan Guru Pendidikan Agama Islam dengan Pengurus Majelis Taklim, adalah suatu hal yang diperlukan dalam upaya meningkatkan jiwa agama bagi umat Islam pada umumnya.

Partisipasi Dosen dan Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan dilakukan secara berkesinambungan dan dapat memberikan banyak manfaat. Karena tanpa kerjasama, upaya ini sulit untuk direalisasikan. Dan dengan adanya korelasi tersebut termasuk penulisan buku ini, semoga menjadi amaliyah di sisi Allah, Swt., Amin.

Makassar, 08 Juni 2020
Yang Bersangkutan,



Prof. Dr. H.M. Mardan, M.Ag.

PENGANTAR PENULIS

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur hanya kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini yang berjudul: *"Korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam Menumbuhkan Jiwa Agama: Dalam Bidang Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi"* sebagai sebuah wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah saw, beserta sahabat, tabi'it-tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya sampai hari kemudian. Hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan anak bagi pemiliknya kecuali bagi mereka yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang ikhlas.

Disadari bahwa penulisan buku ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan kritik kami sangat harapkan untuk adanya penyempurnaan kelak. Pihak-pihak yang akan membantu penyelesaiannya, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat memberi manfaat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dan segala bantuan dan bimbingan semua pihak kepada penulis dalam penyusunan buku ini, semoga mendapat ganjaran dari Allah, swt. Amin.

Makassar, 08 Juni 2020
Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)	10
A. Eksistensi PAI Terhadap Lembaga Pendidikan	10
B. Eksistensi PAI Terhadap Tenaga Pendidik	11
C. Eksistensi PAI Terhadap Peserta Didik	16
D. Eksistensi PAI Terhadap Kurikulum	24
BAB III. EKSISTENSI MAJELIS TAKLIM (MT)	28
A. Eksistensi MT Terhadap Lembaga Pendidikan	28
B. Eksistensi MT Terhadap Tenaga Pendidik .	46
C. Eksistensi MT Terhadap Peserta Didik	50
D. Eksistensi MT Terhadap Silabus Bimbingan	55
BAB IV. EKSISTENSI ILMU JIWA AGAMA (IJA)	57
A. Eksistensi IJA Terhadap Lembaga Pendidikan	57
B. Eksistensi IJA Terhadap Tenaga Pendidik .	58
C. Eksistensi IJA Terhadap Peserta Didik	59
D. Eksistensi IJA Terhadap Kurikulum	60
BAB V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . (IKB)	62
A. Kebijakan Pendidikan Keagamaan	62
B. Proses Kebijakan Pendidikan	74

C. Implementasi Bidang Keagamaan	92
D. Implementasi Bidang Sosial Kemasyrakatan	94
E. Implementasi Bidang Profesi	97
BAB VI. URGENSI DAN MANFAAT MANAJEMEN	107
A. Urgensi dan Manfaat Manajemen Bidang Pendidikan	107
B. Urgensi dan Manfaat Manajemen Bidang Keagamaan	134
C. Urgensi dan Manfaat Manajemen Bidang Sosial Kemasyarakatan	136
D. Urgensi dan Manfaat Manajemen Bidang Profesi	137
BAB VII. URGENSI DAN MANFAAT PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI	139
A. Urgensi dan Manfaat Psikologi & Sosiologi Bidang Pendidikan	139
B. Urgensi dan Manfaat Psikologi & Sosiologi Bidang Keagamaan	148
C. Urgensi dan Manfaat Psikologi & Sosiologi Bidang Sosial Kemasyarakatan	150
D. Urgensi dan Manfaat Psikologi & Sosiologi Bidang Profesi	150
BAB VIII. URGENSI DAN MANFAAT <i>UKHUWAH ISLAMIAH</i>	152
A. Urgensi dan Manfaat <i>Ukhuwah Islamiyah</i> Bidang Pendidikan	152
B. Urgensi dan Manfaat <i>Ukhuwah Islamiyah</i> Bidang Keagamaan	154
C. Urgensi dan Manfaat <i>Ukhuwah Islamiyah</i>	

Bidang Sosial Kemasyarakatan	156
D. Urgensi dan Manfaat <i>Ukhuwah Islamiyah</i>	
Bidang Profesi	158
BAB IX. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	
IMPLEMENTASI	161
A. Faktor Pendukung dan Penghambat	
Implementasi Bidang Pendidikan	161
B. Faktor Pendukung dan Penghambat	
Implementasi Bidang Keagamaan	162
C. Faktor Pendukung dan Penghambat	
Implementasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	163
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	
Implementasi Bidang Profesi	164
BAB X. ASPEK PENUNJANG PROSESI KORELASI	
PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM	166
A. Aspek Manajemen Pendidikan	166
B. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	171
C. Aspek Lingkungan Sekitar	176
BAB XI. KERANGKA PIKIR KORELASI PAI DENGAN	
MAJELIS TAKLIM	201
A. Kerangka Pikir Bidang Pendidikan	201
B. Kerangka Pikir Bidang Keagamaan	202
C. Kerangka Pikir Bidang Sosial	
Kemasyarakatan	203
D. Kerangka Pikir Bidang Profesi	204
BAB XII. KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM	
DALAM UPAYA MENINGKATKAN JIWA	
AGAMA	205
A. Korelasi Bidang Pendidikan	205

B. Korelasi Bidang Keagamaan	207
C. Korelasi Bidang Sosial Kemasyarakatan ...	211
D. Korelasi Bidang Profesi	213
DAFTAR PUSTAKA	215

BAB I PENDAHULUAN

Allah Swt. memerintahkan manusia menuntut ilmu pengetahuan agar terhindar dari kebodohan. Kebodohan yang dimaksudkan adalah tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang seharusnya diketahui. Menuntut ilmu merupakan kewajiban umat Islam mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan Allah swt. akan mengangkat derajatnya sebagaimana dalam QS. Al-Mujadilah/58 : 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

....Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹

Hingga saat ini lembaga pendidikan Islam masih sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat. Di antara tantangan yang dihadapi adalah globalisasi baik di bidang kapital, budaya etika atau moral. Era globalisasi adalah era pasar bebas dan sekaligus pasar bebas dalam produk material dan jasa. Kalau dulu, misalnya untuk membangun basis ekonomi masyarakat sangat mengandalkan pada *money capital* (modal, uang) yang selanjutnya berevolusi pada *human capital* yakni SDM yang menguasai ipteks, dapat mengerjakan tugas secara profesional serta berperilaku dan berpribadi mandiri.²

Dalam konteks pendidikan, ide-ide atau nilai-nilai dasar itu seharusnya diturunkan ke bawah yaitu ke dalam UUD 1945, Undang-undang dan secara operasional sampai kepada Peraturan-Peraturan Pemerintah ke bawah. Hanya saja pada tataran yang lebih operasioanal, ide-ide atau nilai-nilai itu mulai tidak jelas atau

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 793.

²Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 84.

menghilang terutama ketika diimplementasikan ke dalam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi di mana keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Swt. belum sepenuhnya menjadi inti atau *core* dalam pengembangannya. Akibatnya kurang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis multidimensional sebagaimana keadaan bangsa saat ini.

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat terutama dalam konteks pendidikan. Di antara tantangan itu adalah: 1) Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transformasi dan informasi. Para siswa peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran baik yang bersifat pedagogis-terkontrol maupun yang bersifat nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber-sumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol mempengaruhi perubahan budaya, etika dan moral masyarakat. Masyarakat yang semula merasa asing bahkan tabu terhadap model-model pakaian (*fashion*) yang terbuka dan hiburan-hiburan (*fun*) atau film-film porno atau sadis atau tabu dengan bacaan kemudian menjadi biasa-biasa saja bahkan menjadi bagian dari itu. Sebagai eksensnya adalah munculnya sikap sadisme, kekerasan, dan sebagainya di kalangan masyarakat.³

Sebagai orang tua seyogyanya menjaga anak kita agar tidak terpengaruh dari hal-hal negatif di luar rumah yakni bergaul dengan orang lain anak tersebut dapat berubah menjadi generasi yang berakhlak buruk karena pergaulannya. Anak yang baru lahir diibaratkan kertas putih yang bersih. Kalau kertas putih tersebut kotor maka kertas tersebut tidak baik untuk digunakan menulis. Hal seperti ini juga berlaku bagi anak.

Tokoh utama dari aliran empirisme adalah John Locke (1632-1704). Aliran ini mengemukakan bahwa anak yang baru lahir ibarat kertas yang putih bersih atau semacam *tabula rasa* (meja lilin).

³ Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.15.

Kertas putih bersih dapat ditulis dengan tinta warna apapun dan warna tulisannya sama dengan dengan warna tinta tersebut. Anak diumpamakan bagaikan kertas yang putih bersih sedangkan warna tinta diumpamakan sebagai lingkungan (pendidikan) yang akan berpengaruh terhadapnya. Dengan demikian, kesimpulan aliran empirisme adalah perkembangan individu sepenuhnya tergantung pada faktor lingkungan, sedangkan faktor bakat tidak ada pengaruhnya. Dasar pikiran yang digunakan ialah pada waktu dilahirkan, anak dalam keadaan bersih, suci, seperti kertas putih yang belum ditulis, sehingga dapat ditulis sesuai kehendak penulisnya.⁴

Setidaknya ada tiga istilah yang berhubungan dengan makna pendidikan, yakni: *Pertama*, kata **ta'lim**. Kata ini biasanya mengandung pengertian proses transfer seperangkat pengetahuan kepada anak didik. Konsekwensinya, dalam proses ta'lim ranah kognitif lebih menjadi dominan dibanding dengan ranah psikomotorik dan afektif. *Kedua*, **ta'dib**. Kata ini biasanya merujuk kepada proses pembentukan kepada kepribadian anak didik. *Ta'dib* merupakan *masdar* dari *addaba* yang dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Orientasi *ta'dib* lebih terfokus pada pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Oleh karena itu cakupan *ta'dib* lebih banyak ke ranah afeksi dibanding kognitif dan psikomotorik. *Ketiga*, kata *Tarbiyah*. Berbeda dengan ta'lim dan *ta'dib*. Kata tarbiyah menurut Nizar (2001: 87) memiliki arti mengasuh, bertanggungjawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, dan memproduksi serta menjinakkan baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniah. Makna tarbiyah mencakup semua aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik secara harmonis dan integral.⁵

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pendidikan agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang memiliki

⁴ Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 3.

⁵ *Ibid.*, h. 3.

keimanan, komitmen, ritual dan sosial pada tingkat yang diharapkan. Menerima tanpa keraguan sedikitpun akan kebenaran ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau memperlakukan objek keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran agama Islam. Meskipun secara konseptual tujuan-tujuan tersebut dapat dipisahkan namun dimensi keberagaman harus terpadu dalam diri individu sehingga membentuk sosok individu yang utuh. Dengan gambaran sosok yang demikian ini, maka pendidikan agama Islam harus diarahkan untuk meningkatkan dimensi, komitmen, ritual dan sosial secara terpadu dengan tetap berusaha mengembangkan sikap menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁶ Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam QS.

QS. Annisa (4): 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”⁷

Pendidikan budi pekerti yang dikembangkan dalam Islam memiliki tiga dimensi: 1) dimensi ketuhanan (*Ilahiyah*). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan Tuhannya yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia, seperti sifat-sifat *Ar-Rahman* (nilai kasih), *Ar-Rahim* (nilai sayang), *al-Malik* (nilai kepemimpinan), *al-quddus* (nilai kesucian), *al-salam* (nilai kesejahteraan dan kedamaian), *al-khaliq* (nilai produktivitas dan kreativitas), dan seterusnya yang berhubungan dengan *asmaul-husna*. 2) dimensi kemanusiaan (*insaniyah*). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan sesama manusia yang di

⁶*Ibid.*, h. 7.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 132.

dalamnya ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti saling menolong atau membantu, hormat-menghormati, saling menanggung, simpati, empati, memiliki tanggung jawab sosial, kepedulian sosial, dan kepekaan sosial. Dan 3) Dimensi kealaman (alamiyah). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan alam semesta karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Nilai-nilai yang ditanamkan pada individu adalah bagaimana ia mampu memelihara, memakmurkan dan memelihara alam ini dengan baik sebagai sarana beribadah kepada-Nya baik terhadap alam abiotik (bebatuan, tambang, air, udara, tanah, api, dan sebagainya) maupun biotik (segala jenis tumbuhan dan hewan).⁸

Konsep pendidikan merupakan hasil pemikiran, perenungan dan interpretasi pada ahli yang diinspirasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah, baik tentang konsep: 1) Ontologi pendidikan yang membahas tentang epistemologi dan metodologi dalam pendidikan Islam. 2) Epistemologi pendidikan, yang membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam ; dan 3) Aksiologi pendidikan, membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam. Teori-teori kependidikan yang dimaksud merupakan hasil kerja ilmiah dalam melihat pendidikan. Para ahli tidak lagi melihat pendidikan Islam dari sudut yang ideal dan normatif yang bersumber dari asas dan konsep pendidikan Islam tetapi lebih melihat dari sisi yang nyatanya. Sumber dari tata kerja ilmiah ini digali dari fenomena pendidikan yang berkembang pada orang atau masyarakat Islam dijadikan sebagai rujukan dalam membangun teori-teori kependidikan Islam. Dalam konteks ini persyaratan ilmiah (seperti riset dan eksperimen) menjadi bagian integral dalam membangun teori-teori pendidikan Islam.⁹

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dan menjadi penting dalam pendidikan Islam

⁸ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. XV-XVI.

⁹ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. 7.

sebab semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Konstruksi agama membutuhkan aktualisasi dalam berbagai dasar pendidikan yang lain, seperti historis, sosiologis, politik dan administratif, ekonomi, psikologi, dan filosofis. Agama menjadi *frame* bagi semua dasar pendidikan Islam. Aplikasi dasar-dasar yang lain merupakan bentuk realisasi diri yang bersumber dari agama dan bukan sebaliknya. Apabila agama Islam menjadi *frame* bagi dasar pendidikan Islam maka semua tindakan kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah merupakan aktualisasi diri (*self-actualization*) yang paling ideal dalam pendidikan Islam.¹⁰ Untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukan *tarbiyah adabiyah*.

Tarbiyah adabiyah atau pendidikan budi pekerti /akhlak dalam ajaran Islam merupakan salahsatu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki/melaksanakan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Bahkan tugas utama Rasulullah Muhammad saw. diutus ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak sebagaimana sabdanya: “Aku diutus (oleh Tuhan) untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulai” (Hadis Ahmad). Demikian pula dalam ajaran Islam, akhlak merupakan ukuran/barometer yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kadar iman seseorang sebagaimana sabdanya: “Sesempurna-sempurna orang mukmin imannya ialah yang lebih baik akhlaknya (Hadis Turmuzi).¹¹ Hal ini merupakan utama seorang pendidik yang mengupayakan perkembangan potensi peserta didik.

Lahirnya berbagai term dalam konteks pendidikan Islam identik dengan teori barat, di mana tugas pendidik secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi apektif. Dalam mengupayakan pencapaian hal tersebut, para pendidik sering diberi predikat *ustaz*, *murabbi*, *muallim*, *mudarris*, *mursyid*,

¹⁰ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. 47.

¹¹ Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 70.

dan *muaddib*. Predikat *ustaz* biasa digunakan untuk seorang professor. Ini mengandung bahwa seorang guru atau dosen dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap *continuous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya.¹²

Moralitas merupakan suatu ciri manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk selain manusia. Pada tahap hewan tidak ada kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dan yang dilarang, tentang yang harus dilakukan dengan tidak pantas dilakukan. Hewan tidak mempunyai keharusan, sedangkan manusia mempunyai keharusan moral sebagai kewajiban dan etika sebagai tata nilai dalam berinteraksi. Kewajiban dikhususkan untuk keharusan moral yang di dalamnya terkandung muata etika, nilai etik, dan etiket sebagai tata nilai yang diwujudkan menjadi moralitas manusia. Lebih dari itu etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi yang menggambarkan komitmen dan integritas pribadi seseorang yang bermoral dan beretika. Etika berhubungan dengan kesadaran etik yang tumbuh menjadi peristiwa rohani yang terjadi dalam kalbu atau nurani yang berujung pada keputusan batin dan bertanggungjawab atas keputusannya.¹³

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu: 1) ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan 3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak

¹² Abdul Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2019, h. 5–6.

¹³ Saiful Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan. Peluang dan Tantangan*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 1

ditentukan oleh bermacam-macam norma yang menjadi adat kebiasaan manusia itu sendiri (Mufid: 2009:91). Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Pengertian tersebut menegaskan bahwa etika adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok yang mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma-norma.¹⁴

Etiket berarti aturan sopan santun dalam pergaulan yaitu memberikan dan menunjukkan cara yang tepat untuk bertindak dan berbuat. Etiket menyangkut cara atau tata cara bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan. Etiket berlaku dalam pergaulan sosial ketika ada orang lain yang melihat perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Etika bersifat relatif yaitu terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu dan selalu menyangkut lahiriahnya saja yaitu wujud dari perbuatan itu, seperti bersikap ramah, bertutur sapa yang baik, mendengarkan dengan baik, menatap dengan sopan, melakukan gerakan yang menghargai orang lain dan perilaku baik lainnya. Etiket juga disebut **tatakrama**, yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat.

Inti dari pada proses pendidikan secara formal adalah mengajar. Sedangkan inti proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar. Sehingga dalam peristilahan kependidikan kita mengenal ungkapan Proses Belajar Mengajar atau disingkat PBM. Menganalisa proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Persoalan ini membawa implikasi: 1) Guru harus mempunyai pegangan asasi tentang mengajar dan dasar-dasar teori mengajar, 2) Guru harus dapat mengembangkan sistem pengajaran, 3) Guru harus mampu melakukan proses belajar mengajar yang efektif, dan 4) Guru harus mampu melakukan

¹⁴*Ibid.*, h. 11.

penilaian hasil belajar sebagai dasar umpan balik bagi seluruh proses yang ditempuh.¹⁵

Eksistensi manusia di muka bumi merupakan “wakil” (khalifah) Allah. Untuk mewujudkan fungsi itu, manusia telah dibekali oleh Allah dengan sejumlah potensi. Potensi utama dalam hal ini adalah *al-ruh* yang berasal secara rangsung dari Allah. Sebagai potensi ia berusaha untuk menjadi aktual sebagai khalifah sejalan dengan perkembangan jiwa manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa dimensi *al-ruh* dan jiwa manusia membutuhkan perwujudan diri sebagai khalifah. Khalifah merupakan puncak tingkat tertinggi perkembangan kemanusiaan manusia di muka bumi.¹⁶

Hampir seluruh ahli psikologi sependapat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan saja hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya saja. Berdasarkan hasil riset dan observasi mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati berupa keinginan untuk mencinta dan dicintai Tuhan.¹⁷

¹⁵ Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010, h. 1

¹⁶ Ramayulis. *Psikologi Agama*. Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013, h. 41.

¹⁷ *Ibid.*, h. 42.

BAB II

EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

A. Eksistensi PAI Terhadap Lembaga Pendidikan

Konsep pendidikan merupakan hasil pemikiran, perenungan dan interpretasi pada ahli yang diinspirasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah, baik tentang konsep: 1) Ontologi pendidikan yang membahas tentang epistemologi dan metodologi dalam pendidikan Islam, 2) Epistemologi pendidikan, yang membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam ; dan 3) Aksiologi pendidikan, yang membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam. Teori-teori kependidikan yang dimaksud merupakan hasil kerja ilmiah dalam melihat pendidikan. Para ahli tidak lagi melihat pendidikan Islam dari sudut yang ideal dan normatif yang bersumber dari asas dan konsep pendidikan Islam tetapi lebih melihat dari sisi yang nyatanya. Sumber dari tata kkerja ilmiah ini digali dari fenomena pendidikan yang berkembang pada orang atau masyarakat Islam dijadikan sebagai rujukan dalam membangun teori-teori kependidikan Islam. Dalam konteks ini persyaratan ilmiah (seperti riset dan eksperimen) menjadi bagian integral dalam membangun teori-teori pendidikan Islam.¹⁸

Dilihat dari tujuan pendidikan Islam, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, maka kegunaan ilmu pendidikan Islam sebagai berikut: 1) menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan eksistensi Allah dan seluruh ciptaan-Nya kepada anak didik; 2) menguatkan iman dan memperkaya pandangan anak didik tentang ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kehidupan manusia dan sumber ilmu pengetahuan; 4) memperluas penafsiran dan memperdalam pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan yang universal; 5) meyakinkan anak didik bahwa Al-Qur'an tidak melewatkan satu masalahpun yang berkaitan dengan ilmu

¹⁸ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. 7.

pengetahuan; 6) menunjukkan kepada dunia Barat bahwa ajaran Islam merupakan sumber ajaran beragama dan ide-ide dasar dari seluruh pengetahuan dan perkembangannya tidak mengenal waktu; 7) secara praktis, ilmu pendidikan Islam berguna untuk memberikan keterampilan hidup yang islami; 8) mencerdaskan anak didik; 9) membentuk akhlak yang mulia; dan 10) membentuk manusia yang memiliki kepedulian sosial, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Kahfi (18): 66:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

"Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

B. Eksistensi PAI Terhadap Tenaga Pendidik

Hingga saat ini lembaga pendidikan Islam masih sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat. Di antara tantangan yang dihadapi adalah globalisasi baik di bidang kapital, budaya etika atau moral. Era globalisasi adalah era pasar bebas dan sekaligus pasar bebas dalam produk material dan jasa. Kalau dulu, misalnya untuk membangun basis ekonomi masyarakat sangat mengandalkan pada *money capital* (modal, uang) yang selanjutnya berevolusi pada *human capital* yakni SDM yang menguasai ipteks, dapat mengerjakan tugas secara profesional serta berperilaku dan berpribadi mandiri.²⁰

Sedikitnya ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni: sarana gedung, buku yang berkualitas, guru dan tenaga kependidikan yang

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, dan Hendra Akhdiyati. *Ilmu Pendidikan Islam 1*. Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 59–60.

²⁰ Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 84.

profesional (Wardiman Djojonegoro, 2004). Hal ini memerlukan suatu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif.

Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum itu ke dalam keadaan khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan deduktif adalah: (a) memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif; (b) menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan buktinya; (c) disajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus itu dengan aturan prinsip umum, dan (d) disajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Berpikir deduktif disebut juga berpikir dengan menggunakan silogisme terdiri dari tiga preposisi statemen yang terdiri dari "*premise*" yaitu dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung suatu kebenaran. Berpikir deduktif prosesnya berlangsung dari yang umum menuju ke yang khusus. Dalam berpikir deduktif ini orang bertolak dari suatu teori, prinsip, ataupun kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Dan disitu diterapkan kepada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut.²¹

Pendekatan induktif pada awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris, Francis Bacon (1561) yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkrit sebanyak mungkin, sistem itu dipandang sebagai sistem berpikir yang paling baik pada abad pertengahan yaitu carta induktif disebut juga sebagai dogmatif artinya bersifat mempercayai begitu saja tanpa diteliti begitu saja tanpa diteliti secara rasional. Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari yang khusus kepada yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu

²¹ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv, 2013, h. 76.

dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena.²²

Pengertian pembelajaran (*instruction*) menurut Diaz Carlos (2011), merupakan akumulasi dari konsep mengajar (*teaching*) dan konsep belajar (*learning*). Penekannya terletak pada perpaduan antara keduanya yaitu kepada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut sebagai suatu sistem pembelajaran ini terdapat komponen-komponen yang meliputi: siswa, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedurserta alat atau media yang harus dipersiapkan. Dengan kata lain pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan, perlu direncanakanoleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Syaiful Sagala (2007) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Konsep pembelajaran oleh Degeng (1989) didefinisikan sebagai suatu proses dalam lingkungan seseorang yang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu (Saiful Sagala, 2007). Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan strategi pembelajaran. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan maxam dan urutan perbuatan yang digunakan dan atau dipercayakan guru-siswanya.²³

Mengajar lebih cenderung mengandung makna, yaitu aktivitas mentransfer pengetahuan atau IPTEKS yang dimiliki oleh guru kepada peserta didik agar peserta mengetahui memahami dan menguasai IPTEKS sesuai kemampuan yang dimiliki. Sedangkan mendidik ialah aktivitas mentransfer nilai, norma, adat-istiadat dan etika kepada anak didik agar mereka menjadi manusia yang mematuhi nilai, norma, adat-istiadat yang berlaku di masyarakat

²²*Ibid.*, h. 76.

²³ Mohamad Syarif Sumantr. *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktek di Tingkat Pendidikan Dasar*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 2.

sehingga menjadi peserta didik yang berpengetahuan dan memiliki sikap dan perilaku yang baik.²⁴

Mengajar sebagai profesi berarti mengkonstruksikan jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Memang tidak dimungkiri bahwa pada masa lampau para guru khususnya perempuan, telah ada yang melihat dan menyadari bahwa pekerjaan mereka sebagai guru merupakan suatu profesi bahkan sekadar sebagai pekerjaan belaka, namun lebih jauh dari itu. Cara pandang seperti itu jumlahnya lebih terbatas dibandingkan dengan yang melihat guru sebagai sekadar pekerjaan.²⁵ Semua ini tentunya berkaitan dengan pendidikan yang memiliki makna.

Setidaknya ada tiga istilah yang berhubungan dengan makna pendidikan, yakni: *Pertama*, kata **ta'lim**. Kata ini biasanya mengandung pengertian proses transfer seperangkat pengetahuan kepada anak didik. Konsekwensinya, dalam proses ta'lim ranah kognitif lebih menjadi dominan dibanding dengan ranah psikomotorik dan afektif. *Kedua*, **ta'dib**. Kata ini biasanya merujuk kepada proses pembentukan kepada kepribadian anak didik. *Ta'dib* merupakan *masdar* dari *addaba* yang dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Orientasi *ta'dib* lebih terfokus pada pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Oleh karena itu cakupan *ta'dib* lebih banyak ke ranah afeksi dibanding kognitif dan psikomotorik. *Ketiga*, kata **Tarbiyah**. Berbeda dengan *ta'lim* dan *ta'dib*. Kata tarbiyah menurut Nizar (2001: 87) memiliki arti mengasuh, bertanggungjawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, dan memproduksi serta menjinakkan baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniah. Makna *tarbiyah* mencakup semua aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik secara harmonis dan integral.²⁶

²⁴ Abdul Hadis, M.Pd., dan Nurhayati. *Psikologi dalam Pendidikan*: Cet. IV; Bandung: Alfabeta, Cv. 2015, h. 76.

²⁵ Damsar. *Mengajar sebagai Profesi*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 149.

²⁶ Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama*

Lahirnya berbagai term dalam konteks pendidikan Islam identik dengan teori barat, di mana tugas pendidik secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi apektif. Dalam mengupayakan pencapaian hal tersebut, para pendidik sering diberi predikat *ustaz*, *murabbi*, *muallim*, *mudarris*, *mursyid*, dan *muaddib*. Predikat *ustaz* biasa digunakan untuk seorang professor. Ini mengandung bahwa seorang guru atau dosen dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap *continuous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya.²⁷

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam sebab dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Konstruksi agama membutuhkan aktualisasi dalam berbagai dasar pendidikan yang lain, seperti historis, sosiologis, politik dan administratif, ekonomi, psikologi, dan filosofis. Agama menjadi *frame* bagi semua dasar pendidikan Islam. Aplikasi dasar-dasar yang lain merupakan bentuk realisasi diri yang bersumber dari agama dan bukan sebaliknya. Apabila agama Islam menjadi *frame* bagi dasar pendidikan Islam maka semua tindakan kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah ibadah merupakan aktualisasi diri (*self-actualization*) yang paling ideal dalam pendidikan Islam.²⁸

Islam. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 5.

²⁷ Abdul Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2019, h. 5–6.

²⁸ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. 47.

Seorang pendidik harus memiliki sifat kepribadian yang positif. Bagaimanapun alasannya seorang pendidik harus memiliki sifat kelebihan dari anak didiknya. Karena dia bertugas mendidik dan mengajar anak didik serta mengantarkannya menuju tujuan keberhasilan yang dicita-citakan, yakni memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Allah. Sulit rasanya seorang pendidik mampu membawa anak didiknya menuju keberhasilan tujuan pendidikan tersebut jika seorang guru atau seorang pendidik tidak terlebih dahulu memiliki sifat-sifat kepribadian tersebut. Seorang guru di samping keberadaannya sebagai figur contoh (*figur centered*) dihadapan anak didik, dia juga harus mampu mewarnai dan mengubah kondisi anak didik dari kondisi negatif menjadi positif dari keadaan yang kurang menjadi lebih. Guru atau pendidik terhadap anak didik bagaikan orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, yang artinya: “*Sesungguhnya aku terhadap kamu menduduki sebagai orang tua aku mengajarkan kamu*”.²⁹

C. Eksistensi PAI Terhadap Peserta Didik

Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang (pertumbuhan vertikal) dan menjadi tebal/lebar (pertumbuhan horisontal) dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai sejak terjadinya pembuahan (fertilisasi) antar sel telur dengan sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Ketika usia embrio mencapai satu bulan besarnya sekitar 0,5 cm. Pada usia dua bulan ukuran embrio membesar menjadi 2,5 cmdan kemudian disebut sebagai *fetus*. Satu bulan kemudian usia kandungan mencapai 3 bulan, fetus tersebut telah terbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil dan menurut ajaran Islam pada usia tiga bulan kehamilan tersebut anak dalam kandungan mulai

²⁹ Abdul Majid Khon. *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 65–66.

ditiupkan ruh kehidupan.³⁰ Dari dasar tersebut hingga akhirnya anak memiliki minat dan bakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar.³¹

Siswa yang suka berinteraksi dengan orang lain biasanya menyukai interaksi sosial, terlepas dari tugas apapun yang diberikan. Siswa seperti itu biasanya membutuhkan arahan guru tentang tugas dan cara menyelesaikannya. Guru, diakui atau tidak memiliki peran utama dalam mengembangkan karakter siswa dalam praktek-praktek sosial. Sebab guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa. Guru harus memberikan penjelasan yang jelas dan batas waktu.³²

Fenomena kejenuhan belajar adalah suatu penyebab yang menjadi perhatian signifikan dalam pembelajaran. Kejenuhan adalah suatu sumber frustrasi fundamental bagi peserta didik dan juga pendidik di lain pihak intervensi pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan selalu tidak memecahkan masalah yang esensial. Kejenuhan belajar (*plateauing*) adalah rentang waktu tertentu yang dipakai untuk belajar, tetapi tidak memandang hasil. Karena antara lain kelelahan mental dan indera-indera. Kejenuhan belajar yaitu periode kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan pada individu karena berbagai faktor: 1) kesulitan bahan yang dipelajari meningkat, sehingga yang belajar tidak mampu menyelesaikan, sekaligus yang belajar terus berusaha, 2) metode

³⁰ Sitti Hartinah, DS, M.M. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008, h. 33.

³¹ Abdul Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2019, h. 37.

³² Baharuddin. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 189.

belajar yang digunakan individu tidak memadai sehingga upaya yang dilakukannya akan sia-sia belaka, dan 3) kejenuhan belajar yang disebabkan oleh keletihan atau kelelahan badan.³³

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Pengalaman diperoleh seseorang dalam interaksi dengan lingkungan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Menurut Eveile dan Nara (2010), belajar adalah proses kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek: a) bertambahnya jumlah pengetahuan; b) adanya kemampuan mengingat dan memproduksi; c) adanya penerapan pengetahuan; d) menyimpulkan makna; dan e) menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas.³⁴

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pendidikan agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang memiliki keimanan, komitmen, ritual dan sosial pada tingkat yang diharapkan. Menerima tanpa keraguan sedikitpun akan kebenaran ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau memperlakukan objek keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran agama Islam. Meskipun secara konseptual tujuan-tujuan tersebut dapat dipisahkan namun dimensi keberagaman harus terpadu dalam diri individu sehingga membentuk sosok individu yang utuh. Dengan gambaran sosok yang demikian ini, maka pendidikan agama Islam harus diarahkan untuk meningkatkan dimensi, komitmen, ritual dan sosial secara terpadu dengan tetap berusaha mengembangkan sikap menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.³⁵

³³ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv, 2013, h. 55.

³⁴ Mohamad Syarif Sumantr. *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktek di Tingkat Pendidikan Dasar*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 2.

³⁵ Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama*

Menurut Roger, peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam: 1) membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar; 2) membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar; 3) membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar; 4) menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa; dan 5) menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya (Morris, 1982).³⁶

Belajar memiliki tiga proses, yaitu: belajar sebagai kognitif, belajar sebagai afektif, dan belajar sebagai psikomotorik. Dari ketiga proses ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Belajar sebagai proses kognitif artinya tindakan-tindakan belajar itu lebih diarahkan kepada lapangan kognitif, lapangan ini berhubungan dengan berpikir, mengumpulkan pengetahuan serta pemecahan-pemecahan masalah. Proses afektif diartikan sebagai suatu cara terhadap suatu perangsang atau suatu kecenderungan perubahan sikap melalui proses ini terbentuk sistem yang menentukan relasi individu dengan lingkungannya. Dalam pembentukan sikap, faktor keluarga, sekolah dan lingkungan terhadap pendidikan sangat berpengaruh dalam perkembangan aspirasi anak-anak. Dan proses psikomotorik, bahwa belajar adalah proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya, maka dalam proses psikomotor ini unsur-unsur kejiwaan (psikis) terpadu dengan unsur kejasmanian melalui tahap-tahap belajar, di mana dari hasil keterpaduan ini akan menghasilkan keterampilan motorik (gerak).³⁷

Islam. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 7.

³⁶ Abdul Hadis, M.Pd., dan Nurhayati. *Psikologi dalam Pendidikan*: Cet. IV; Bandung: Alfabeta, Cv. 2015, h. 71.

³⁷ Akyas Azhari. *Psikologi Pendidikan*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996, h. 43.

Pertumbuhan fisik setelah lahir merupakan kelanjutan dari pertumbuhannya sebelum lahir. Proses tersebut melibatkan penambahan berat, panjang, dan ketebalan tubuh yang berlangsung hingga dewasa. Selama tahun pertama pertumbuhannya ukuran panjang badannya akan bertambah menjadi sekitar tiga kalinya. Pertumbuhan bukan tidak terbatas. Pertumbuhan pertama-tama dibatasi oleh faktor genetik yang diturunkan. Pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi esensial dibandingkan dengan kecukupannya serta kehadiran zat beracun juga membatasi bentuk dan ukuran tubuh. Sebagai bagian terpadu dari mekanisme *homeostati*. Terdapat dua hukum pertumbuhan fisik yang berlaku umum dan menyeluruh (Satoto, 1993), yaitu: 1) Hukum cephalocaudal, yakni pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju kaki. Bagian kepala tumbuh lebih dahulu daripada daerah-daerah lain. Kematangan pertumbuhan juga berlangsung lebih dahulu dari pada kepala. Kemudian berlanjut kepada bagian-bagian lain dari tubuh. Bayi baru lahir sudah dapat menggerakkan mata atau bibir kemudian masa berikutnya mampu menggerakkan lengan dan tangan kemudian disusul kemampuan dengan menggerakkan tungkai dan kaki. Sebagai akibatnya bayi yang baru lahir memiliki kepala yang secara proporsi lebih besar dari bagian yang lain. Pada masa-masa berikutnya, kepala secara proporsional lebih kecil; dan 2) Hukum proximodistal, yaitu pertumbuhan berpusat dari daerah sumbu (*proximo*) ke arah tepi (*distal*). Alat-alat yang berada di daerah sumbu, misalnya jantung, alat-alat nafas dan pencernaan tumbuh lebih dahulu dan lebih pesat dibandingkan di daerah tepi, misalnya anggota gerak badan.³⁸

Perkembangan psikomotorik atau sebagai perkembangan motor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf dan otot. Proses tersebut dimulai dengan gerakan-gerakan kasar (*gross movement*) yang melibatkan bagian-bagian

³⁸ Sitti Hartinah, DS, M.M. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008, h. 3-3.4

besar dari tubuh bagian fungsi duduk, berjalan, lari, melompat dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi halus (*finer coordination*) yang melibatkan kelompok otot-otot halus dalam fungsi meraih, memegang, melempar, menulis, menggambar, dan lain-lain. Keterampilan motorik memiliki struktur yang kompleks dan berbeda-beda. Terdapat dua dimensi keterampilan yaitu dimensi ketepatan, kecepatan dan kekuatan, serta dimensi koordinasi keseimbangan. Terdapat lima prinsip perkembangan motor merupakan fungsi dan pematangan susunan syaraf dan otot. Gerakan motorik tidak akan terjadi sampai anak memiliki kesiapan motor dan syaraf untuk gerakan tersebut, perkembangan motor secara umum mengikuti pola yang dapat diramalkan. Hukum sefalokaudal dan hukum *proximodistal* berlaku untuk perkembangan motor, dimungkinkan untuk menegakkan perkembangan motor dan terdapat perbedaan individual dalam perkembangan motor.³⁹

Dari Abu Said Al-Khudry, r.a. berkata: “Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah banyak orang yang telah mendapatkan hadis dari tuan, maka berilah kami kesempatan suatu hari yang mana kami akan datang dan di situ sudilah kiranya tuan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan pada tuan. Beliau bersabda: “*Berkumpullah kalian pada hari anu di tempat anu*”, maka berkumpullah mereka dan Nabi SAW mendatangi mereka serta mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Di situ beliau bersabda: “*Tiada seorang perempuan pun di antara kamu yang kematian tiga orang anaknya lebih dahulu melainkan mereka menjadi tirai dari api neraka bagi mereka. Bagaimana kalau dua orang anak?*”. Rasulullah menjawab: “*Ya dua orang anak?*”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Pendidikan budi pekerti yang dikembangkan dalam Islam memiliki tiga dimensi: 1) Dimensi ketuhanan (*Ilahiyah*). Dimensi ini

³⁹Sitti Hartinah, DS, M.M. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008, h. 35.

⁴⁰Abdul Majid Khon. *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 333.

menjelaskan hubungan individu dengan Tuhannya yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia, seperti sifat-sifat *Ar-Rahman* (nilai kasih), *Ar-Rahim* (nilai sayang), *al-Malik* (nilai kepemimpinan), *al-quddus* (nilai kesucian), *al-salam* (nilai kesejahteraan dan kedamaian), *al-khaliq* (nilai produktivitas dan kreativitas), dan seterusnya yang berhubungan dengan *asmaulu-husna*. 2) Dimensi kemanusiaan (*Insaniyah*). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan sesama manusia yang di dalamnya di tanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti saling menolong atau membantu, hormat-menghormati, saling menanggung, simpati, empati, memiliki tanggung jawab sosial, kepedulian sosial, dan kepekaan sosial. Dan 3) Dimensi kealaman (*alamiyah*). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan alam semesta karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Nilai-nilai yang ditanamkan pada individu adalah bagaimana ia mampu memelihara, memakmurkan dan memelihara alam ini dengan baik sebagai sarana beribadah kepada-Nya baik terhadap alam abiotik (bebatuan, tambang, air, udara, tanah, api, dan sebagainya) maupun biotik (segala jenis tumbuhan dan hewan).⁴¹

Teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mnedekati kajian bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi, daripada bidang psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian dalam bentuknya yang paling ideal dari pada pemahaman tentang proses

⁴¹ Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. XV–XVI.

belajar sebagaimana apa adanya, seperti selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya.⁴²

Kolb seorang ahli penganut aliran humanistik membagi belajar menjadi 4 tahap: a) Tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Namun memiliki kesadaran tentang hakikat dan peristiwa tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. b) Tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama makin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi; c) Tahap konseptualisasi, tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum sesuai prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya; dan d) Tahap eksperimentasi aktif, tahap terakhir dari peristiwa belajar menurut Kolb adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini seseorang mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Berpikir deduktif lebih banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori aturan-aturan ke dalam situasi nyata.⁴³

Bimbingan atau bantuan dari orang dewasa atau teman yang lebih kompeten sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas belajar. Bantuan-bantuan tersebut tentunya harus sesuai dengan

⁴²Asri Budiningsih. *Belajar dan Pembelajaran*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, h. 68.

⁴³Asri Budiningsih. *Belajar dan Pembelajaran*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, h. 70–71.

konteks sosio-kultural atau karakteristik anak. Bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih koimpoten bermanfaat untuk memahami alat-alat semiotik, seperti bahasa, tanda, dan lambang-lambang. Anak mengalami proses internalisasi yang selanjutnya alat-alat ini berfungsi sebagai mediator sebagai proses-proses psikologis lebih lanjut dalam diri anak. Maka bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif-kolaboratif serta pembelajaran konseptual sangat tepat diterapkan.⁴⁴

D. Eksistensi PAI Terhadap Kurikulum

Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu. Membudayakan berpikir ilmiah pada dasarnya ditujukan agar masyarakat lebih berorientasi kepada penalaran ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi ini dicerninkan baik dalam sistem nilai yang menempatkan cara berpikir ilmiah sebagai suatu konsep penalaran yang dapat diandalkan maupun dalam tata hidup yang berlandaskan ilmiah tersebut.

Kawasan kognitif terdiri dari enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut: 1) Tingkat pengetahuan (*knowledge*). Tujuan instruksional pada level ini menuntut siswa untuk mampu mengingat (*recall*) informasi yang telah diterima sebelumnya, misalnya: fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya; 2) Tingkat pemahaman (*comprehension*). Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri; 3) Tingkat penerapan (*aplication*). Penerapan merupakan kemampuan menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi yang baru serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari; 4) Tingkat Analisis (*Analysis*). Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap

⁴⁴Asri Budiningsih. *Belajar dan Pembelajaran*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, h. 105.

komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Dalam hal ini siswa diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari; 5) Tingkat Sintetis (*Synthesis*). Sintetis di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh; dan 6) Tingkat evaluasi (*evaluation*). Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi evaluasi di sini lebih condong ke bentuk penilaian biasa daripada sistem evaluasi.⁴⁵

Kawasan afektif merupakan tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati (*attitude*) yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan efektif yang terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai kepada yang kompleks yang merupakan faktor internal seseorang, seperti kepribadian hati nurani. Dalam literatur dan tujuan efektif disebut sebagai minat, sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai serta kecenderungan emosi. Perumusan tujuan instruksional pada kawasan afektif tidak beda jauh bila dibandingkan dengan kawasan kognitif tetapi dalam mengukur hasil belajarnya jauh lebih sukar karena menyangkut kawasan sikap dan apresiasi. Di samping itu kawasan afektif juga sulit dicapai yang ada di pendidikan formal karena pada pendidikan formal karena pada pendidikan formal perilaku nampak dapat diasumsikan timbul sebagai akibat dari kekakuan aturan, disiplin belajar, waktu belajar, tempat belajar, dan norma-norma lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku seperti itu timbul bukan karena siswa lebih sadar dan menghayati betul tentang kebutuhan akan sikap dan perilaku tersebut tetapi dilakukan karena sekedar untuk memenuhi dan disiplin saja agar tidak mendapat hukuman. Untuk

⁴⁵ Martinus Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta: Gunung Persada Press, 2009, h. 27–28.

memperoleh gambaran tentang kawasan tujuan instruksional afektif secara utuh, berikut ini akan dijelaskan secara tingkat secara berurutan berupa contoh konkret berikut ini: 1) Tingkat menerima (*receiving*). Menerima di sini adalah diartikan sebagai pembentukan sikap dan perilaku dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya (*stimulus*) tertentu yang mengandung estetika; 2) Tingkat tanggapan (*reponding*). Tanggapan atau jawaban (*reponding*) mempunyai beberapa pengertian, antara lain: (a) Tanggapan dilihat dari segi pendidikan diartikan sebagai perilaku baru dari sasaran didik (siswa) sebagai manifestasi dari pendapatnya yang timbul karena adanya perangsang pada saat ia belajar, (b) Tanggapan dilihat dari segi psikologi perilaku (*behavior psychology*) adalah segala perubahan perilaku organisme yang terjadi atau yang timbul karena adanya perangsang dan perubahan tersebut dapat diamati, (c) Tanggapan dilihat dari segi adanya kemauan dan kemampuan untuk bereaksi terhadap suatu kejadian (*stimulus*) dengan cara berpartisipasi dalam berbagai bentuk; 3) Tingkat Menilai (*appreciate*). Menilai dapat diartikan sebagai: (a) Pengakuan secara objektif (jujur) bahwa siswa itu objek, sistem atau benda tertentu mempunyai kadar manfaat, (b). Kemauan untuk menerima suatu objek atau kenyataan setelah seseorang itu sadar bahwa objek tersebut mempunyai nilai atau kekuatan dengan cara menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku positif atau negatif; 4) Tingkat Organisasi (*organization*). Organisasi dapat diartikan sebagai: (a) Proses konseptualisasi nilai-nilai dan menyusun hubungan antar nilai-nilai tersebut kemudian memilih nilai-nilai yang terbaik untuk diterapkan; (b) Kemungkinan untuk mengorganisasikan nilai-nilai, menentukan hubungan antar nilai bahwa suatu nilai itu lebih dominan dibanding nilai yang lain apabila kepadanya diberikan berbagai nilai; 5) Tingkat karakterisasi (*characterization*). Karakterisasi adalah sikap dan perbuatan yang secara sistem dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat diterimanya sehingga sifat dan perbuatan itu seolah-olah menjadi ciri pelakunya.⁴⁶

⁴⁶ Martinus Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta: Gunung Persada Press, 2009, h. 32–36.

Kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berorientasi kepada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan (*action*) yang memerlukan koordinasi dengan syaraf dan otot. Dalam literatur tujuan ini tidak banyak ditemukan penjelasannya dan lebih banyak dihubungkan dengan latihan menulis, berbicara dan olahraga serta bidang studi berkaitan dengan keterampilan. Kalau dilihat dari taxonomi keempat urutannya tidak bertingkat seperti pada kawasan kognitif dan afektif. Kelompok-kelompok tersebut adalah: 1) Gerakan seluruh badan (*gros body movement*) adalah perilaku seseorang dalam suatu kegiatan yang memerlukan gerakan fisik secara menyeluruh; 2) Gerakan yang terkoordinasi (*coordination movement*). Gerakan yang terkoordinasi adalah gerakan yang dihasilkan dari perpaduan antara fungsi salahsatu atau lebih indera manusia dengan salahsatu anggota badan; 3) Komunikasi Nonverbal adalah hal-hal yang berkenaan dengan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau isyarat, misalnya isyarat, dengan tangan, anggukan kepala, ekspresi wajah, dan lain-lain.⁴⁷

Inti dari pada proses pendidikan secara formal adalah mengajar. Sedangkan inti proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar. Sehingga dalam peristilahan kependidikan kita mengenal ungkapan Proses Belajar Mengajar atau disingkat PBM. Menganalisa proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Persoalan ini membawa implikasi: guru harus mempunyai pegangan asasi tentang mengajar dan dasar-dasar teori mengajar, guru harus dapat mengembangkan sistem pengajaran, guru harus mampu melakukan proses belajar mengajar yang efektif, dan guru harus mampu melakukan penilaian hasil belajar sebagai dasar umpan balik bagi seluruh proses yang ditempuh.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, h. 37.

⁴⁸ Muh. Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: S. Baru Agensindo, 2010, h. 1

BAB III

EKSISTENSI MAJELIS TAKLIM (MT)

A. Eksistensi MT Terhadap Lembaga Pendidikan

Dasar penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya adalah kebijakan pemerintah, pembiayaan, yakni sumber pembiayaan, fungsi manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, pemanfaatan sumber daya manusia, dan anggota sekaligus peserta didik Majelis Taklim.

Tantangan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, antara lain: era globalisasi, dekadensi moral manusia, dan pengutamaan urusan dunia yang dapat memberikan sesuatu yang bersifat materi dan kurang kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak.

Sedangkan harapan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, di antaranya: membangun manusia yang beriman, bertakwa dan meningkatkan kecerdasan dalam bidang agama, peningkatan hubungan silaturahmi dan *ukhuwah Islamiyah*, dan pusat ilmu dalam masyarakat, yakni penyelenggaraan Majelis Taklim yang memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni pusat informasi perkembangan pengetahuan Islam, pusat pembinaan pengetahuan Islam, dan pusat konsultasi agama Islam.

Penyelenggaraan Majelis Taklim yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Penyelenggaraan Majelis Taklim yang merupakan pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat Islam agar dapat terintegrasi dalam kehidupan beragama. Integrasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan Majelis Taklim harus menjadi benteng dalam masyarakat khususnya penyelenggaraan pendidikan Islam di luar sekolah.

Penyelenggaraan Majelis Taklim telah dilegitimasi oleh Pemerintah, di antaranya termaktub di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan

Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan KMA No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Legitimasi tersebut sebagai indikator bahwa penyelenggaraan Majelis Taklim di Indonesia memiliki ruang gerak yang luas. Jika seandainya pemerintah tidak melegitimasi penyelenggaraan dan eksistensinya, maka akan berimplikasi pada implementasi Majelis Taklim di lapangan, yakni kepedulian masyarakat akan berkurang mengingat adanya rasa kewaspadaan yang tinggi akan dampak sosial yang diterimanya. Misalnya, mendapat sorotan dan atau hambatan dari suatu lingkungan yang tingkat religiusnya masih rendah.

Penyelenggaraan Majelis Taklim tidak luput dari tantangan yang dihadapinya, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak profesional atau memiliki niat yang tidak relevan dengan tujuan dan fungsi majelis taklim, akan tetapi memiliki tujuan lain. Majelis Taklim sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Padahal penyelenggaraan Majelis Taklim bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang agama. Kendala lain adalah pengaruh era globalisasi saat ini yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Islam. Seperti halnya saat ini, penggunaan internet memberikan manfaat positif namun juga memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan aspek apektif terutama kepada generasi muda. Dampak tersebut menjadikan manusia memiliki dekadensi moral sehingga dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan Majelis Taklim sehingga perhatian pada pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi hal yang utama, melainkan sebagai suatu kegiatan seremonial. Dengan legitimasi yang diberikan Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan potensi yang perlu dibina dan dikembangkan secara kontinyu dan komprehensif.

Kendala dalam proses penyelenggaraan Majelis Taklim tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat menyelenggarakannya. Karena kendala yang ada menjadi pertimbangan dalam setiap langkah penyelenggaraan agar dapat berlangsung dengan baik walaupun dinamika Majelis Taklim tidak luput dari faktor penghambat. Usaha maksimal dalam upaya mengatasi kendala

adalah bagaimana mengatasi paradigma masyarakat bahwa eksistensi Majelis Taklim adalah perkumpulan wanita muslim untuk mengadakan kegiatan silaturahmi dan arisan. Padahal, tujuan utama penyelenggaraannya adalah untuk meningkatkan *ta'lim* yakni pengetahuan Islam dan *ta'dif*, yakni moral dan tingkahlaku manusia agar lebih baik sesuai dengan kaidah Islam dan norma sosial kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan Majelis Taklim memiliki suatu harapan besar bagi umat Islam, yakni membangun manusia yang beriman dan memiliki pengetahuan dan wawasan keislaman. Eksistensi Majelis Taklim memberikan suatu harapan bagi umat Islam, apabila pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan sosial dan manajemen. Pendekatan sosial yang dimaksudkan adalah penyelenggara Majelis Taklim mampu melakukan hubungan dan komunikasi di sekitar Majelis Taklim berada agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dan pendekatan manajemen yang dimaksud adalah penyelenggara Majelis Taklim mampu mengelola organisasi secara optimal dengan pendekatan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan/pergerakan), dan *controlling* (pengawasan). Dengan melakukan pendekatan tersebut, pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim memberikan suatu harapan bagi umat Islam, bangsa, dan Negara RI.

Dasar penyelenggaraan Majelis Taklim berdasarkan kebijakan Pemerintah, antara lain: UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **Pasal 1 butir 2:** Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. **Pasal 1 butir 12:** Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. **Pasal 1 butir 16:** Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. **Pasal 3:** Pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. **Pasal 30 ayat: (1)** Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. **Pasal 55 ayat (1):** Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, **Pasal 8 ayat: (1)** Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. **Pasal 23 ayat: (1)** Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta; (2)

Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., serta akhlak mulia; dan (3) Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

KMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, **Pasal 1:** Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam; (2) Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmiliah, pendidikan al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sebagainya, dan (3) Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam. **Pasal 2:** Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk: a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*; b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, dan c. Mengembangkan pribadi *ahlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim merupakan kebutuhan mendasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan dalam masyarakat. Karena tanpa pembiayaan yang cukup, maka implementasi Majelis Taklim

tidak dapat dilakukan secara optimal. Pembiayaan Majelis Taklim akan mendorong pelaksanaan dan motivasi kerja secara optimal.

Sumber pembiayaan Majelis Taklim bersumber dari anggota Majelis Taklim, organisasi, instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat. Pemanfaatan dana Majelis Taklim yang ada harus tepat sasaran untuk terwujudnya program Majelis Taklim. Dan untuk menggunakan pembiayaan Majelis Taklim dilakukan secara terbuka bahkan diperlukan musyawarah dan kebersamaan untuk dapat menentukan penggunaan dana yang ada.

Penggunaan dana dalam pembiayaan Majelis Taklim adalah:

- a. Penggunaan dana keperluan organisasi
- b. Penggunaan dana keperluan pembinaan dan pengembangan.
- c. Penggunaan dana konsumsi dan penyelenggaraan acara.

Untuk terselenggaranya pembiayaan dengan akuntabilitas, maka setiap enam bulan dilakukan rapat atau musyawarah yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan Majelis Taklim agar tidak terjadi kekosongan dana atau adanya utang Majelis Taklim. Untuk itu diperlukan hal berikut ini :

1) Fungsi Manajemen Pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan Majelis Taklim secara efektif, manajemen pendidikan seyogyanya difungsikan. Syafaruddin (2003), menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan Georger R. Terry (1978), telah menyederhanakan fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dilihat dari prosesnya fungsi manajemen tersebut dapat dianggap cukup bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materil melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.⁴⁹

Fungsi manajerial yang terdapat dalam proses kegiatan Majelis Taklim, adalah: 1) fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar

⁴⁹Sagaf, *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ip4m, 2009), h. 46

terbebas dari kebodohan; 2) fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan; 3) fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah; dan (4) fungsi religius, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Fungsi yang diatur oleh agama yang mewajibkan umatnya untuk mencari suatu ilmu dan menghindarkan diri dari aspek kebodohan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas.⁵⁰

Menurut Buchari Zainun, ada beberapa prinsip organisasi dan manajemen, sebagai berikut: 1) Sesuatu kebijakan mengandung tujuan atau misi dari organisasi yang harus diberitahukan kepada pihak yang bertanggungjawab mencapainya. Dengan tujuan ini dapat diukur efisiensi kerja organisasi; 2) Semua pekerjaan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan harus terperinci, terencana, serta diatur dengan sistematis hingga akibat duplikasi dan pemborosan dapat dibatasi, bahkan dalam beberapa hal duplikasi dapat dihindari; 3) Tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab yang hendak diserahkan kepada petugas atau pejabat yang bertanggungjawab, rinciannya harus jelas dan dipahami. Tetapi untuk menjaga fleksibilitas dan timbulnya kemungkinan lain, maka kemungkinan diizinkan menambah perincian dengan tugas yang lain; 4) Pemberian tugas dan wewenang harus disertai dengan wewenang yang seimbang. Sedapatnya wewenang tersebut berada di mana tugas dilaksanakan; 4) Perlu adanya struktur organisasi sebagai gambaran dari hubungan wewenang dan tanggungjawab yang dapat dipergunakan sebagai alat penyalur tugas, tanggungjawab, dan wewenang, informasi, sumberdaya, dan perintah; 5) Setiap organisasi atau bagian organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai syarat kecakapan yang sesuai. Pemimpin yang

⁵⁰Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 18.

cakap itu, semestinya orang yang mempunyai kemampuan melihat keseluruhan dari tujuan kesatuan organisasi yang dipimpinnya; 6) Koordinasi yang sempurna harus dipelihara dalam organisasi baik di antara anggota maupun kelompok pekerja dan satuan kerjanya agar sinergitas dalam berorganisasi berjalan dengan baik; dan 7) Organisasi hanya alat, karena itu harus disesuaikan kebutuhan tuntutan dan situasi. Perubahan suatu organisasi/reorganisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh organisasi. Dan harus pula dijaga perubahan organisasi untuk tidak berhasil mengganggu stabilitas kerja berorganisasi dalam upaya mempengaruhi moral dan semangat kerja anggota organisasi.⁵¹

Secara eksplisit dikemukakan bahwa suatu sistem itu lebih cenderung bersifat terbuka. Hal ini dinyatakan dengan adanya aspek lingkungan yang berhubungan erat dengan bagian dari sistem yang berperan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka, tujuan organisasi mempunyai kebergantungan. Prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem: 1) manajemen berdasarkan sasaran; 2) manajemen berdasarkan teknik; 3) manajemen berdasarkan struktur; 4) manajemen berdasarkan orang; dan 5) manajemen berdasarkan informasi.

Pendekatan sistem merupakan suatu metode atau teknik analisis yang secara khusus disebut analisis sistem (*system analysis*) terutama berfungsi dalam pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam hal ini pendekatan sistem dikaitkan dengan metode ilmiah. Analisis sistem ini mencakup: (a) menyadari adanya masalah; (b) mengidentifikasi variabel yang relevan; (c) menganalisis faktor-faktor; dan (d) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan.

Fungsi Manajemen Pendidikan adalah: 1) *Planning* (Perencanaan). Muhammad Fikry (1978), menguraikan bahwa

⁵¹B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.

perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan adalah upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan *resources* yang ada. Dan, Fakry Gaffar, mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis, rasional, dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.

Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip penyusunan organisasi berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Di antara prinsip organisasi yang tersurat dalam QS. Al-Maidah/5: 2: *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"*.⁵² Dan QS. At-Thalaq/65 : 7: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatasi rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*⁵³

Dalam ajaran Islam, diperlukan organisasi. Rasulullah saw. bersabda bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada seorang shalat sendirian. Arti hadis ini mengisyaratkan bahwa keutamaan shalat berjamaah sama halnya dengan berorganisasi dengan baik. Kesulitan dapat dipermudah apabila dipikul bersama. Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara berjamaah atau berorganisasi, lebih besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 818.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan Majelis Taklim, berikut ini :

1. *Planning* (Perencanaan)

Sebelum kegiatan dilakukan maka terlebih dahulu ada planning (perencanaan). Setiap organisasi termasuk Majelis Taklim wajib memiliki perencanaan terlebih dahulu agar kegiatan dan program yang akan dilakukan terarah dan dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tanpa perencanaan kegiatan dapat dilakukan tapi hasilnya tidak terorganisir, tidak bermutu, dan tidak diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian perencanaan ini sangat menentukan keberhasilan suatu Majelis Taklim itu sendiri.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam berorganisasi harus ada prinsip tertentu agar pelaksanaan kegiatan organisasi tercapai sesuai dengan tujuan. Prinsip organisasi menurut Manulang,⁵⁴ yakni (a) adanya tujuan yang jelas, yakni tujuan organisasi harus ditetapkan sebelum perencanaan kegiatan dirumuskan karena rencana harus merujuk dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi; (b) prinsip kerjasama, yakni tolok-ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerjasama di antara semua anggota organisasi.

3. *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan)

Pergerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pentingnya unsure manusia, jelas terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan hidup manusia. Tepat tidaknya strategi dasar telah ditetapkan sebagai penunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan itu hanya bermakna apabila diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Karena itulah tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa sentralnya posisi manusia dalam

⁵⁴Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 187-188.

organisasi, agar mereka mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya.⁵⁵

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan atau *controlling* adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengarahan dilakukan pimpinan organisasi.⁵⁶ Menurut Murdick, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap: (a) menetapkan standar pelaksanaan; (b) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; dan (c) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard dan rencana.⁵⁷

Hal-hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas, adalah :

a. **Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Majelis Taklim sangat diperlukan untuk terlaksananya seluruh aktivitas Majelis Taklim. Apabila penyelenggara suatu Majelis Taklim tidak menggunakan tenaga dan pengurus yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan oleh fungsi dan tujuan Majelis Taklim, maka *susnaibility* Majelis Taklim tidak dapat terwujud secara komprehensif dan bermutu. Akan tetapi diselenggarakan dengan apa adanya. Penyelenggaraan Majelis taklim seperti ini biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang bukan tujuan pengetahuan Islam sebagai pilar utama. Pemanfaatan sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan suatu Majelis Taklim sebagai pengemban misi pendidikan dan dakwah dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan pengetahuan agama Islam.

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu Majelis Taklim terdiri dari 2 unsur: 1) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengorganisasian, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan organisasi Majelis Taklim. Biasanya

⁵⁵Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 129.

⁵⁶Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 137.

⁵⁷Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 101.

yang dibutuhkan dalam pengorganisasian adalah orang yang memahami manajemen pendidikan atau memiliki pengetahuan manajerial yang tinggi dan atau memiliki kualifikasi ilmu manajemen pendidikan. Orang tersebut diyakini mampu membawa Majelis Taklim dapat berkembang dan bertahan secara optimal dan kontinyu; 2) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pembinaan, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembinaan kepada peserta didik atau anggota Majelis Taklim. Apabila pemanfaatan sumber daya manusia tidak memperhatikan kompetensi pembina, maka kualitas dan output peserta didik tidak akan bermutu. Untuk itu dibutuhkan tenaga yang mampu membina peserta didik atau anggota Majelis Taklim dari aspek keilmuan dan keislaman. Biasanya yang dibutuhkan dalam pembinaan Majelis Taklim adalah orang yang memiliki kualifikasi ilmu agama Islam cukup baik dan mampu mengkomunikasikan kepada peserta didik Majelis Taklim.

b. Peserta Didik

Anggota Majelis Taklim dikategorikan sebagai peserta didik yang pada waktu tertentu mendapat bimbingan dari ustadz yang memberikan ceramah agama atau sebagai narasumber dalam pertemuan Majelis Taklim. Namun peserta didik Majelis Taklim memiliki perbedaan peserta didik lembaga pendidikan formal. Peserta didik Majelis umumnya adalah orang dewasa, sedangkan peserta didik lembaga formal pada umumnya usia anak dan remaja. Karena Majelis Taklim pada umumnya orang dewasa dan sudah berkeluarga, maka pembina harus mampu melakukan adaptasi dengan peserta didik seperti ini. Apabila pembina memperlakukan peserta didik Majelis Taklim sama dengan peserta didik lembaga pendidikan formal, maka penyelenggaraan Majelis Taklim mengalami hambatan pembinaan dan finansial. Hambatan pembinaan yang terjadi adalah minat peserta didik akan berkurang untuk melakukan pertemuan yang diadakan Majelis Taklim. Dan hambatan pembinaan yang terjadi adalah kurangnya perhatian peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan Majelis Taklim yang sedang berjalan.

Dengan demikian peserta didik turut memberikan andil atas penyelenggaraan Majelis Taklim. Penyelenggara Majelis Taklim dengan peserta didik yang sekaligus anggota Majelis Taklim ada *feedback* antara keduanya dan saling memerlukan sehingga Majelis Taklim dapat dilangsungkan secara kontinyu.

c. Kebersamaan Umat Islam

Kebersamaan umat Islam dalam penyelenggaraan Majelis Taklim sangat diperlukan. Banyak kegiatan yang sifatnya kolektif saat ini tidak dapat berlanjut sesuai yang diharapkan mengingat kurang kompaknya para penyelenggara organisasi atau suatu lembaga. Begitu pula dengan penyelenggaraan Majelis Taklim seyogyanya mendapatkan dukungan masyarakat terutama yang berada di sekitar lingkungan Majelis Taklim diselenggarakan. Kebersamaan umat Islam dalam penyelenggaraan Majelis Taklim, terbagi menjadi empat bagian, yakni: 1) Kebersamaan dalam Publikasi, yakni kebersamaan masyarakat Islam mempublikasikan kepada masyarakat sekitar Majelis Taklim yang akan diselenggarakan agar eksistensinya diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga Majelis Taklim memiliki peserta didik yang cukup; 2) Kebersamaan dalam Pendanaan, yakni kebersamaan masyarakat Islam untuk berpartisipasi mendanai penyelenggaraan Majelis Taklim baik karena ia sebagai anggota maupun tidak termasuk anggota Majelis Taklim. Apabila ia bukan anggota Majelis Taklim, maka ia telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan mengharapkan ridha Allah Swt.; 3) Kebersamaan dalam Motivasi, yakni kebersamaan masyarakat Islam dalam memberikan motivasi kepada warga masyarakat agar tetap memiliki rasa simpati dan empati kepada Majelis Taklim sehingga baik anggota Majelis Taklim tetap termotivasi untuk tetap menjadi anggota. Dan bagi warga masyarakat yang bukan anggota Majelis Taklim tetap bersimpati terhadap keberlangsungan Majelis Taklim, dan 4) Kebersamaan dalam Pengawasan, yakni kebersamaan masyarakat Islam dalam mengawasi seluruh aktivitas Majelis Taklim. Pengawasan yang dimaksudkan adalah bukan yang berkaitan dengan keuangan, akan tetapi mengkhusus kepada jenis aktivitas Majelis Taklim untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ada salah

seorang anggota Majelis Taklim yang terpengaruh paham radikal dan menyebarkan paham radikal tersebut kepada anggota Majelis Taklim lainnya. Maka tindakan masyarakat sekitar adalah bersama-sama memberikan nasehat kepada salah dsatu anggota Majelis Taklim yang menyebarkan paham radikal tersebut.

Selain hal tersebut di atas, ada juga tantangan bagi Majelis Taklim, antara lain: 1) Era globalisasi, perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif bagi perkembangan perekonomian manusia. Namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang telah menglobal, disadari atau tidak, memberikan impilkasi dalam kehidupan beragama. Misalnya, kesenderungan masyarakat Islam lebih mengutamakan melihat tayangan televise bila dibandingkan mengikuti pertemuan Majelis Taklim. Implikasinya adalah pudarnya hubungan silaturrahi sesama umat Islam. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Majelis Taklim adalah meningkatkan hubungan silaturrahi dengan kegiatan Majelis Taklim dengan terjadinya interaksi antara satu individu Islam dengan individu muslim lainnya. Dan hal ini tidak dimiliki oleh sarana informasi lainnya.

Era globalisasi ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu kendala utama melainkan menjadi tantangan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan Majelis Taklim ke depan agar misi utama Majelis Taklim dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Bahkan dengan era globalisasi ini dapat dijadikan sarana yang aktual untuk mengaplikasikan materi Majelis Taklim dengan tidak meninggalkan fungsinya yang sesungguhnya. Misalnya, pemanfaatan internet secara kolektif yang berbasis pengetahuan Islam yang dipandu oleh pembina atau narasumber pada setiap pertemuan peserta didik; 2) Dekadensi Moral. Dekadensi moral manusia merupakan salah satu kendala penyelenggaraan Majelis Taklim. Di antaranya adalah sifat ego yang berlebihan dan atau kecintaan terhadap harta secara berlebihan. Akibatnya sifat ini biasa terbawa pada penyelenggaraan Majelis Taklim. Sebagai contoh konkrit, adalah setiap pertemuan Majelis Taklim para anggota Majelis Taklim yang didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga lebih mementingkan acara arisan daripada *taklim* dan *ta'dif* sebagai fungsi utama Majelis Taklim.

Hal tersebut sebagai indikator terjadinya dekadensi moral masyarakat Islam yang merupakan tantangan dalam suatu penyelenggaraan Majelis Taklim saat ini. Namun hal ini tidak dapat menjadi penghalang mengingat tidak secara umum orang dihinggapi penyakit masyarakat ini. Justru dengan eksistensi Majelis Taklim sebagai penetrasi karakter buruk manusia. Dekadensi moral merupakan salah satu tugas dan tantangan bagi Majelis Taklim untuk membenahi hal tersebut.

Sebahagian masyarakat Islam lebih cenderung kepada kegiatan yang bersifat duniawi yang dapat memberikan hal bersifat materi dan kurang kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak. Majelis Taklim adalah wadah untuk menumbuhkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Majelis Taklim adalah wadah untuk menuntut pengetahuan Islam di luar pendidikan formal yang seharusnya menjadi perhatian seluruh umat Islam. Namun tidak seluruh masyarakat Islam menyadari sepenuhnya manfaat ini, dan mereka lebih memilih urusan dunia semata. Hal ini juga merupakan tugas dan tantangan bagi penyelenggara Majelis Taklim untuk menyadarkan mereka agar dapat mencintai wadah ini yang mengembangkan misi pendidikan, etika dan moralitas.

Ada harapan dalam suatu penyelenggaraan Majelis Taklim merupakan wadah untuk membangun manusia yang beriman dan meningkatkan kecerdasan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan keislaman. Membangun manusia yang beriman adalah suatu hal yang mutlak bagi penyelenggaraan Majelis Taklim sebagai pendidikan keagamaan di luar sekolah. Dan hal tersebut merupakan wujud partisipasi lembaga pendidikan nonformal bidang agama. Dan begitu pula pengetahuan yang belum diperoleh pada lembaga pendidikan formal diperoleh melalui Majelis Taklim. Atau pernah dipelajari di sekolah dan diulangi pada Majelis Taklim sehingga materi pengetahuan Islam dapat lebih dipahami. Dan dengan pengetahuan keislaman yang didapatkan, maka anggota Majelis Taklim yang sekaligus peserta didik Majelis Taklim. Dengan pengetahuan Islam yang diperolehnya melalui Majelis Taklim, maka dengan sendirinya iman dapat bertambah. Hal inilah

yang disebut Majelis Taklim sebagai tempat membangun manusia yang beriman.

Adapun harapan yang ada pada Majelis Taklim, berikut ini:

a. Peningkatan Hubungan Silaturahmi dan *Ukhuwah Islamiyah*

Aktivitas yang ada pada Majelis Taklim adalah meningkatkan hubungan silaturahmi dan *ukhuwah Islamiyah*. Hubungan silaturahmi yang dimaksud adalah terjadinya interaksi antara individu muslim yang satu dengan individu muslim yang lainnya sehingga terjadi keakraban, persahabatan dan persaudaraan. Interaksi individu muslim pada Majelis Taklim berbeda situasinya dengan interaksi seorang muslim ketika berada di pasar, pantai, atau tempat umum lainnya. Interaksi yang terjadi pada Majelis Taklim diwarnai oleh hubungan yang didasari oleh agama sebagai pedoman sehingga interaksi tersebut tetap didasari oleh kaidah Islam. Ketika manusia tidak melakukan interaksi sosial kepada sesamanya, maka hubungan silaturahmi semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dengan adanya Majelis Taklim ini menjadi wadah meningkatkan silaturahmi sesama umat Islam yang diharuskan oleh ajaran Islam.

Kemudian Majelis Taklim juga meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* yang pada gilirannya memperkuat posisi agama Islam dalam usaha pengembangannya. Pengembangan ajaran Islam secara kualitas tidak dapat terwujud secara optimal apabila tidak didasari oleh *ukhuwah Islamiyah*. Peran Majelis Taklim dalam peningkatan *ukhuwah Islamiyah* adalah susnaibility program pengembangan pengetahuan Islam melalui pendidikan keagamaan nonformal.

b. Tripusat dalam Masyarakat

Penyelenggaraan Majelis Taklim memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni Majelis Taklim sebagai pusat ilmu dalam masyarakat di luar sekolah dalam bidang agama. Karena Majelis Ta'lim merupakan pusat *ta'lim* (ilmu), seyogyanya mempertahankan eksistensinya agar proses pelaksanaannya mendapatkan simpati dan empati masyarakat. Tripusat Majelis Taklim dalam masyarakat dalam bidang agama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian: (a) Pusat Informasi Perkembangan Pengetahuan

Islam; (b) Pusat Pembinaan Pengetahuan Islam; dan (c) Pusat Konsultasi Agama Islam. Pusat ilmu dalam masyarakat secara kualitas mungkin tidak dapat dipersamakan dengan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman pada perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengkajian lainnya. Namun secara kuantitas melalui Majelis Taklim, ilmu tentang agama Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok desa dan Majelis Taklimlah yang paling dekat dengan masyarakat hingga ke pelosok desa. Dan hal ini merupakan dambaan dan harapan yang besar bagi umat Islam.

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih untuk menjadi manusia, ibarat biji mangga, bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik pasti menjadi pohon mangga dan bukannya menjadi pohon jambu.⁵⁸

Sifat labil manusia justru merupakan daya dinamika hidup yang bersumber dari daya psikis cipta, rasa, dan karsa, dengan memajukan penyelenggaraan pendidikan, manusia bisa menumbuhkembangkan potensi cipta, rasa, dan karsa sampai pada titik padu untuk mendirikan sikap dan perilaku arif, agar selanjutnya manusia mampu membangun keberlangsungan hidup dan kehidupan ini.⁵⁹

Hal tersebut sesuai dengan hadis: "*Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena rida terhadap amal perbuatannya itu*". Mencari ilmu itu wajib hukumnya terelbih lagi ilmu agama karena ilmu agama dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang mencari ilmu didoakan oleh malaikat sehingga digambarkan dalam hadis bahwa mereka menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu karena mereka rida terhadapnya. Dalam hadis disebutkan bahwa orang mencari ilmu itu didoakan oleh semua

⁵⁸Rusli Yusuf. *Pendidikan dan Investasi Sosial*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv. 2011, h. 7.

⁵⁹Suparlan Suhartono. *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008, h. 17.

mahluk hidup sehingga ikan-ikan di laut pun ikut mendoakannya. Pengertian negeri Cina dalam hadis ini menunjukkan pengertian negeri yang terjauh; doa hadis ini sekaligus merupakan bukti sejarah bahwa bangsa Arab pada saat itu telah mengenal adanya negeri Cina. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Cina pun telah mengenal adanya negeri Arab. Atau makna yang dimaksud ialah mencari ilmu yang berkaitan dengan masalah orang banyak karena sejak zaman dahulu negeri Cina terkenal sebagai negeri pembuat kertas dan lain-lainnya yang tidak terdapat di nenegri Arab. Berdasarkan pengertian ini, maka makna yang dimaksud ialah carilah ilmu apapun yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.⁶⁰

Perkembangan kemajuan dan teknologi saat ini terjadi begitu cepat. Dalam era global sekarang ini keadaan dunia telah berlangsung dengan pergerakan tanpa ada batas (*bordrless word*). Dunia dengan segala dinamikanya telah tumbuh pesat untuk berusaha memberikan perubahan yang berarti bagi penciptaan dunia baru yang lebih harmonis dan berperadaban tinggi. Kondisi dan situasi yang mengusahakan agar terciptanya tata dunia yang lebih baik adalah bentuk usaha-usaha yang terus dilakukan oleh umat manusia agar bisa merasakan apa yang seharusnya mereka alami yaitu keharmonisan dalam kehidupan.⁶¹ Untuk itu keluarga juga harus berperan aktif dalam membimbing terutama kepada anak dalam era dunia modern saat ini.

Keluarga adalah fondasi sosial. Keluarga sejahtera di bawah ikatan pernikahan menjadi pilar utama bangunan sosial. Kebutuhan mendesain keluarga yang kuat, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahma* menjadi penting. Pendidikan diawali dari bagaimana memahami makna pernikahan sebagai bangunan awal manusia memasuki rumah tangga, membangun basis sosial dan komunitas. Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan

⁶⁰ Sayyid Ahmad Al-Hasyim. *Syarah Muktaarul Ahaadiits*. Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo Bandung, 2008, h. 143.

⁶¹ Rusli Yusuf. *Pendidikan dan Investasi Sosial*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv. 2011, h. 7.

menyanjungNya, bersabda: “*Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku*”.⁶²

B. Eksistensi MT Terhadap Tenaga Pendidik

Teori-teori mengajar, di antaranya: 1) Defenisi yang lama, mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan kepada anak didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi penerus; 2) Defenisi dari DeQueliy dan Gazali, mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Dalam hal ini pebgertian waktu singkat dan sangat penting. Guru kurang memperhatikan bahwa di antara siswa ada perbedaan individual sehingga memerlukan pelayanan yang berbeda-beda. Bila semua siswa semua siswa dianggap sama kemampuan dan dan kemajuannya maka bahan pelajaran yang diberikan akan sama pul, hal ini bertentangan dengan kenyataan; 3) Defenisi yang modern di negara-negara yang maju, “*teaching is the guidance of learning*”. “Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Defenisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah siswa yang mengalami proses belajar”. Sedangkan guru membimbing menunjukkan jalan dengan memperhitungkan kepribadian siswa. Kesempatan untuk berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa, daripada teori yang lain; 4) Kilpatrik menunjukkan defenisi mengajar yang tegas dengan dasar pemikiran gambar perjuangan hidup umat manusia. Defenisi Klipatrik tersebut ialah dengan menggunakan metode “*problem salving*” anak, siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kenyataan di dalam hidup ini setiap manusia menghadapi banyak manusia yang selalu timbul dan tidak ada habis-habsinya. Setiap persoalan perlu dipecahkan sehingga seluruh kehidupan manusia itu merupakan tuntutan pemecahan persoalan yang terus-menerus; 5) Alvin W. Howard, memberikan defenisi mengajar yang

⁶²Hasbiyallah, dan Moh. Sulhan. *Hadis Tarbawi*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015, h. 42.

lebih lengkap . Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong , membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, *attitude ideals* (cita-cita) *appreciations* (penghargaan) dan *knowlegde* (pengetahuan); 6) A. Morrisson D. Mc. Intyre, memberikan defenisi, mengajar adalah aktivitas personal yang unik. Dalam mengajar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan umum yang tidak berguna, keberhasilan dan keahluannya samar-samar, dan sukar diketahui juga berlangsungnya teknik belajar yang tidak tepat untuk dijelaskan. Kemungkinan lain yang dapat diamati ialah memberikan model teori dan teknik asesmen yang sesuai dan banyak aspek mengajar yang dilukiskan dengan cara dibimbing oleh hal-hal yang praktis, dan pribadi guru banyak berbicara; 7) John R. Pancella, pendapatnya tentang mengajar adalah mengajar dapat dilukisakn sebagai membuat keputusan (*decision mamaking*) dalam interaksi, dan hasil dari keputusan guru adalah jawaban siswa atau sekelompok siswa, kepada guru berinteraksi; dan (8) Bagi Mursell, megajar digambarkan sebagai mengorganisasikan belajar sehingga dengan mengorganisasikan itu, belajar menjadi berarti atau bermakna bagi siswa. Ksapan belajar yang berarti itu? Belajar adalah berarti dalam keseimbangan dengan keadaan siswa sehingga tugas pelajar adalah memahami hubungan pengetahuan itu sebagai kesatuan.⁶³

Prinsip mengajar ada sepuluh, di antaranya: 1) Perhatian, di dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan guru. Perhatian akan lebih besar bila pada siswa ada minat dan bakat. Bakat telah dibawa siswa sejak lahir, namun dapat berkembang karena pengaruh pendidikan dan lingkungannya; 2) Aktivitas, dalam proses mengajar belajar, guru perlu mmenimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak berlalu begitu saja tetapi dipikirkan , diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Atau siswa akan bertanya , mengajukan pendapat , menimbulkan diskusi dengan

⁶³ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 29–33.

guru. Dalam berbuat siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, intisari dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu pengetahuan itu dengan baik; 3) Appersepsi, Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa ataupun pengalamannya. Dengan demikian antara pengetahuan yang telah menjadi miliknya dengan pelajaran yang akan diterimanya. Hal itu lebih melancarkan jalannya guru mengajar, dan membantu siswa untuk memperhatikan pelajarannya lebih baik; 4) Peragaan, waktu guru mengajar di depan kelas harus berusaha menunjukkan benda-benda yang asli. Bila mengalami kesukaran boleh menunjukkan model, gambar, benda tiruan atau menggunakan media lainnya seperti radio, televisi dan lainnya. Dengan pemilihan media yang tepat dapat membantu guru menjelaskan pelajaran yang diberikan. Juga membantu siswa untuk membentuk pengertian di dalam jiwanya; 5) Referensi, bila guru menjelaskan sesuatu unit pelajaran itu perlu diulang-ulang. Ingatan siswa itu tidak setia maka perlu dibantu dengan mengulang pelajaran; 6) Korelasi, guru dalam mengajar wajib memperhatikan dan memikirkan hubungan antar setiap mata pelajaran.⁶⁴

Faktor intern yang mempengaruhi belajar adalah; 1) Faktor jasmani yang meliputi: (a) faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah; b) Cacat tubuh, adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh; 2) Faktor psikologi, yang terdiri dari: a) *intelegensi*, adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu

⁶⁴ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 35.

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat, *b) perhatian*, menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan; *c) minat*, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang, *d) bakat*, adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan itu baru akan teralisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang/tidak berbakat di bidang itu, *e) motif*, dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang belajar, *f) kematangan*, adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru, dan *g) kesiapan*, adalah kesediaan untuk mmemberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan; 3) Faktor kelelahan, terbagi dua yakni kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu.⁶⁵

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, adalah: 1) Faktor keluarga, siswa belajar akan menerima pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dengan pertanyaannya yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama; 2)

⁶⁵ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 9–13.

Faktor sekolah, yang mempengaruhi belajar ini mencakup: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajardan tugas rumah; dan 3) Faktor masyarakat, merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat.⁶⁶

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dikatakan. Terutama bila diinginkan hasil belajar lebih baik pada seluruh siswa . Oleh karena itu rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam arti membutuhkan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri. Terdapat aneka ragam rumusan pengertian tentang mengajar. Setiap rumusan mempunyai kaitan arti dalam praktek pelaksanaannya. Mengajar adalah segala upaya disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.⁶⁷

C. Eksistensi MT Terhadap Peserta Didik

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan daiti seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tangan seseorang anak menjadi bengkok karena patah tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak dapat digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar. Demikian pula perubahan tingkah-laku seseorang berada dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam

⁶⁶ *Ibid.*, h. 60.

⁶⁷ Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010, h. 10–11.

aspek-aspek kematangan, pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam arti belajar.⁶⁸

Jenis-jenis belajar antara lain: 1) Belajar bagian (*part learning, practioned learning*), umumnya belajar bagian dilakukan seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau bersifat ekstensif, misalnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motorik seperti bermain silat; 2) Belajar dengan wawasan (*learning by insight*), konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi, Gestalt pada permulaan tahun 1971. Sebagai suatu konsep, wawasan ini merupakan suatu konsep dalam pembicaraan psikologi belajar dan proses berpikir. Dan meskipun W. Kohler sendiri dalam menerangkan wawasan berorientasi pada data yang bersifat tingkah laku (perkembangan yang lembut dalam menyelesaikan suatu persoalan dan kemudian secara tiba-tiba terjadi reorganisasi tingkah-laku) namun tidak urung wawasan ini merupakan konsep yang secara prinsipil ditentang oleh penganut aliran neo-behaviorisme; 3) Belajar diskriminatif (*discriminatif learning*), belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak-laku. Dengan pengertian ini maka dalam eksperimen, subyek diminta merespon secara berbedabeda terhadap stimulus yang berlainan; 4) Belajar global keseluruhan (*global whole learning*), di sini bahan pelajaran di pelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar menguasainya: lawan dari belajar bagian. Metode belajar ini sering juga disebut dengan Metode Belajar Gestalt; 5) Belajar insidental (*incidental learning*), konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah-tujuan (*intensional*). Sebab dalam belajar insidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Atas dasar ini maka untuk kepentingan penelitian disusun perumusan operasional sebagai berikut: belajar disebut insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak; 6) Belajar

⁶⁸ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 2.

instrumental (*instrumental learning*), Pada belajar instrumental reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Oleh karena itu cepat atau lambatnya orang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguat (*reinforcement*) atas dasar tingkat kebutuhan; 7) Belajar intensional (*intentional learning*), belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental; 8) Belajar laten (*latent learning*), perubahan-perubahan tingkah-laku yang terlihat tidak terjadi secara segera, oleh karena itu disebut laten, menimbulkan pembicaraan yang hangat di kalangan penganut *behaviorisme* khusus peranan faktor penguat (*reinforcement*) dalam belajar; 9) Belajar mental (*mental learning*), perubahan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari; 10) Belajar produktif (*productive learning*), R. Berguis (1964) memberikan arti belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi yang lain. Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain; dan 11) Belajar verbal (*verbal learning*), belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan, Dasar dari belajar verbal diperlihatkan dalam eksperimen klasik dari Ebbinghaus. Sifat eksperimen ini meluas dari belajar asosiatif mengenai hubungan dua kata yang tidak bermakna sampai pada belajar wawasan mengenai penyelesaian persoalan yang kompleks yang harus diungkapkan secara verbal.⁶⁹

Teori-teori belajar, di antaranya: 1) Teori Gestalt, Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman yang sekarang menjadi tenar di seluruh dunia. Hukum yang berlaku pada pengamatan adalah sama dengan hukum dalam belajar. Jadi dalam belajar adalah yang penting adanya penyesuaian pertamanya

⁶⁹ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 5-8.

memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting mengulangi hal-hal yang baru dipelajari tetapi mengerti dan memperoleh *insight*. Sifat-sifat belajar dengan *insight* ialah: (a) *insight* tergantung dari kemampuan dasar, (b) *insight* tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan, (c) *insight* hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati, (d) *insight* adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit, (e) belajar dengan *insight* dapat diulangi, dan f) *insight* sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru;

2) Teori belajar menurut J. Bruner, untuk mengubah tingkah-laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Dalam belajar guru perlu memperhatikan 4 hal, yakni: (a) mengusahakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, minatnya perlu ditingkatkan kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu, (b) menganalisis struktur materi yang akan diajarkan dan juga perlu disajikan secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa, (c) menganalisis *sequence*, guru mengajar berarti membimbing siswa melalui urutan pernyataan dari suatu masalah sehingga siswa memperoleh pengertian dan dapat mentransfer apa yang sedang dipelajari, (d) memberi reinforcement dan umpan balik (*feed back*). Penguatan yang optimal terjadi pada waktu siswa mengetahui bahwa "ia menemukan jawabnya";

3) Teori Belajar dari Piaget. Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar pada anak-anak adalah: (a) anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk menghayati dunia sekitarnya, maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar, (b) perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak; (c) Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap lain tidaklah selalu sama pada anak; (4) Teori dari R. Gagne, terhadap masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi: (a)

Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, (b) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi; 6) Belajar dengan jalan mengamati dan meniru (*observational learning* dan *imitation*). Menurut Bandura dan Walter, tingkah laku baru dikuasai atau dipelajari mula-mula dengan mengamati dan meniru suatu model/contoh/teladan. Model yang diamati dan ditiru siswa dapat digolongkan menjadi: (a) kehidupan yang nyata, misalnya: orang tua di rumah, guru di sekolah, dan orang lain dalam masyarakat, (b) simbolik, termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk gambar, (c) representasional, termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan dengan menggunakan alat-alat audiovisual terutama televisi dan radio; dan 7) Belajar bermakna (*meaningful learning*), terdiri dari: (a) tipe-tipe belajar yang meliputi dimensi menerima (*reception learning*) dan menemukan (*discovery learning*). Di dalam *reception learning* semua bahan yang harus diberikan dalam bentuknya yang final (bentuk yang sudah jadi) dalam bahan yang disajikan (*expository material*). Contoh: bahan yang dikemukakan dalam paragraf di atas mengenai dua dimensi dan empat macam belajar dari Ausubert dan Robinson. Dan di dalam *discovery learning* tidak semua yang dipelajari dipresentasikan dalam bentuk yang final, beberapa bagian harus dicari, diidentifikasi oleh pelajar sendiri. Pelajar harus mencari informasi sendiri kemudian informasi itu diintegrasikan ke dalam struktur kognitif yang telah ada, disusun kembali, diubah, untuk menghasilkan struktur kognitif yang baru. Struktur kognitif adalah perangkat fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang terorganisasi yang telah dipelajari dan dikuasai seseorang.⁷⁰

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Dengan pengertian ini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan : 1) Apakah yang dimaksud dengan perilaku, 2) Perubahan perilaku

⁷⁰ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 9-13.

bagaimana termasuk belajar?, 3) Apakah perubahan perilaku dapat terjadi pada setiap individu yang berinteraksi dengan lingkungan? Perilaku itu mengandung pengertian yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya. Setiap perilaku ada yang nampak, bisa diamati. Ada pula tidak bisa diamati. Perilaku yang dapat diamati disebut penampilan atau *behavioral performance*. Sedangkan yang tidak bisa diamati disebut kecenderungan perilaku atau *behavioral tendency*.⁷¹

D. Eksistensi MT Terhadap Silabus Bimbingan

Menurut Mc Ashan, kompetensi itu adalah suatu pengetahuan keterampilan dan kemampuan atau ka[abilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.⁷² Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu. Membudayakan berpikir ilmiah pada dasarnya ditujukan agar masyarakat lebih berorientasi kepada penalaran ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi ini dicerninkan baik dalam sistem nilai yang menempatkan cara berpikir ilmiah sebagai suatu konsep penalaran yang dapat diandalkan maupun dalam tata hidup yang berlandaskan ilmiah tersebut.⁷³

Pendidikan profesional mengacu ke pendidikan berdasarkan kompetensi sebagai indikator keahlian dalam bidang tertentu. Dewasa ini profesionalisasi dengan kompetensi yang berdasarkan pandangan-pandangan behavioristik sudah mulai ditinggalkan (khususnya pada negara maju) yang selanjutnya beralih pada behavioral humanisme, yang mengembangkan proses pendidikan

⁷¹ Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010, h. 14.

⁷² Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 6.

⁷³ Khairun Rosyadi. *Pendidikan Profetik*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 79.

membentuk manusia yang adaptif dengan konsep bagaimana belajar.⁷⁴

⁷⁴Ramayulis. *Psikologi Agama*. Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013, h. 101–102.

BAB IV EKSISTENSI ILMU JIWA AGAMA (IJA)

A. Eksistensi IJA Terhadap Lembaga Pendidikan

Motivasi memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia, setidaknya ada empat peran motivasi itu, yaitu: *Pertama*, motivasi berfungsi sebagai pendorong manusia dalam berbuat sesuatu sehingga menjadi unsur penting dan tingkah laku atau tindakan manusia. *Kedua*, motivasi berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan. *Ketiga*, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia baik atau buruk. *Keempat*, motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal, benar atau salah sehingga bisa dilihat kebenaran atau kesalahannya. Dari semua fungsi atau peranan motivasi di atas fungsi pendoronglah yang paling dominan di antara fungsi-fungsi yang lain.

Penelitian ilmu jiwa agama terhadap objeknya menggunakan metode ilmiah yang empiris, dapat dalam bentuk: 1) *Behaviorisme Teoritik*, yang menganggap tingkah laku manusia sebagai proses mekanik yang ditentukan oleh prinsip yang mengatakan bahwa tingkah laku terpuji cenderung akan diulangi; 2) Teori Voluntaristik, yang menyatakan bahwa dalam pilihan manusia terdapat unsur yang tidak bersifat mekanik; dan 3) Teori Psikoanalisis, yang menganggap tingkah laku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kecenderungan untuk mempertinggi kesenangan, tidak hanya ditentukan oleh pilihan yang sadar tetapi juga oleh dorongan-dorongan dari ketidaksadaran (bawah sadar).⁷⁵

Naluri artinya semua pembawaan (fitrah) yang dibawa manusia sejak lahir yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu apabila mengetahui bahwa dirinya berada pada suatu situasi atau lapangan tertentu. Karena itu naluri adalah pembawaan yang menentukan arah proses rohaniah yang

⁷⁵Abul Muiz Kabri. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang, Universitas Islam DDI, 2013, h. 4.

digunakan untuk melakukan pekerjaan kepribadian seseorang. Sumber terpenting energi naluriah adalah kebutuhan jasmaniyah (misalnya makan), dan gerak hati sebagai proses rohaniyah, mengamati, mengingat dan berpikir kearah pemenuhan kebutuhan makan, sehingga ketegangan yang disebabkan lapar dapat diatasi.⁷⁶ Semua tindakan yang bersifat dengki dan iri hati itu tidak dapat dilakukan kecuali atas dua hal, yakni membelanjakan harta di jalan Allah, dan orang yang mengajarkan ilmunya.

Dari Abdillah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak iri (hasut) yang diperbolehkan kecuali pada dua orang, seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah lalu dikuasakan atas dibelanjakannya pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang diberi hikmah (ilmu yang bermanfaat) oleh SWT, ia amalkan dan ajarkannya kepada orang lain". (HR. Muttafaq Alaih).⁷⁷

B. Eksistensi IJA Terhadap Tenaga Pendidik

Moral adalah perbuatan atau sikap atau akhlak yakni nilai-nilai yang paling luhur dari manusia. Keluruhan yang abadi dan konsisten serta diikuti oleh manusia adalah yang bersumber pada ajaran agama karena telah terbukti dalam kehidupan bahwa moral yang didasarkan pada selain agama tidak akan bertahan dengan baik dan juga tidak dapat berjalan sesuai dengan ajaran moral itu sendiri. Hal ini disebabkan dorongan dari diri manusia untuk mematuhi tidak kuat jugapengawasan terhadap diri yang selalu bergantung pada pada ada tidaknya manusia yang memperhatikan. Kalau bersumber dari ajaran agama maka dipatuhi sepenuhnya karena timbul dari dalam diri manusia itu sendiri.⁷⁸

Jiwa mengarah kepada roh karena jiwa adalah kesempurnaan tubuh yang memberikankekuatan hidup. Jiwa manusia merupakan satu unit tersendiri dan mempunyai wujud yang terlepas daro badan. Jiwa tidak hancur dengan hancurnya badan. Dia akan bisa menjadi sempurna bila senantiasa diupayakan peningkatan dan

⁷⁶ *Ibid.*, h. 26.

⁷⁷ Abdul Majid Khon. *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 161.

⁷⁸ Solihah Titin Sumanti. *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015, h. 34.

peranannya sebagai pengontrol badan manusia sehingga hawa nafsu yang terdapat pada badan tidak menjadi halangan bagi jiwa manusia untuk mencapai tingkat lebih tinggi yaitu tingkat kesempurnaan.

Dalam melakukan aktivitas hidup terkadang terbentuk dengan aturan-aturan dan manusia bila tidak dioawasi cenderung melanggar aturan. Ketahjuilah bahwa hidup ini terasa lebih indah jika ada aturan yang mengatur kehidupan ini. Begitu juga dengan kehidupan ini perlu juga adanya pengawasan yang ampuh dalam menjalani perjalanan hidup supaya kehidupan itu penuh dengan ketenangan yaitu agama, hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan kehidupan yang senantiasa diawasi oleh Tuhan di mana saja kita berada dan dalam keadaan apapun sehingga hidup ini menjadi terarah dan teratur.⁷⁹

C. Eksistensi IJA Terhadap Peserta Didik

Pandangan Al-Ghazali tentang akal adalah kekuatan fitri, yang membedakan baik buruk, manfaat-mudharat dan sebagai ilmu tasawuf dan tasdhiq. Dalam *Ihya Ulumuddin*, akal sebagai kemampuan yang membedakan manusia dari binatang, yang bisa mengetahui dari kemustahilan, kemungkinan kemestian, selanjutnya tantang *qalb* (hati). Dalam pandangan Al-Ghazali mempunyai kedudukan penting dalam perolehan ilmu. Ilmu yang diperoleh *qalb* ini lebih mendekati ilmu hakikat melalui ilham. Kemampuan menangkap hakikat dengan jalan ilham digantikan dengan institusi.⁸⁰

Menurut Fudhayartanta (2011), mengemukakan bahwa psikologi selain berguna sebagai ilmu pengetahuan berguna juga bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan, misalnya guru mengajar sesuatu jenis mata pelajaran harus mengingat kemampuan, dalam arti perkembangan jiwa anak. Guru tidak mungkin atau tidak pada tempatnya mengajarkan Al-Jabar pada anak-anak pada umur 8 tahun. Jadi pelajaran Al-Jabar harus sesuai

⁷⁹*Ibid.*, h. 35.

⁸⁰Nurussakinah Daulay. *Pengantar Psikologi: dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013, h. 39.

dengan perkembangan jiwa anak, dapat dimulai pada anak-anak SMP (13-14 tahun).⁸¹

Masyarakat muslim lebih tepat menggunakan teori psikologi berbasis keislaman karena teori itu dapat merangkul seluruh perilakunya dan menunjukkan *self image* maupun *self esteem* sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Sedang asal sisi praktisnya, pengembangan psikologi islam merupakan fase baru bagi praktisi psikologi, konseling dan psikoterapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan suasana batin yang sejahtera dan bahagia hakiki.⁸²

D. Eksistensi IJA Terhadap Kurikulum

Setiap orang tua dan semua guru ingin membina anak agar menjadi orang yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji. Semuanya itu dapat diusahakan melalui pendidikan. Baik yang formal (di sekolah) maupun informal (di rumah oleh orang tua). Setiap pengalaman yang dilalui anak, baik yang melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan yang diterimanya akan ikut menentukan pembinaan pribadinya.

Masa pendidikan di sekolah dasar merupakan kesempatan pertama yang sangat baik untuk membina pribadi anak setelah orang tua. Seandainya guru-guru (baik guru umum maupun guru agama) di sekolah dasar memiliki persyaratan kepribadian dan kemampuan untuk membina pribadi anak, maka anak yang tadinya sudah mulai bertumbuh ke arah yang kurang baik, dapat segera diperbaiki. Dan anak yang dari semula telah mempunyai dasar yang baik dari rumah dapat dilanjutkan pembinaannya dengan cara yang lebih sempurna lagi.⁸³ Seyogyanya agama masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya, yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu, sejak dalam kandungan. Karena dalam pengamatan ahli jiwa terhadap orang-orang yang mengalami kesukaran kejiwaan, tampak bahwa keadaan dan sikap orang tua

⁸¹ *Ibid.*, h. 74 .

⁸² *Ibid.*, h. 106.

⁸³ Zakiah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XVII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005, h. 68.

ketika si anak dalam kandungan telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa si anak di kemudian hari.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*, h. 69-70.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Kebijakan Pendidikan Keagamaan

Implementasi kebijakan Pemerintah berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan keagamaan nonformal,⁸⁵ di antaranya sebagai berikut:

Pasal 1 butir:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

⁸⁵Republik Indonesia, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 2-32.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai kepada usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan atau Pemerintah Kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 2:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4 ayat:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pelayanan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 30 ayat:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 ayat (1):

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pendidikan formal (*formal education*), yakni proses belajar terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang termasuk studi akademik secara umum, beragam program lembaga pendidikan dengan waktu penuh atau *full time*, pelatihan teknis dan profesional. Pendidikan nonformal, yakni proses belajar terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting suatu kegiatan yang lebih besar dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Dan pendidikan informal, yakni proses belajar sepanjang hayat yang terjadi pada setiap individu dalam memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan sumber-sumber lainnya di sekitar lingkungannya. Hampir semua bagian pendidikannya relatif tidak

terorganisasikan dan tidak tidak sistematis. Meskipun demikian, tidak berarti hal ini menjadi tidak penting dalam proses pembentukan kepribadian.⁸⁶

Gejala faktual menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pendidikan nonformal terutama untuk memenuhi kebutuhan tuntutan kebutuhan kerja yang mensyaratkan berbagai spesifikasi pekerjaan. Kondisi ini muncul karena jalur pendidikan formal tidak sanggup memberikan bekal keterampilan atau kecakapan kerja kepada para alumninya sesuai spesifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan dunia kerja sehingga memerlukan kontribusi jalur pendidikan nonformal untuk memberikan tambahan keterampilan/kecakapan.⁸⁷

4. Al-Baqarah (2): 41:

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَآتَتُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa”.⁸⁸

Adapun implementasi kebijakan pendidikan, yakni:

1. Implementasi (*Implementation*)

Implementasi (*implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari

⁸⁶ M. Saleh Marzuki. *Pendidikan Nonformal: Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Cet. I; Bandung: Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h. 137.

⁸⁷ Moh. Alifuddin. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, h. 3.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. .

birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.⁸⁹

Pendekatan implementasi: 1) pendekatan struktural (*structural approach*), yaitu pendekatan dengan memperimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk merencanakan yang bersifat birokratik; 2) pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*); 3) pendekatan keperilakuan (*behavioural approach*), yaitu pendekatan implementasi berkaitan dengan perilaku manusia beserta sikapnya dan yang mempengaruhinya; dan 4) pendekatan politik (*political approach*), yaitu suatu pendekatan implementasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan. Pola kekuasaan dan pengaruh yang menjadi aspek dominan di dalam lingkungan suatu organisasi.⁹⁰

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai

⁸⁹H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 248.

⁹⁰Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 2002), h. 118.

dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.

- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.⁹¹

2. Kebijakan (*Policy*)

Menurut Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya, adalah deklarasi suatu dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program aktivitas tertentu atau suasana rencana. Makna kebijakan seperti ini sejalan dengan pandangan seorang ahli, James E. Anderson, merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dan atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu.⁹²

⁹¹Moh. Alifuddin, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi* (Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012), h. 9-12.

⁹²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 2.

Penjelasan yang dikemukakan di atas membawa implikasi terhadap konsep kebijakan negara, yaitu:

- a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkaitan dan berpola dengan yang mengarah pada tujuan yang dilakukan pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutpaut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah, misalnya dalam menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), ketentuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, Pemerintah bersama dengan DPR membuat peraturan, melarang merokok di ruangan belajar namun tidak ada sanksi bagi pelanggar.⁹³

3. Kebijakan Pendidikan (*Education Policy*)

Pada dasarnya, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang mempunyai tingkat konflik dan ambiguitas rendah. Namun demikian, apabila terjadi kelangkaan sumber daya untuk pembiayaan dan pengelolaan pendidikan, terlebih dengan rendahnya dukungan politik lokal (legislatif), kebijakan publik berkembang ke arah pola dengan konflik yang tinggi dan ambiguitas yang tinggi. Matland, menyatakan bahwa seharusnya kebijakan pendidikan diimplementasikan secara administratif, yaitu menurun dari atas ke bawah, dimodifikasi menjadi implementasi politik, yaitu dipaksakan.⁹⁴

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Mark Olsen, yang merumuskan kebijakan pendidikan

⁹³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 7.

⁹⁴H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 408.

merupakan kunci bagi keunggulan, eksistensi bagi bangsa dalam persaingan global sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumennya, adalah globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil, yakni demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Dan Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan.⁹⁵

Presmann, menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi awal dan yang diprediksikan akan terjadi sesudahnya. Dasar pemikiran yang digunakan oleh pembuat kebijakan, adalah jika X dilakukan pada waktu tertentu (W1) maka Y akan terjadi pada waktu tertentu (W2). Logikanya, setiap kebijakan pada dasarnya memuat teori mengenai hubungan sebab akibat (kausalitas). Apabila kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan dan bukan karena implementasinya yang keliru.⁹⁶

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum mendapat perhatian serius di negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia) karena para perumus kebijakan pada umumnya mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Mereka beranggapan bahwa apabila suatu kebijakan telah ditetapkan dan diumumkan menjadi kebijakan publik dapat diimplementasikan oleh para pegawai pelaksana secara teknis tanpa ada unsur atau kendala politik apapun dan hasil yang diharapkan segera tercapai. Padahal, pada kenyatannya tidaklah demikian, justru pada saat inilah proses kebijakan dimulai. Akan tetapi suatu implementasi kebijakan di negara berkembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar proses teknis dalam melaksanakan

⁹⁵ *Ibid.*, h. 268.

⁹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 74.

perencanaan yang telah ditetapkan. Melainkan suatu proses interaksi politik, sosial, ekonomi, perilaku dan organisasi, yang kesemuanya akan mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang telah ditetapkan.⁹⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pendidikan keagamaan, adalah:

1. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan sebagaimana yang telah diamanatkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 yang terkait dengan Pendidikan Keagamaan, menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama (ayat 2). Pendidikan keagamaan yang dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (ayat 3). Dan, Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja*, *samanera*, dan bentuk lainnya yang sejenis (ayat 4).

Konsep pendidikan keagamaan sebagaimana yang telah diamanatkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan pendidikan keagamaan dalam kehidupan beragama sesuai agama dan keyakinan yang dianut masing-masing pemeluk agama. Aktuaslisasi ini untuk memberdayakan fungsi agama dan keagamaan dalam masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan keagamaan bagi masyarakat Islam sebagai pedoman hidup orang-orang yang beragama Islam, QS. Al-Baqarah /2 : 151:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

⁹⁷H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, h. 44.

Terjemahnya:

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kamu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.⁹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebagaimana disebutkan Firman Allah dalam QS. al-Dzariyat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁹⁹

Pemahaman terhadap ayat al-Qur'an hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Keterkaitan itu dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan akhir dari pendidikan adalah mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensinya sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah swt.
- 2) Dalam kegiatan pengajaran, seorang guru harus mengajarkan ilmu pengetahuan karena dalam ilmu pengetahuan itulah dijumpai berbagai informasi, teori, rumus, konsep, dan

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

⁹⁹*Ibid.* h. 756.

sebagainya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dari proses pengajaran terciptalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan.

- 3) Melalui pendidikan diharapkan lahir manusia kreatif, sanggup mengadakan penelitian, penemuan dan seterusnya.
- 4) Pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan untuk membawa manusia mampu menangkap hikmah di balik ilmu pengetahuan, yaitu rahasia keagungan Allah, swt. Ilmu pengetahuan akan memperkuat akidah, meningkatkan ibadah dan akhlak yang mulia.
- 5) Pengajaran berbagai ilmu pengetahuan dalam proses yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an akan menjauhkan manusia dari sikap takabur, sekuler, ateistik, sebagaimana pada umumnya dijumpai pada pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Barat dan Eropa.¹⁰⁰

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3 : 102

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۙ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah kamu mati keadaan kecuali dalam keadaan muslim.*¹⁰¹

B. Proses Kebijakan Pendidikan

1) Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan atau merupakan proses inisiasi

¹⁰⁰Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 169-170.

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

dengan pendekatan ilmu kebijakan dengan menggunakan satu kombinasi pendekatan metodologis dalam waktu yang singkat dengan produk berupa rekomendasi kebijakan. Penelitian kebijakan dapat dilakukan pada semua sisi proses kebijakan, namun tidak untuk tujuan utama rekomendasi kebijakan, karena tujuan utamanya adalah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, sesuai dengan ketercapaian pemahaman yang mendalam tersebut.¹⁰²

2) Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan, adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Beberapa

teori perumusan kebijakan,¹⁰³ sebagai berikut:

a. Teori Kelembagaan (*Institutional*)

Konseptor teori kelembagaan (*institutional*), Dye, yang menyatakan formulasi kebijakan dari teori kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas Pemerintah. Apapun yang dibuat Pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu: 1) Pemerintah memang sah membuat kebijakan publik; 2) fungsi tersebut bersifat universal; dan

b. Teori Rasionalisme (*Rationalisme*)

Konseptor teori rasionalisme (*rationalism*), adalah Herbert Simon. Teori rasionalisme mengedepankan gagasan bahwa Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas tersebut adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan: 1) mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya; 2) menemukan suatu pilihan; 3) menilai konsekuensi masing-masing pilihan; 4) menilai rasio nilai

¹⁰²*Ibid.*, h. 251.

¹⁰³*Ibid.*, h. 190-209.

sosial yang dikorbankan; dan 5) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

c. Teori Sistem (*System*)

Teori Sistem (*System*) oleh David Easton, yang menyatakan bahwa dalam pendekatan sistem dikenal tiga komponen: *input*, proses, dan *output*. Formulasi kebijakan publik mengandalkan bahwa kebijakan merupakan hasil dari sistem. Proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem dengan mengandalkan kepada masukan (*input*) yang terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan.

3) Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik apabila seluruhnya dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Pendidikan melibatkan interaksi berbagai input yang ada dan interaksi dengan lingkungan karena memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.¹⁰⁴ Konsep pelaksanaan suatu otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai dan menghindari kerumitan atas sesuatu yang menghambat pelaksanaan suatu otonomi daerah. Tuntutan masyarakat dapat mewujudkan penetapan otonomi daerah secara luas dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.¹⁰⁵

Prinsip otonomi daerah, yakni:

- a. Nyata, berarti urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Dinamis, berarti sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- c. Serasi, berarti urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijakan nasional.

¹⁰⁴Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Cet. I; Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2006), h. 21.

¹⁰⁵H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2.

d. Bertanggungjawab, berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam konteks ini adalah: kebijakan pendidikan nasional yang sentralistik dan serba seragam yang pada gilirannya mengabaikan keberagaman sesuai dengan realitas, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan nasional hamper tidak memberikan ruang gerak yang memadai bagi masyarakat di daerah tertentu untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dan relevan dengan daerah dan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁷

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan, adalah adanya peluang yang lebih besar dan kemungkinan daerah memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan pendapatan daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat, semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan, dan membuka peluang terciptanya raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol Pemerintah Provinsi dan Pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Kepala Dinas Pendidikan pemerintahan kabupaten/kota yang secara individual memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan.¹⁰⁸

Secara rasionalitas, dalam kebijakan yang tidak didasarkan pada ketentuan empiris yang dapat menghambat mobilitas faktor pembangunan. Rasionalitas menggambarkan setiap kebijakan pembangunan berikut pelaksanaannya didasarkan pada rumusan,

¹⁰⁶Iskandar, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 125.

¹⁰⁷Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002), h. 5.

¹⁰⁸Sam M. Chan, dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 2.

pikiran yang rasional dan empiris. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional tidak didasarkan pikiran, kehendak, dan pernyataan yang dipengaruhi oleh tradisi yang absolut.¹⁰⁹

Tujuan pendidikan suatu masyarakat dibangun di atas falsafah masyarakat yang bersangkutan dan merupakan refleksi dari nilai-nilai ideal yang diasumsikan dapat melahirkan nilai etis dan pragmatis yang bermanfaat bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa suatu masyarakat selalu bersifat dinamis, mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sehingga pembaharuan tujuan pendidikan merupakan hal yang tak terelakkan. Pembaharuan tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mereformulasi berbagai rencana dan kegiatan sehingga proses pendidikan tidak kehilangan relevansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global.¹¹⁰

Salah satu sistem yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuannya adalah institusi atau kelembagaan pendidikan Islam. Objek telaah lembaga pendidikan Islam dibedakan dalam tiga komponen pokok. Ketiga kajian tersebut adalah lembaga, kurikulum, dan manajemen pendidikan Islam. Telaah pendidikan Islam mengarah pada objek yang konkrit lembaga pendidikan Islam yang bereksistensi dalam wujud fisik, telaah kurikulum pendidikan Islam mengarah pada mekanisme kerja operasional yang menjadi acuan proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan Islam, yakni dengan acuan belajar secara optimal, maka dapat menghasilkan kurikulum yang optimal dalam rangka memfasilitasi proses belajar mengajar.¹¹¹

¹⁰⁹Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakap Paramadina, 1994), h. 23.

¹¹⁰Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan* (Cet. I; Jakarta: PT. Paradotama Wiragemilang, 2003), h. 32.

¹¹¹Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi*

2. Konsepsi Pendidikan

Konsepsi pendidikan tidak membatasi waktu dan tempat terjadinya praktek pendidikan dan proses pembelajaran serta populasi sasarannya telah memasuki jaringan sistem pendidikan yang dikenal dengan istilah pendidikan seumur hidup (*life long education*). Sesuai konsepsi tersebut persoalan yang dihadapi, adalah: 1) cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan program pendidikan formal dengan pendidikan nonformal; 2) integrasi menjamin adanya efektivitas dan efisiensi.¹¹²

Dalam perkembangan ilmu ada ciri perubahan yang memiliki komponen sosial, yaitu penerimaan (*acceptance*) suatu paradigma baru oleh masyarakat ilmiah tertentu. Perkembangan ilmu selama berabad-abad yang juga ditandai oleh cara analisis dan partisipasi pengamatan terhadap terjadinya perubahan itu. Pengkajian ide, teori, sistem atau paradigma baru sebagai titik-tolak terhadap cara penyajiannya dan diseminasinya menggambarkan fase-fase yang kemudian diterima oleh masyarakat ilmiah. Dalam mewujudkan konsep keilmuan, kebenaran ilmiah itu tidak semata-mata didasarkan atas konsep berdasarkan rasional.¹¹³

Secara filosofis keberadaan pendidikan nonformal tidak terlepas dari sifat kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Realitas ini menempatkan manusia tidak sekedar sebagai makhluk hidup tetapi juga makhluk yang mempunyai suatu jati diri. Keberadaan dan kapasitasnya sebagai manusia sebagai makhluk berjati diri itulah yang membangun kebudayaan yang ditata, dipelihara, dan dikembangkan pada kelompok masyarakat. Kaidahnya mencakup: Pertama, kehidupan manusia berwujud adanya interaksi manusia dengan individu lain dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kedua, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME menjalankan amanah untuk menghargai

Ilmu dan Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 153.

¹¹²Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal: Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Anragogi* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 143.

¹¹³Conny R. Semiawan, dkk., *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu* (Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 74.

interaksi antara diri dan lingkungannya. Dan, keetiga, peserta didik adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mempunyai hak.¹¹⁴

Secara teoretis, sekurang-kurangnya ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya kontak sosial tidak semata tergantung dari tindakan tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Dan aspek terpenting dari suatu komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada orang lain yang semuanya ditentukan oleh perbedaan konteks sosial.¹¹⁵ Dalam konteks ini, Ahmad bin Muhammad, menyatakan bahwa anak hendaknya belajar mendengar yang baik sebagaimana mereka belajar berbicara yang baik.¹¹⁶ Dan Jurgen Habermas, menyatakan bahwa sejumlah alasan yang praktis dapat direalisasikan secara tegas hanya dalam bentuk komunikasi di muka umum.¹¹⁷

Dalam pendidikan nonformal dikenal peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Dalam dirinya terdapat potensi bakat dan disposisi luar biasa yang memungkinkan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Sosok peserta didik pada umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang kearah kedewasaan. Peserta didik merupakan subyek otonom, memiliki motivasi, hasrat, ekspresi, dan cita-cita.¹¹⁸ Peserta didik adalah manusia yang sepenuhnya memiliki harkat dan martabat manusia berhak hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan mengembangkan harkat dan martabat peserta didik sehingga dapat menjadi

¹¹⁴Eko B. Harsono, *Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2009), h. 17.

¹¹⁵J.Dwi Nurwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Terapan dan Pengantar* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16.

¹¹⁶Ahmad bin Muhammad, *Ta'dibun Nasyiin Biadabi Dunya wa Din* (Kairo: Darul Qur'an, 1985), h. 72.

¹¹⁷Jurgen Habermas, *Jutifications and Application: Remarks on Discourse Ethic* (Cambridge: Policy Press, 1995), h. 17.

¹¹⁸Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. 145.

manusia seutuhnya serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial lainnya.¹¹⁹

Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas yang tidak melibatkan anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan kepada individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi juga lembaga pendidikan di masyarakat, seperti Majelis Taklim, paguyuban, dan sebagainya.¹²⁰

Pendidikan bermutu adalah ketika peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai subyek pendidikan dan guru harus menyesuaikan diri dengan potensi peserta didik.¹²¹ Dan, orang dapat memiliki sesuatu kemampuan dengan baik bila sebelumnya telah memiliki kemampuan lebih rendah daripadanya dalam bidang yang sama. Kemampuan yang telah dimiliki sebelum mempelajari sesuatu yang baru disebut dengan *entry behavior* yang pada dasarnya merupakan keadaan pengetahuan atau keterampilan harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru.¹²²

Carl Rogers, mengemukakan pendekatan perkembangan pribadi individu bahwa seseorang pada hakikatnya mencoba mengekspresikan kemampuan, potensi dan bakatnya untuk

¹¹⁹Prayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), h. 43.

¹²⁰Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 103.

¹²¹Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika* (Cet. I; Depok: Penerbit Grha Guru, 2009), h. 14.

¹²²Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Cet. XIV; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 74.

mencapai tingkat perkembangan pribadi yang sempurna. Carl Rogers, menyatakan dalam teorinya bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Apabila aktualisasi diri itu dapat diwujudkan, merupakan pertanda bahwa individu tersebut telah mencapai tingkat pertumbuhan pribadi yang semakin luas lingkungannya dan manusia menjadi bersikap sosial.¹²³ Dan nonformal menurut Coombs, adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajarnya. Dalam konteks keterkaitan sebagai substitusi pendidikan, suplemen dan komplemen, pendidikan nonformal sebagai arah menuju dunia kerja, dan wahana untuk mengembangkan potensi diri.¹²⁴

Sehubungan dengan itu, Tri Pusat Pendidikan mengisyaratkan bahwa program pendidikan formal berpusat pada lingkungan sekolah dengan satuan sejak Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi. Program pendidikan nonformal berpusat pada lingkungan masyarakat dan lembaga dengan berbagai jenis pendidikan, antara lain pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan informal berpusat pada keluarga dan lingkungan kegiatan belajar secara mandiri.¹²⁵

3. Kurikulum

Berdasarkan pandangan yang komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk seluruh peserta didik, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan *subject matter*, teknik mengajar, dan dapat direncanakan sebelumnya (Saylor, Alexander, dan Lewis). Pada hakikatnya, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana memiliki rentang cukup luas hingga membentuk suatu pandangan

¹²³Sunarto dan B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 63.

¹²⁴Ishak Abdullah, *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal* (Cet. I; PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 19.

¹²⁵Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*, h. 29.

menyeluruh. Di suatu pihak, kurikulum dipandang suatu dokumen tertulis, di lain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana tidak tertulis yang terdapat dalam pikiran pihak pendidik (Taylor).¹²⁶

Sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses perencanaannya, kurikulum memiliki ketentuan: 1) perencanaan kurikulum biasanya menggunakan *judgment* ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa; 2) dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, dan urutan bahan pelajaran; dan 3) perencanaan dan implementasi perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.¹²⁷ Perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.¹²⁸

Masalah pembelajaran, penyelenggara pendidikan keagamaan seyogyanya memperhatikan etika interaksi bagi peserta didik terutama pada tempat untuk proses pembelajaran. Usman Muhammad, menilai bahwa pola pembelajaran ada yang menyatukan pria dan wanita dalam satu ruangan, dan ada yang memisahkannya. Dan pola yang terbaik, adalah dengan memisahkan laki-laki dan wanita. Dewasa ini pembauran pria dan wanita banyak ditemukan dan bersifat umum pada tingkat sekolah dasar di seluruh dunia.¹²⁹ Al-Anut binti Muhammad, bahwa sepantasnya kedua orang tua menghawatirkan putra-putrinya usia remaja karena terjadi hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

¹²⁶Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 5.

¹²⁷Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3.

¹²⁸Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3.

¹²⁹Usman Muhammad, *Ihktilaatul Jinsaini fi Madaarisinaa* (Kairo: Darul Ulum, 1986), h. 14.

seperti merokok, obat bius, internet, dan kelompok penyembah setan.¹³⁰ Dan, Abu Hasan Ali al-Hasaniy, berpandangan bahwa sesungguhnya masalah pendidikan bukan hal mudah, akan tetapi penuh dengan liku, dan tegak dengan sendirinya karena umat Islam memiliki tatanan, etika, sendi, akhlak mulia untuk semua jenis pendidikan.¹³¹

4. Relevansi Pendidikan Keagamaan

a. Teori dan Tujuan Pendidikan

Secara umum teori pendidikan menekankan pada sistem dalam pencapaian tujuan berupa serangkaian kegiatan terpadu dan terencana. Serangkaian kegiatan pendidikan berawal dari kondisi aktual setiap individu peserta didik yang tertuju pada suatu pencapaian yang menjadi tujuan pendidikan. Menurut teori umum, pendidikan bersifat normatif dan merupakan rentetan kegiatan berkelanjutan. Secara normatif, di dalam pendidikan mengandung tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pendidikan berorientasi pada pencapaian manusia ideal, seperti kedewasaan, kematangan, dan bermoral, yaitu manusia seutuhnya dalam pencapaian suatu bentuk masyarakat yang ideal.¹³² Brian Fay, mengungkapkan bahwa terjadi kevakuman pengetahuan atas komitmen pendidikan yang tidak ideal.¹³³

Untuk memahami teori pendidikan diperlukan keterampilan berpikir kreatif. Sebagaimana yang dikemukakan Suprpto, bahwa keterampilan kreatif, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru dan konstruktif berdasarkan konsep yang rasional, persepsi, dan intuisi individu. Dan Rubinstein, dan Firstenberg, berpendapat bahwa dengan berpikir

¹³⁰ Al-Anut binti Muhammad, *Kaifa Naksibul Marahiq wa Linuddahu Lilzawaj* (Cet.I; Riyadh: Daar al-Hadhorah, 2009), h. 61.

¹³¹ Abu Hasan Ali al-Hasaniy, *Nahwu Attarbiyah al Islamiyah fil Hukuumati wal Bilaalul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Daar al-Rasyid, 1989), h. 7.

¹³² Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group), h. 100.

¹³³ Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: a Multicultural Approach* (Cet. II; Melbourne: Blackwell Publishing, 2002), h. 82.

rasional dan imajinatif dapat mengembangkan kapasitas untuk mengenal pola baru dan prinsip baru, menyatukan fenomena yang berbeda dan menyederhanakan situasi yang kompleks. Inilah hakikat berpikir kreatif dan produktif yang memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah.¹³⁴

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaran pendidikan harus dapat membentuk manusia dengan kepribadian yang lebih baik yang sesuai tujuan pendidikan secara menyeluruh pada pendidikan formal, nonformal, dan informal. Tujuan pendidikan nasional harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam bentuk undang-undang.¹³⁵

John Dewey, menyebutkan ada tiga kriteria tentang tujuan yang baik, yakni: tujuan yang telah ada mestilah menciptakan perkembangan lebih, tujuan harus fleksibel, dan menyesuaikan dengan keadaan, sesuatu tujuan akhir dibuat di luar proses untuk bertindak selalu kaku apabila dipaksakan dari luar.¹³⁶ Tujuan pendidikan memiliki relevansi dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah, Swt. Sayyed Hossein Nasr, mengemukakan bahwa fungsi manusia untuk mengenal Allah adalah melalui pengetahuan yang berasal Allah sendiri.¹³⁷

b. Hasil Belajar Peserta Didik

¹³⁴Darmiyanti Zuchdi, *Humanisme Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 127.

¹³⁵Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 124.

¹³⁶Prasetya, *Filsafat Pendidikan: untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 181.

¹³⁷Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred* (New York: University of New York, 1999), h. 30.

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan menggunakan klasifikasi hasil belajar. Dari Benyamin Bloom, yang secara garis besar membagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.¹³⁸

Perkembangan aspek kognitif menurut Piaget, periode yang pada usia 12-18 tahun, adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan dapat memahami sesuatu secara bermakna tanpa memerlukan obyek yang konkrit atau bahkan obyek visual. Pada tahap perkembangan ini juga berkembang ketujuh kecerdasan dalam *multi in-telegences* yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan musikal, kemampuan membentuk imaji mental tentang realitas, kemampuan yang menghasilkan gerakan motorik yang halus, kecerdasan intrapribadi, yakni kemampuan mengenal diri dan mengembangkan rasa jati diri, dan kecerdasan antar pribadi, yakni kemampuan memahami orang lain.¹³⁹

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey yang telah membagi perkembangan moral peserta didik menjadi tiga tahap: tahap *preconventional*, yakni tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisik atau sosial. Tahap *conventional*, yakni tahap di mana seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan atas kriteria kelompoknya. Dan tahap *autonomous*, yakni tahap di mana seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal

¹³⁸Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 22.

¹³⁹Sitti Martinah, *Perkembangan Peserta Didik* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 5.

pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya.¹⁴⁰ Tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan pada intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan suatu masalah untuk menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau prosedur yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang berawal dari tingkat pengetahuan yang rendah sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi.¹⁴¹

Tujuan kognitif sangat erat kaitannya dengan pembinaan kepada anak dalam rangka melatih berpikir berdasarkan nalar yang dimiliki. Ahmad Fuad Ahwany menulis pandangan Ibnu Kaldun, bahwa dunia Islam bagian Timur dan Barat di seluruh wilayah Islam yang memuliakan pembinaan terhadap anak mereka dari al-Qur'an.¹⁴² Dan Muhammad bin Jamil Zainu, menyatakan bahwa kewajiban seorang pembina, adalah: (1) mengajari ucapan laailaaha illallah dan mengajarkan maknanya di saat anak dewasa; (2) menanamkan cinta kepada Allah dan nilai-nilai iman karena Allahlah pemberi rezeki dan Dia menciptakan manusia; dan (3) mengajarkan bahwa Allahlah satu-satunya tempat manusia mengharapkan pertolongan.¹⁴³

Dalam melakukan pembinaan yang memerlukan suatu metode pembinaan yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran agar pengembangan kognitif terhadap peserta didik lembaga pendidikan keagamaan dapat terwujud dengan baik. Yusuf Abdul Mu'thiy, menyebutkan bahwa kasih sayang merupakan satu di antara metode Allah dalam menyayangi makhluknya dan membinanya. Oleh karena itu, tiga hal yang penting dalam metode

¹⁴⁰Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Cet. V; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h.16.

¹⁴¹Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi* (VI; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2009), h. 27.

¹⁴²Ahmad Fuad Ahwany, *Attarbiyatu fi Islam* (Kairo: Darul Ma'arif, 1988), h. 69.

¹⁴³Muhammad bin Jamil Zainu, *Kaifa Nuurabbiy Auladana* (Mekkah: Darul Hadis Makkah al-Mukarramah, t.t.), h. 14.

kasih sayang: (1) bertahap dalam pembinaan; (2) tidak menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan; dan (3) lembut kepada mereka yang dibina agar terjadi keharmonisan dalam proses pembinaannya.¹⁴⁴

5. Pendidikan Keagamaan dalam Prespektif Islam

Pendidikan keagamaan dalam perspektif Islam, substansi maupun korelasinya sebagai berikut:

a. Paradigma Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan menjelaskan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini agar dapat dipahami, manfaat, dan terpelihara. Bagi ilmuwan Muslim, semunya dalam rangka upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah swt. serta mengungkapkan asma-Nya semata. Untuk menjelaskan sesuatu agar dapat dipahami diperlukan suatu paradigma, yakni cara memandang sesuatu atau dalam sains, seluruh model, atau teori ideal yang dari sudut pandang merupakan sebuah fenomena.¹⁴⁵

Pendidikan keagamaan termasuk subsistem pendidikan nasional yang telah diatur berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki fungsi ilmu pengetahuan, oleh karena umat Islam diwajibkan menuntut ilmu termasuk pendidikan keagamaan. Hadis Riwayat Ibnu Abdul Barr:

أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّنِّ. فَأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Artinya:

*Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim.*¹⁴⁶

Seseorang dapat menjaga konsistensi alur berpikirnya dalam menganalisis, berargumentasi, serta dalam membuat sintesis, evaluasi, kesimpulan dan keputusan. Dalam konteks pengembangan ilmu, paradigma merupakan khas mekanisme berpikirnya seorang ahli. Validitas suatu paradigma akan menjadi

¹⁴⁴Yusuf Abdul Mu'thiy, *Tarbiyatul Muslim* (Cet. I; Kuwait: Sunduq Waqfiy lil Tsaqafati wal-Fikr, 1998), h. 59.

¹⁴⁵Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2.

¹⁴⁶Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Hadis: Hadis-hadis Pilihan Berikut Penjelasanannya* (Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 143.

lebih tinggi jika banyak ahli yang mengadopsinya. Paradigma lebih mendeskripsikan mekanisme atau dinamika, serta lebih menonjolkan interaksi antarkomponen. Misalnya, hubungan interaktif lima faktor pendidikan: tujuan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan adalah contoh paradigma.¹⁴⁷

Ilmu pengetahuan dan teknologi masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan dengan berbagai variasinya. Bagi masyarakat modern yang tinggal di perkotaan kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin besar. Mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi hingga peralatan komunikasi sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula masyarakat tinggal di pedesaan pun sudah mulai bergantung terhadapnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia, namun tidak mengetahui tujuan yang harus dicapai. Agamalah yang memberi tahu tentang tujuan yang harus dicapai oleh ilmu pengetahuan.¹⁴⁸

Kehidupan yang paling ideal adalah jika kekuatan iman dan takwa dalam pribadi manusia dan masyarakatnya mampu menjadi pengendali, penyeleksi, dan penyaring semua unsur kemajuan kultural dari luar yang memang secara intrinsik bersifat merusak mental dan moral masyarakat di satu sisi, sedang di sisi lain mampu mengarahkan proses akulturasi dan alih teknologi sesuai dengan kemanfaatannya bagi kemajuan hidup masyarakat.¹⁴⁹

b. Membangun Sumber Daya Manusia Muslim

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Apabila hukum Tuhan diterapkan maka akan mendatangkan rahmat (kebaikan) kepada manusia. Hukum Tuhan (*sunnatullah*) berlaku untuk semua manusia termasuk nonmuslim. Apabila manusia bertindak sesuai dan selaras dengan *sunnatullah*, akan mendapatkan rahmatNya. Mereka yang beragama Islam tetapi mengingkari *sunnatullah*, akan jauh dari rahmatNya. Apapun yang mendatangkan kebaikan adalah

¹⁴⁷Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Hadis: Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya*, h. 3.

¹⁴⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 414.

¹⁴⁹Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 59.

perbuatan yang selaras dengan *sunnatullah*, dan yang mendatangkan kerusakan adalah perbuatan yang melanggar *sunnatullah*.¹⁵⁰ Hal tersebut sangat identik dengan upaya membangun sumber daya manusia dalam aktivitas pendidikan nonformal.

Perspektif Islam membangun sumber daya manusia, termaktub dalam QS. Az-Zumar/39 : 39

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

*Katakanlah (Muhammad), Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, akupun berbuat (demikian) sesuai dengan keadaanmu. Kelak kamu akan mengetahui.*¹⁵¹

Di dalam ajaran agama Islam bahwa manusia selaku makhluk Tuhan dibekali berbagai potensi (fitrah) yang dibawa sejak lahir. Fitrah berarti kecenderungan terhadap agama Islam. Secara fitri manusia lahir cenderung mencari dan menerima kebenaran walaupun pencarian itu masih tersembunyi di dalam lubuk hari yang paling dalam. Adakalanya manusia telah menemukan kebenaran itu, namun ketentuan factor eksternal yang mempengaruhinya, maka ia berpaling dari kebenaran itu.¹⁵² Tumbuh dan berkembang keadaran agama dan pengalaman agama ternyata melalui proses gradual, tidak sekaligus. Pengaruh luar berperan dalam menumbuhkan kembangkan khususnya bidang pendidikan. Adapun pendidikan yang paling berpengaruh, yaitu pendidikan dalam keluarga. Apabila dilingkungan keluarga anak tidak diberikan pendidikan agama, biasanya sulit untuk memperoleh kesadaran dan pengalaman agama yang memadai.¹⁵³

Membangun sumber daya manusia termasuk membangun masyarakat yang berkarakter dan berakhlak mulia, yaitu sebuah

¹⁵⁰Rusli Yusuf, *Pendidikan dan Investasi Sosial* (Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2011), h. 90.

¹⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 664.

¹⁵²Ramayulis, *Psikologi Agama* (Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 35-36.

¹⁵³Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Cet. XVI; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 299.

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, saling menghormati, jujur, peduli, dan taat hukum, adalah kunci utama untuk dapat eksis dan mengantisipasi dampak negatif dari iklim globalisasi. Apabila dikaitkan kondisi bangsa Indonesia, maka membangun masyarakat yang berkarakter tersebut merupakan kunci utama untuk keluar dari krisis berkepanjangan sehingga siap menghadapi iklim globalisasi. Akhlak yang ditawarkan Islam yang berdasarkan nilai-nilai, mutlak bersumber pada al-Qur'an dan hadis serta memerlukan dalam pelaksanaannya dan penjabarannya.¹⁵⁴

d. Tujuan bagi Masyarakat Muslim

Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (kemampuan dasar) peserta didik melalui ajaran Islam kearah titik yang maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan secara teoretis mengandung suatu pengertian "memberi makan" kepada jiwa peserta didik agar mendapatkan kepuasan rohaniah, juga diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Apabila diarahkan kepada pertumbuhan sesuai ajaran Islam, harus berproses melalui sistem kependidikan Islam baik melalui kelembagaan maupun sistem kurikuler. Esensi potensi dinamis dalam diri manusia terletak pada keimanan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas), dan pengamalannya. Dan keempat potensi esensial ini menjadi tujuan fungsional Islam.¹⁵⁵

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal dan hati. Akal berfungsi untuk berpikir dan hati berfungsi untuk merasa. Karena kedua hal itulah manusia memiliki kecenderungan untuk meyakini Allah dan mentaati segala perintah-Nya guna memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Manusia dan alam sekitarnya tidak dengan sendirinya ada seperti pandangan materialisme yang menyatakan bahwa keberadaan

¹⁵⁴ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 301.

¹⁵⁵ H.M. Arifin M, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 32.

manusia di muka bumi adalah sebagai materi yang terlempar dari planet lain. Dalam pandangan al-Qur'an, keberadaan manusia dan alam sekitarnya direncanakan oleh Allah melalui suatu proses penciptaan.¹⁵⁶

C. Implementasi Bidang Keagamaan

Eksistensi manusia di muka bumi merupakan “wakil” (khalifah) Allah. Untuk mewujudkan fungsi itu, manusia telah dibekali oleh Allah dengan sejumlah potensi. Potensi utama dalam hal ini adalah *al-ruh* yang berasal secara rangsung dari Allah. Sebagai potensi ia berusaha untuk menjadi aktual sebagai khalifah sejalan dengan perkembangan jiwa manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa dimensi *al-ruh* dan jiwa manusia membutuhkan perwujudan diri sebagai khalifah. Khalifah merupakan puncak tingkat tertinggi perkembangan kemanusiaan manusia di muka bumi.¹⁵⁷

Hampir seluruh ahli psikologi sependapat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan saja hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya saja. Berdasarkan hasil riset dan observasi mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati berupa keinginan untuk mencinta dan dicintai Tuhan.¹⁵⁸

Jika nilai-nilai ajaran agama itu telah menjadi pedoman yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat berarti agama tersebut telah menjadi kebudayaan. Jika bukan berarti tidak menjadi agama dalam kebudayaan karena hanya menjadi seperangkat pengetahuan anggota masyarakat untuk perluasan ilmu. Pokoknya apa saja nilai agama yang dipraktekkan yang menjadi kebiasaan dan berupa acuan umum kehidupan masyarakat pendukung

¹⁵⁶Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009), h. 45.

¹⁵⁷Ramayulis. *Psikologi Agama*. Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013, h. 41.

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 42.

kebudayaan tersebut, itulah yang disebut agama dalam kebudayaan.¹⁵⁹

Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan penting dan dianggap memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Pendidikan akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: "*kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik*" (HR. Abu Yu'la dan Al-Baihaqy).¹⁶⁰

Dipandang dari sudut kepatuhan nafsu itu mengikuti ajakan roh kepada kebaikan dan pembangkangan nafsu terhadap pencegahan ruh kepada yang mungkar, maka nafsu dapat dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, *Nafsu Al-Muthmainnah* yaitu suatu bentuk nafsu yang dapat dikendalikan menurut norma agama dan tidak terpengaruh dari tekanan dan keinginan syahwat; Kedua, *Nafsu Lawwamah*, nafsu (jiwa) yang tidak sempurna ketenangannya karena sewaktu waktu tergoda oleh dorongan yang membawa kepada keragua-raguan. Namun terhadap hal-hal yang jahat tetap ditolak dan ditantanginya. Karena itu mencela dirinya pada saat ia tidak taat pada tuhan; dan (3) *Nafsu Amarah* bi Sui yakni nafsu (jiwa) yang melepaskan diri dari pertentangan disebabkan karena keraguan dan sepenuhnya tunduk dan taat apa yang dikehendaki syahwat dan syaitan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Rusmin Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama: The Psychology of Religion*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h.159.

¹⁶⁰ Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 60.

¹⁶¹ B, Abul Muiz Kabri. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang, Universitas Islam DDI, 2013,

D. Implementasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kesehatan sosial ialah kemampuan seseorang memupuk dan mengendalikan fungsi fisik, jiwa, emosi serta spritual sehingga potensial bagi pengintegrasian, pelikwidasian serta personifikasian budaya nilai-nilai dan norma kehidupan bersama dalam satu masyarakat di mana keseharian orang yang bersangkutan berada di situ.¹⁶²

Berkaitan dengan pendidikan karakter ini, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang mempunyai yang utama ini terutama dinilai dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada pemahamannya. Dengan demikian, hal yang paling penting dalam pendidikan karakter ini adalah menekankan anak didik untuk mempunyai karakter yang baik dan diwujudkan dalam perilaku keseharian.¹⁶³

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitue*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini pendidikan karakter tidak akan efektif, demikian tulis Suyanto dalam *waskitamandiribk.wordpress.com*. Jadi yang diperlukan dalam pendidikan karakter tidak cukup dengan pengetahuannya saja. Hal ini karena pendidikan karakter terkait erat dengan nilai dan norma. Oleh karena itu harus juga melibatkan aspek perasaan.¹⁶⁴

Moralitas merupakan suatu ciri manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk selain manusia. Pada tahap hewan tidak ada kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dan yang dilarang, tentang yang harus dilakukan dengan tidak pantas

h. 51–52

¹⁶² Rusmin Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama: The Psychology of Religion*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h.168.

¹⁶³ Ahmad Muhaimain Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Cet. II; Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2013, h. 17.

¹⁶⁴ Ahmad Muhaimain Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Cet. II; Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2013, h. 27.

dilakukan. Hewan tidak mempunyai keharusan, sedangkan manusia mempunyai keharusan moral sebagai kewajiban dan etika sebagai tata nilai dalam berinteraksi. Kewajiban dikhususkan untuk keharusan moral yang di dalamnya terkandung muata etika, nilai etik, dan etiket sebagai tata nilai yang diwujudkan menjadi moralitas manusia. Lebih dari itu etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi yang menggambarkan komitmen dan integritas pribadi seseorang yang bermoral dan beretika. Etika berhubungan dengan kesadaran etik yang tumbuh menjadi peristiwa rohani yang terjadi dalam kalbu atau nurani yang berujung pada keputusan batin dan bertanggungjawab atas keputusannya.¹⁶⁵

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu: 1) ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan 3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak ditentukan oleh bermacam-macam norma yang menjadi adat kebiasaan manusia itu sendiri (Mufid: 2009:91). Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Pengertian tersebut menegaskan bahwa etika adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok yang mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma-norma.¹⁶⁶

Etiket berarti aturan sopan santun dalam pergaulan yaitu memberikan dan menunjukkan cara yang tepat untuk bertindak dan berbuat. Etiket menyangkut cara atau tata cara bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan. Etiket berlaku dalam pergaulan sosial ketika ada orang lain yang melihat perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Etika bersifat relatif yaitu terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu dan selalu menyangkut lahiriahnya saja yaitu wujud dari perbuatan itu, seperti

¹⁶⁵ Saiful Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan. Peluang dan Tantangan*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 1.

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 11.

bersikap ramah , bertutur sapa yang baik, mendengarkan dengan baik, menatap dengan sopan, melakukan gerakan yang menghargai orang lain dan perilaku baik lainnya. **Etiket juga disebut tatakrama**, yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat.¹⁶⁷

Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan penting dan dianggap memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Pendidikan akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: "*kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik*" (HR. Abu Yu'la dan Al-Baihaqy).¹⁶⁸

Akibat dari inkonsistensi karakternya, qalbu dapat mengikuti hawa nafsu yang menjerumuskannya pada *fujur* (hanyut dalam dosa) dan dapat pula mengikuti keinginan ruh ilahiyah yang membawanya pada ketakwaan. Bila hanyut pada keinginan maka seluruh kekuatan ruhaninya akan tertutup dan tidak berfungsi. Sebaiknya bila qalbu akan mencapai derajat sempurna. Dan seluruh kekuatannya akan mengarah pada ketakwaan yang hakiki dan mencapai puncak kekuatannya. " (HR. Abu Yu'la dan Al-Baihaqy).¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 60.

¹⁶⁸ Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 60.

¹⁶⁹ Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 19.

Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak mulia. Saat ini pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia. Oleh karena itu pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.¹⁷⁰

E. Implementasi Bidang Profesi

Tingkat kemandirian dalam berbagai program seperti yang diutarakan oleh Moore (dalam Keegan, 1983) yakni program pembelajaran yang paling tinggi tingkat kemandiriannya adalah *Private Study* atau Program Belajar Sendiri. Dalam program pembelajaran ini si pelajar (*learner*) mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menentukan tujuan belajarnya, media dan cara belajarnya serta kriteria keberhasilan belajarnya. Tujuan belajar yang ditentukan sendiri¹⁷¹.

Dalam rangka mewujudkan interaksi kemanusiaan ini, jasad atau tubuh manusia dilengkapi oleh Allah dengan beberapa alat yang disebut panca indra, antara lain sebagai berikut; mata, telinga, hidung, mulut dan kulit.¹⁷²

Bruner sebagai ahli teori belajar psikologi kognitif memandang proses belajar itu sebagai tiga proses yang berlangsung secara serempak, yaitu 1) proses perolehan informasi baru, 2) proses transformasi pengetahuan dan 3) proses pengecekan ketepatan dan memadainya pengetahuan tersebut. Informasi baru dapat merupakan penyempurnaan pengetahuan terdahulu seseorang. Misalnya seseorang mempelajari sistem sirkulasi darah secara rinci setelah kurang jelas mempelajari sirkulasi dara tersebut. Dalam

¹⁷⁰ Ahmad Muhaimain Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Cet. II; Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2013, h. 15.

¹⁷¹ Rusman. *Model-Mode Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 360..

¹⁷² Baharuddin. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 14.

transformasi pengetahuan, orang menggunakan pengetahuan untuk menyesuaikan dengan tugas-tugas (masalah) baru yang dihadapi. Jadi transformasi kita dapat menggunakan informasi di luar jangkauan informasi itu dengan cara ekstrapolasi (untuk mempergunakan informasi) atau mengubah informasi ke dalam bentuk lain (Moeslichatoen, 1989:13). Bruner memandang belajar sebagai “instrumental conceptualisme” yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia.

Oleh karena itu pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat khusus. Hal ini berbeda dengan realisme dan nominalisme. Pandangan Bruner tentang belajar berpusat kepada dua prinsip mengenai hakikat proses dalam memahami: 1) pengetahuan tentang dunianya didasarkan kepada bangunan model tentang kenyataan yang dimilikinya, dan 2) model-model itu semula diadopsi dari budaya seseorang kemudian model itu didapati penggunaannya secara perseorangan (Moeslichatoen, 1989:13).¹⁷³

Jiwa yang diilhamkan kepada kebaikan akan memberi pedoman hidup manusia dalam beragama melalui tingkah-laku. Fungsi dan peran agama akan memberi pengaruh terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi, maupun membentuk kata hati (*conscience*).¹⁷⁴

Menurut Mc Ashan, kompetensi itu adalah suatu pengetahuan keterampilan dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.¹⁷⁵ Perlu dipahami bahwa pengembangan karakteristik afektif pada anak didik memerlukan upaya secara sadar dan sistematis. Terjadinya proses kegiatan belajar dalam ranah afektif dapat diketahui dari tingkah laku murid yang menunjukkan adanya

¹⁷³ Abdul Hadis, M.Pd., dan Nurhayati. *Psikologi dalam Pendidikan*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, Cv. 2015, h. 68–69.

¹⁷⁴ Baharuddin. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 29.

¹⁷⁵ Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 6.

kesenangan belajar. Perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif menimbulkan tingkah laku yang konstruktif dalam diri pelajar (Kelley, 1965 dalam Andersono, 1981: 17). Perasaan dan emosi mempunyai peran utama dalam menghalangi atau mendorong belajar. Oleh karena itu perkembangan afektif seperti halnya perkembangan kognitif perlu memerlukan penekanan dalam proses belajar.¹⁷⁶ Kebutuhan sosial biasanya sangat dominan dalam kehidupan. Kebanyakan individu berhubungan dengan orang lain dan merasa menjadi anggota dan diterima dalam suatu kelompok sosial ini lebih besar. Bagi orang-orang tertentu, kebutuhan sosial ini lebih besar dari pada bagi orang-orang lain.¹⁷⁷

Depont, pada tahun 1976 memformulasikan teori perkembangan afektif. Teori dikembangkan oleh Dupont pada dasarnya sesuai dengan model perkembangan model perkembangan model kognitif oleh Piaget. Konsep-konsep utama teori tersebut adalah sebagai berikut (Lecapitaine, 1980: 9).

1. Afeksi adalah getaran refleksif disertai perubahan psikologis dan tendensi bertindak.
2. Perkembangan afektif memiliki komponen struktural dan organisasional, hal ini menyebabkan terjadinya respons afektif yang tidak dapat diulang. Perkembangan struktur afeksi memiliki dimensi utama seperti halnya perkembangan struktur kognisi.
3. Perkembangan afektif terdiri dari enam tahap: 1) Impersonal (pribadi yang tidak jelas); 2) Heteronomi (pribadi yang jelas); 3) Antar pribadi (pribadi-pribadi sejawat); 4) Psikologis-personal (afek yang dapat dibedakan satu sama lain); 5) Otonomi (pusat afek di sekitar konsep abstrak tentang otonomi diri dan orang lain; dan 6) Integritas (pusat afek di sekitar konsep abstrak integritas diri dan orang lain).¹⁷⁸

Setiap guru wajib berbuat yang sama terhadap seluruh peserta didik sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan yang

¹⁷⁶ Suyantoo. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawai*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 21.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 35.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 26.

adil. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh oleh sikap yang berlaku adil itu di antaranya: bahwa setiap peserta didik secara pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang akan tampak suatu kecenderungan untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama adilnya dengan peserta didik lainnya. Guru yang ari dan berwibawa seharusnya perkataan sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya pribadi guru itu turut serta mewarnai suasana pendidikan. Untuk seorang guru tidaklah pada tempatnya apabila ia berpura-pura. Karenanya apabila ia gembira riang sebenarnya gembira riangnya itu keluar dari lubuk hatinya. Guru yang arif dan berwibawa dalam bertatap muka haruslah gembira dan semangat sehingga gaya mengajar erat sekali dengan kepribadian. Hal tersebut menyangkut tentang suara, pandangan mata, mimik sikap berdiri/duduk, rona muka dan sebagainya. Karenanya semua itu memerlukan ketelitian atau kejelian dari seorang guru dalam penyelesaian dengan situasi, kondisi dan pelajaran yang sedang diajarkan.¹⁷⁹

Kompetensi sosial terdiri dari sub kompetensi ; 1) memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan , 2) melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya, 3) membangun kerjasama tim (*team work*) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah; 4) melaksanakan komunikasi (oral, tertulis dan gambar) secara efektif dan menyenangkan. Danin mengemukakan bahwa kompetensi sosial memiliki tiga sub ranah , yaitu: (a) mampu berkomunikasi dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Sub komunikasi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; 3) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik.

Profesi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.

¹⁷⁹ Mappanganro. *Pemeliharaan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010, h. 61.

Istilah tersebut mengalami perkembangan dalam penggunaannya. Profesional menunjuk kepada yang menyandang suatu profesi atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Profesional dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan profesi atau keahlian yang dimiliki secara terus-menerus dan tidak terpisahkan dengan pribadinya. Profesionalisasi dimaksudkan dengan menunjuk kepada peningkatan kualifikasi atau kemampuan dalam usaha mencapai kriteria atau standar profesi sehingga profesionalisasi ini merupakan serangkaian proses dalam pengembangan profesional. Sedangkan profesionalitas menunjuk kepada sikap-sikap tertentu bagi orang yang memiliki profesi, terhadap profesinya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya.¹⁸⁰

Agar dapat memberikan layanan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuannya dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. Keinginan dan permintaan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karenanya guru selalu dituntut secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan meningkatkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi: "*Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.*" Dalam butir keenam ini dituntut kepada guru, baik secara pribadi maupun kelompok untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya karena ilmu dan pengetahuan dan keterampilannya selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.¹⁸¹

Bimo Walgito (1982: 11) menyatakan berapa rumusan bimbingan yang dikemukakan para ahli, di antaranya: Bimbingan

¹⁸⁰Mappanganro. *Pemeliharaan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010, h. 79.

¹⁸¹Soetjipto, dan Rafli Kosasi. *Profesu Keguruan*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016, h. 52

adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu itu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Dari pengertian yang dikemukakan itu dapat dikemukakan bahwa bimbingan merupakan: (a) suatu proses yang berkesinambungan, (b) suatu proses membantu individu, (c) bantuan yang diberikan itu dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan/potensinya, dan (d) kegiatan yang bertujuan utama memberikan bantuan agar individu dapat memahami keadaan dirinya dan mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan Bimo Walgito (1982: 11) menyatakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa kegiatan konseling ini mempunyai ciri-ciri: a) pada umumnya dilaksanakan secara individual, b) pada umumnya dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka, c) untuk pelaksanaan konseling dibutuhkan orang ahli, d) Tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien, e) Individu yang menerima layanan (klien) akhirnya mampu memecahkan masalahnya dengan kemampuannya sendiri.¹⁸²

Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini: “*Menyendiri lebih baik dari pada berkawan dengan yang buruk dan kawan bergaul yang shaleh lebih baik dari menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik dari berdiam dan berdiam adalah lebih baik dari pada berbicara (ngobrol) yang buruk*”. (HR. Al-Halim).¹⁸³

Selain itu ilmu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan

¹⁸² Soetjipto, dan Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016, h. 62–63.

¹⁸³ Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. II; Depok: Gema Insani, 2008, h. 217.

maksiat. Diketahui bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Jika tujuan ilmu akhlak tersebut dapat tercapai maka manusia akan memiliki kebersihan batin yang pada gilirannya malahirkan perbuatan yang terpuji ini akan lahirlah keadaan masyarakat yang damai, harmonis, rukun, sejahtera lahir dan batin yang memungkinkan ia dapat beraktivitas guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju yang disertai dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang ia miliknya itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia.

Sebaliknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memiliki pangkat, harta, kekuasaan dan sebagainya namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya itu akan disalahgunakan yang akibatnya akan menimbulkan bencana di bumi. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak bertujuan untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui yang baik atau yang buruk. Terhadap perbuatan yang baik, ia berusaha melakukannya dan terhadap perbuatan buruk ia berusaha untuk menghindarinya.¹⁸⁴

Kecenderungan manusia kepada kebaikan ini terbukti dari adanya persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan-jika terjadi-terletak pada bentuk, penerapan atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral yang disebut ma'ruf dalam bahasa Al-Qur'an. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan. Penipuan atau keangkuhan. Pun tidak ada manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orang tua adalah buruk. Tetapi bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu? Boleh jadi cara

¹⁸⁴ Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1996, h. 15-16.

penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antarasatu masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang lain. Perbedaan-perbedaan itu selama dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam kerangka prinsip umum maka ia tetap dinilai baik.¹⁸⁵

Martabat manusia berarti manusia itu dianugrahi banyak kemampuan, yang paling tinggi dan paling penting adalah akal dan kehendak bebas. Melalui keistimewaan-keistimewaan ini, manusia dapat menemukan keyakinan yang benar dan juga mencapai akhlak mulia dan kesempurnaan yang layak terhadapnya. Dengan begitu manusia dapat menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para makhluk lainnya. Rasulullah saw. Bersabda: “Akal adalah cahaya yang Allah ciptakan bagi manusia dan menjadikannya sebagai penerang hati manusia itu.”¹⁸⁶

Budaya dan nilai-nilai Islam berakar dalam ajaran dan cita-cita Al-Qur’an. Bagi kaum muslim yang beriman, Al-Qur’an merupakan teks paling penting tentang nilai-nilai kemanusiaan dan ilahi. Kitab Allah tersebut memberi petunjuk tentang bagaimana membangun model, struktur dan konten Islam yang sempurna bagi masyarakat Islam dan gaya hidupnya. Ini sesuai dengan hierarki sistem nilai-nilai yang dengan nilai itu umat manusia mampu menetapkan aturan kehidupan dan mencapai tujuan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak.¹⁸⁷

Cinta merupakan unsur fundamental dari hati manusia sejati. Jika tidak ada cinta maka tidak ada hati. Kekuatan cinta adalah ibarat persenyawaan yaitu bahwa ia dapat mengubah satu substansi menjadi substansi lainnya. Ia dapat membangunkan kekuatan jiwa yang tidur dan membebaskan kekuatan jiwa yang terbelenggu. Ada beberapa jenis cinta yang dialami oleh umat manusia. Satu jenis cinta adalah apa yang benar-benar berada di luar batas-batas materi;itas. Jatuh cinta terhadap

¹⁸⁵ Abuddin Nata. *Akhlaq Tasawuf*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1996, h. 35.

¹⁸⁶ Muhammad Ali Shomali. *Seri Referensi Islam: Etika*. Cet. I; Jakarta: Citra, 2016, h. 27.

¹⁸⁷ A Muhammad Ali Shomali. *Seri Referensi Islam: Etika*. Cet. I; Jakarta: Citra, 2016, h. 71.

kebenaran yang unggul dan keutamaan seperti perdamaian, kebebasan, persamaan, kejujuran dan keadilan, demikian juga terhadap orang-orang yang memmanifestasikan ciri-ciri kemanusiaan ini dianggap sebagai kriteria utama dari kategori ini. Di luar ini adalah cinta terhadap wujud yang abadi, agung dan mulia, yang tidak ada selain dari Allah, kekasih dan mata air keberkahan, rahmat, kedamaian dan seluruh karakteristik lainnya yang disebutkan sebelumnya. Jenis cinta ini menghubungkan umat manusia dengan Tuhan mereka dan membantu mereka untuk mmenyucikan diri mereka dan berkontribusi bagi perdamaian abadi dan lebih kokoh.¹⁸⁸

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat terutama dalam konteks pendidikan. Di antara tantangan itu adalah globalisasi di bidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transformasi dan informasi . Para siswa peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan pesan pembelajaran baik yang bersifat pedagogis-terkontrol maupun yang bersifat nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber-sumber pesan pembelajaran yng sulit terkontrol akan mempengaruhi perubahan budaya, etika dan moral para atau masyarakat. Masyarakat yang semula merasa asing bahkan tabu terhadap model-model pakaian (*fashion*) yang terbuka dan hiburan-hiburan (*fun*) atau film-film porno atau sadis atau tabu dengan bacaan kemudian menjadi biasa-biasa saja bahkan menjadi bagian dari itu. Sebagai ekksesnya adalah munculnya sikap sadisme, kekerasan, pemerkosan dan sebagainya di kalangan masyarakat.¹⁸⁹

Ide-ide dan gagasan tentang etos kerja yang digali dari wahyu ilahi serta hasil-hasil penelitian sebagai fenomena *qawniah* tersebut septutnya dijadikan landasan berpijak oleh kepala madrasah dalam mengelola yang lebih profesional sehingga para lulusannya memiliki

¹⁸⁸ Muhammad Ali Shomali. *Seri Referensi Islam: Etika*. Cet. I; Jakarta: Citra, 2016, h. 78.

¹⁸⁹ Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.15.

daya saing yang tinggi dan diakui lebih tinggi di tingkat nasional, regional dan internasional. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah, dalam QS. Al-Qashas (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

BAB VI

URGENSI DAN MANFAAT MANAJEMEN

A. Urgensi dan Manfaat Bidang Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris *to manage*, yaitu mengatur atau mengelola. Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola organisasi, yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Orang yang memimpin dalam organisasi disebut manajer. Pembahasan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya dari anggota dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Secara keseluruhan, proses pengelolaan merupakan fungsi manajemen.¹⁹⁰

Pendapat yang dikemukakan para ahli tentang pengertian manajemen, adalah:

- a. Louis A. Allen, menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu seni, suatu ilmu dan suatu profesi. Dikatakan suatu seni karena manajemen adalah keterampilan yang dilatih sesuai dengan kepribadian masing-masing praktisi yang mempunyai ciri sebagai pengetahuan dan suatu pekerjaan spesialisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang terklasifikasi dan istilah bersama.
- b. Georger R. Tery, bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen juga berarti usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan sehingga manajer melakukan koordinasi atau tindakan melalui perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian.

¹⁹⁰Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 11.

- c. Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel, dalam bukunya *Manajemen, eight edition*, yang menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian.
- d. Sondang P. Siagian, manajemen adalah suatu kemampuan atas keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.¹⁹¹

Dengan penjelasan tersebut, maka secara umum pengertian manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang lain. Dengan pengertian tersebut tersirat adanya lima unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, kerjasama dalam mencapai tujuan, dan sarana atau peralatan manajemen (*tools of management*) yang terdiri atas: manusia, uang, bahan-bahan, mesin, metode, dan pasar. Teori manajemen ilmiah memfokuskan kajiannya pada pentingnya keberadaan manajer dan perannya dalam suatu organisasi. Menurut teori ini, penciptaan iklim yang kondusif bergantung pada sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi.¹⁹²

Fungsi manajerial yang terdapat dalam proses kegiatan pendidikan, adalah: 1) fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terbebas dari kebodohan; 2) fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan; 3) fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah; dan 4) fungsi religius, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugrahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada

¹⁹¹Sagaf S. PL., *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ip4m Press, 2009), h. 3-5.

¹⁹²U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, h. 5.

manusia. Fungsi yang diatur oleh agama yang mewajibkan umatnya untuk mencari suatu ilmu dan menghindarkan diri dari aspek kebodohan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas.¹⁹³

Menurut Buchari Zainun, ada beberapa prinsip organisasi dan manajemen, sebagai berikut:

- 1) Sesuatu kebijakan mengandung tujuan atau misi dari organisasi yang harus diberitahukan kepada pihak yang bertanggungjawab mencapainya. Dengan tujuan ini dapat diukur efisiensi kerja organisasi.
- 2) Semua pekerjaan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan harus terperinci, terencana, serta diatur dengan sistematis hingga akibat duplikasi dan pemborosan dapat dibatasi, bahkan dalam beberapa hal duplikasi dapat dihindari.
- 3) Tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab yang hendak diserahkan kepada petugas atau pejabat yang bertanggung jawab, rinciannya harus jelas dan dipahami. Tetapi untuk menjaga fleksibilitas dan timbulnya kemungkinan lain, maka kemungkinan diizinkan menambah perincian dengan tugas yang lain.
- 4) Pemberian tugas dan wewenang harus disertai dengan wewenang yang seimbang. Sedapatnya wewenang tersebut berada di mana tugas dilaksanakan.
- 5) Perlu adanya struktur organisasi sebagai gambaran dari hubungan wewenang dan tanggungjawab yang dapat dipergunakan sebagai alat penyalur tugas, tanggungjawab, dan wewenang, informasi, sumberdaya, dan perintah.
- 6) Setiap organisasi atau bagian organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai syarat kecakapan yang sesuai. Pemimpin yang cakap itu, semestinya orang yang

¹⁹³Hikmat, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 18.

mempunyai kemampuan melihat keseluruhan dari tujuan kesatuan organisasi yang dipimpinnya.

- 7) Koordinasi yang sempurna harus dipelihara dalam organisasi baik di antara anggota maupun kelompok pekerja dan satuan kerjanya agar sinergitas dalam berorganisasi berjalan dengan baik.
- 8) Organisasi hanya alat, karena itu harus disesuaikan kebutuhan tuntutan dan situasi. Perubahan suatu organisasi/reorganisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh organisasi. Dan harus pula dijaga perubahan organisasi untuk tidak berhasil mengganggu stabilitas kerja berorganisasi dalam upaya mempengaruhi moral dan semangat kerja anggota organisasi.¹⁹⁴

2. Teori Manajemen

Teori manajemen yang akan dikemukakan adalah teori klasik, teori neo-klasik, dan teori modern,¹⁹⁵ sebagai berikut:

a. Teori Klasik

Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur/anatomi organisasi. Salahsatu teori klasik adalah manajemen ilmiah (*scientific management*) yang dipelopori oleh Frederik W. Taylor (1856-1915 M). Pendekatan ilmiah ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk itu manajemen harus melaksanakan prinsip: 1) perlunya dikembangkan ilmu bagi setiap tugas (pedoman gerak, implementasi kerja yang standar dan iklim kerja yang layak, 2) pemilihan karyawan yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja, 3)

¹⁹⁴B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.

¹⁹⁵Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Indonesia* (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 22-32.

perluinya pelatihan kerja dan pemberian rangsangan, dan (4) perlunya dilakukan penelitian dan percobaan.

Pelopor klasik lainnya yaitu Henri Fayol (1916) menerbitkan *Administration Industrielle et Generale* yang berisi lima pedoman manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya, Ulick dan Urwich (1930) yang populer dengan akronim POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting*) sebagai kegiatan manajerial dan merupakan proses manajemen. Prinsip pokok menurut Fayol adalah: 1) kesatuan komando yang dianggap penting karena pembagian tugas dalam organisasi sangat spesialis, 2) wewenang harus dapat didelegasikan, 3) inisiatif harus dimiliki oleh setiap manajer, dan 4) adanya solidaritas kelompok.

Menurut Weber, birokrasi merupakan usaha menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional atau berdasarkan ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak efektif. Birokrasi yang disebut Weber tidak ada hubungannya dengan prosedur yang berbelit, penundaan pekerjaan, pemborosan sebagaimana yang dibayangkan. Akan tetapi birokrasi bisa tidak efektif jika setiap orang terlibat dalam organisasi yang terkurung dalam bidang spesialisasinya tanpa mengetahui hubungan dengan bidang lain. Birokrasi tidak efisien jika semata memaksa orang mengejar karir tanpa diimbangi pelayanan organisasi. Peraturan menjadi lebih penting daripada masalah yang harus dipecahkan dan peraturan itu berubah menjadi tujuan.

Meskipun diakui bahwa suatu birokrasi memiliki keunggulan dalam mencapai efisiensi suatu organisasi, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan, antara lain: (a) menimbulkan kecenderungan untuk merangsang dan mengembangkan cara berpikir yang komformitas; (b) rutinitas dan membosankan; (c) ide inovatif tidak berkembang karena kejenuhan akibat padatnya pesan dan panjangnya alur yang harus dilalui; dan (d) tidak memperhitungkan adanya organisasi informal yang seringkali berpengaruh terhadap organisasi formal.

b. Teori Modern

Pendekatan modern berdasarkan hal-hal yang sifatnya situasional. Artinya, orang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan. Asumsi yang dipakai ialah orang berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya, dan tindakannya, semuanya bergantung pada lingkungan. Selanjutnya, orang bekerja dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Murdick dan Ross, organisasi itu terdiri dari individu, organisasi formal, organisasi informal, gaya kepemimpinan, dan perangkat fisik yang satu sama lain saling berhubungan. Pendekatan sistem terhadap manajemen berusaha untuk memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan maksud tertentu yang terdiri atas bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem tidak terpisah berhubungan dengan berbagai bagian dari sebuah organisasi melainkan memberikan kepada manajer, suatu cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan bagian dari yang lebih besar (lingkungan).

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka fungsi manajemen berikut ini :

1. Fungsi Manajemen dalam Pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. Syafaruddin (2003), menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan Georger R. Terry (1978), telah menyederhanakan fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dilihat dari prosesnya fungsi manajemen tersebut dapat dianggap cukup bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materil melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁹⁶

¹⁹⁶Sagaf, *Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta; Ip4m, 2009), h. 46.

Secara eksplisit dikemukakan bahwa suatu sistem itu lebih cenderung bersifat terbuka. Hal ini dinyatakan dengan adanya aspek lingkungan yang berhubungan erat dengan bagian dari sistem yang berperan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka, tujuan organisasi mempunyai kebergantungan. Prinsip yang digunakan dalam manajemen berdasarkan sistem: 1) manajemen berdasarkan sasaran; 2) manajemen berdasarkan teknik; 3) manajemen berdasarkan struktur; 4) manajemen berdasarkan orang; dan 5) manajemen berdasarkan informasi.

Pendekatan sistem merupakan suatu metode atau teknik analisis yang secara khusus disebut analisis sistem (*system analysis*) terutama berfungsi dalam pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam hal ini pendekatan sistem dikaitkan dengan metode ilmiah. Analisis sistem ini mencakup: (a) menyadari adanya masalah; (b) mengidentifikasi variabel yang relevan; (c) menganalisis faktor-faktor; dan (d) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan.

Pendekatan ini diperlukan oleh dunia pendidikan dengan alasan: 1) Lembaga pendidikan semakin kompleks dan semakin sulit dikelola. Cara tradisional dalam manajemen tidak mampu lagi atau kurang efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan perkembangan pendidikan; 2) Perubahan yang terjadi dalam organisasi pendidikan semakin lama semakin cepat. Banyak pengelola lembaga pendidikan mengalami kesulitan mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan karena tidak mungkin mereka menjadi ahli dalam segala bidang, maka diperlukan pendekatan yang dapat memecahkan masalah yang semakin kompleks itu; 3) Masih langka para pengelola sistem dan satuan pendidikan yang profesional.

Pada dasarnya mereka berasal dari guru, bukan manajer yang profesional dalam pendidikan. Dalam situasi seperti ini pendekatan sistem membantu dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sistem pendidikan.

- 1) Pertumbuhan pendidikan dan perkembangan yang relatif cepat dengan disertai penambahan anggaran yang tidak sedikit, seringkali mengurangi kesadaran bahwa terdapat kekeliruan dalam merencanakan dan mengelola pendidikan. Dengan dana yang kurang memadai, kunci keberhasilan kegiatan pendidikan akan banyak bergantung pada ketepatan dan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan. Dalam hal ini pendekatan sistem dapat membantu perencana pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber dana untuk pendidikan.
 - 2) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan pendekatan sistem agar efektivitas dan efisien juga meningkat.
2. Fungsi Manajemen dalam Urusan Keagamaan

A. *Planning* (Perencanaan)

Beberapa defenisi perencanaan dari berbagai pakar dan beberapa sumber,¹⁹⁷ sebagai berikut:

- 1) Roger A. Kaufman (Harjanto, 1997: 2), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Perencanaan sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.
- 2) Muhammad Fikry (1978), menguraikan bahwa perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan adalah upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan *resources* yang ada.

¹⁹⁷Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 14-16.

- 3) Sondang P. Siagian, merumuskan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- 4) Fakry Gaffar, mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis, rasional, dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.

Combs, dalam bukunya *What is Educational Planning* merumuskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan para peserta didik dan masyarakatnya. Menurut Nanang Fattah, melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Afifuddin, menarik kesimpulan dari berbagai pakar di atas bahwa perencanaan pendidikan bukan hanya sebagai pola dasar (*blue-print*), melainkan juga petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan tidak berhenti pada saat tersusunnya dan disetujuinya suatu rencana oleh pengambil keputusan, akan tetapi erat hubungannya dengan implementasinya.¹⁹⁸

Ciri-ciri perencanaan pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, menimbang, serta memutuskan dengan keputusan yang mempunyai konsistensi (taat asas) internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan lain.

¹⁹⁸Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 28.

- 2) Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor sosial dan politik merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan.
- 3) Perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan, harus dapat melihat jauh ke depan dan bersifat inovatif, kuantitatif, dan kualitatif.
- 4) Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan dan menganalisis faktor ekologi (lingkungan), baik internal maupun eksternal.
- 5) Perencanaan pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan dalam arti bahwa program pendidikan harus ditujukan untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan.
- 6) Perencanaan suatu pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan.
- 7) Perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa yang akan datang karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi masa depan.
- 8) Perencanaan pendidikan harus elastis dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, tidak statis tetapi dinamis.
- 9) Perencanaan pendidikan harus merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaruan terus-menerus berlangsung.¹⁹⁹

Beberapa metode perencanaan yang dapat digunakan secara umum dalam perencanaan dan dapat diterapkan dalam bidang pendidikan yang ditemukan oleh August W. Smith (1982),²⁰⁰ antara lain: 1) Metode *Mean-ways and Analysis* (Analisis Mengenai Alat,

¹⁹⁹Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 31.

²⁰⁰Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 52-53.

Cara, Tujuan Metode ini digunakan untuk meneliti sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu dianalisis dalam metode ini, yaitu *means* berkaitan berhubungandengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih, dan *ends* yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik; 2) Metode *Input-Output Analysis* (Analisis Masukan dan Keluaran); 3) Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif proses transformasi.

Jenis perencanaan meliputi perencanaan menurut besarnya (*magnitude*),²⁰¹ yakni: 1) Perencanaan Makro, adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan pada tingkat nasional; 2) Perencanaan Meso, adalah kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program yang berskala kecil. Pada tingkat ini perencanaan sudah lebih bersifat operasional disesuaikan dengan unit kerja (*intermediate unit*). Pertanyaan yang belum dijawab dalam perencanaan meso mempunyai kesamaan dengan pertanyaan untuk tingkat makro, akan tetapi lebih terperinci dan kebebasannya dibatasi oleh apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan tingkat makro; dan 3) Perencanaan Mikro, diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan meso. Khusus dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro atau meso.

Perencanaan menurut tingkatannya,²⁰² yakni: 1) Perencanaan Strategik (Renstra). Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi ini menurut R.G. Murdick J.E. Ross (1983) diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan dan dapat dikatakan sebagai

²⁰¹Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 50-51.

²⁰²*Ibid.*, h. 55-58.

konsepsi masa depan yang berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, dan penataan sumber; 2) Perencanaan Koordinatif. Perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan koordinatif biasanya terperinci dan menggunakan data statistik. Namun kadang dengan menggunakan pertimbangan akal sehat. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi sistem yang meminta ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan para tingkat perencanaan strategik; 2) Perencanaan Operasional. Perencanaan operasional memusatkan perhatian apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkrit tentang program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan secara jelas sebelumnya. Rencana operasional telah dijabarkan dan diterjemahkan ke dalam data kuantitatif yang dapat diukur dan biasanya tidak menggunakan suatu pendekatan integratif seperti halnya perencanaan strategik.

Perencanaan menurut waktunya,²⁰³ yakni: 1) Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari lima tahun, dan disebut sebagai rencana operasional. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang; 2) Perencanaan Jangka Menengah. Perencanaan jangka menengah yang mencakup kurun waktu 5–10 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang, akan tetapi lebih bersifat operasional; dan 3) Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun hingga 25 tahun. Perencanaan ini mempunyai jangka paling lama dan semakin lama atau panjang rencana itu, semakin banyak variabel yang sulit dikontrol.

²⁰³Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 59-60.

B. *Organization* (Pengorganisasian)

1) Pengertian Organisasi

Organisasi adalah struktur antarhubungan pribadi yang berdasar atas dasar wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. John R. Schermerhom dalam Moekijat, mendefenisikan organisasi sebagai gabungan orang yang bekerja sama dalam suatu pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat susunan orang yang diberi tugas dan wewenang berbeda yang biasa disebut struktur organisasi. Garis hierarkisnya menunjukkan jabatan, tugas, dan wewenang masing-masing, akan tetapi dalam pelaksanaan program organisasi selalu ada hubungan fungsional organik. Edgar A. Schein, menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas, fungsi dan melalui serangkaian wewenang dan tanggungjawab manusia sebagai anggota dalam organisasi itu. Jadi, makna organisasi adalah bentuk setiap penggabungan manusia untuk tujuan bersama. Organisasi adalah himpunan manusia yang mempunyai kepentingan yang sama karena keterbatasan sumber yang mereka miliki masing-masing, kemudian mereka mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pembagian tugas. Siagian, menyebutkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan antara seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.²⁰⁴

2) Teori dalam Penyusunan Organisasi

Teori dalam penyusunan organisasi,²⁰⁵ antara lain: 1) Teori Klasik. Pandangan teori klasik mengenai organisasi berdasarkan asumsi berikut: (a) organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan, (b) ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipan, (c) pekerjaan organisasi

²⁰⁴Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 178.

²⁰⁵Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, h. 116-121.

menjadi efektif apabila ada tantangan lingkungan dan kepentingan pribadi terhalang oleh norma rasionalitas, (d) spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan pedoman individu, (e) koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktek otoritas dan aturan yang tidak bersifat pribadi, (f) struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan, dan (g) masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang tidak tepat dan dapat diselesaikan melalui perancangan dan pengorganisasian kembali.

3) Teori Organisasi Formal

Menurut teori organisasi formal, birokrasi sangat penting dan menduduki tingkat utama dalam menjalankan suatu lembaga formal termasuk lembaga pendidikan. Organisasi formal memperhitungkan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban suatu jabatan. Kewenangan melakukan tugas jabatan harus sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut tatanan hierarkis. Setiap pegawai bertanggungjawab kepada atasannya.

Organisasi formal merupakan sistem aturan dan regulasi yang umum dan tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan dan fungsi jabatan dalam organisasi. Prosedur dalam organisasi yang bersifat formal dan impersonal, yaitu peraturan suatu organisasi berlaku bagi setiap orang. Jabatan diharapkan memiliki orientasi yang impersonal dalam hubungannya dengan pejabat lain. Seluruh sikap dan prosedur untuk menerapkan sistem disiplin yang merupakan bagian dari organisasi. Oleh karena itu, anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.

4) Teori Manajemen Ilmiah Taylor

Pendekatan Taylor terhadap manajemen dilakukan empat unsur kunci, yaitu pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur, dan rentang kekuasaan. Pembagian kerja berkaitan dengan tatacara pendistribusian dan pemberian tugas, kewajiban, dan pekerjaan organisasi. Dalam pengertian birokratis, kewajiban lembaga secara sistematis dibebankan pada jabatan dalam tatanan spesialisasi yang menurun. Taylor menyatakan bahwa pekerja harus dibebaskan dari tugas perencanaan dan kegiatan tatasusaha.

Proses skalar dan fungsional berkaitan dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Proses skalar menunjukkan adanya rantai perintah atau dimensi vertikal organisasi. Dengan memperoleh dua sistem, manajer telah memperbesar ukuran organisasi secara vertikal, menciptakan perubahan pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab, kesatuan perintah, dan kewajiban melapor.

5) Teori Struktural

Dalam teori struktural dinyatakan bahwa organisasi merupakan alat yang dapat berkembang secara teknis dan mekanis. Agar organisasi berjalan efektif, proses penyusunan organisasi harus memperhatikan prinsip organisasi yang diterapkan secara universal.

6) Teori X dan Y Douglas dan McGregor

Menurut Douglas dan McGregor, pandangan struktural berpangkal pada sumsi mengenai hakikat manusia yang dinyatakan dengan teori X, yaitu: (a) pada dasarnya manusia tidak mau atau malas bekerja dan berusaha untuk mengindarnya apabila memungkinkan, (b) karena sifat manusia yang tidak mau bekerja, mereka harus dipaksa, diperintah, jika perlu dihukum, dan (c) rata-rata manusia tidak senang diperintah dan berusaha untuk menghindari dari tanggungjawab. Asumsi tersebut, melihat aspek negatif manusia sehingga harus digantikan dengan asumsi lain, yang melihat manusia dari segi positif disebutnya teori Y, yaitu: (a) tidak setiap manusia tidak senang bekerja, (b) pengawasan dari orang lain dan pemberian hukuman bukanlah satusatunya jalan untuk membuat manusia bekerja keras dalam mencapai tujuan, (c) manusia dapat lebih digerakkan dengan memenuhi urutan kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, penghargaan, dan menampilkan karya yang terbaik, (d) rata-rata manusia senang belajar dalam keadaan tertentu, dan tidak hanya menerima tanggungjawab tetapi juga mencarinya, dan (e) kemampuan untuk memiliki tingkat imajinasi yang tinggi, kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan persoalan organisasi sesungguhnya tersebar pada setiap anggota organisasi dan tidak hanya terbatas pada orang tertentu.

7) Pandangan Manajemen Islami

Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip penyusunan organisasi berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Di antara prinsip organisasi yang tersurat dalam al-Qur'an, adalah:

(1) Surat Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

IN ALLAH SHADID AL'EQAB ۗ

Terjemahnya:

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*²⁰⁶

(2) At-Thalaq/65 : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Terjemahnya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²⁰⁷

Dalam ajaran Islam, diperlukan organisasi. Rasulullah saw. bersabda bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada seorang shalat sendirian. Arti hadis ini mengisyaratkan bahwa keutamaan shalat berjamaah sama halnya dengan berorganisasi dengan baik. Kesulitan dapat dipermudah apabila dipikul bersama. Aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hidup secara berjamaah

²⁰⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

²⁰⁷*Ibid.*, h. 818.

atau berorganisasi, lebih besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah.

3) Prinsip Organisasi

Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi utama dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Dalam berorganisasi harus ada prinsip tertentu agar pelaksanaan kegiatan organisasi tercapai sesuai dengan tujuan. Prinsip organisasi menurut Manulang,²⁰⁸ sebagai berikut: (a) adanya tujuan yang jelas, yakni tujuan organisasi harus ditetapkan sebelum perencanaan kegiatan dirumuskan karena rencana harus merujuk dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi, b) prinsip kerjasama, yakni tolok-ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerjasama di antara semua anggota organisasi, c) proses pengorganisasian.

4) Struktur Organisasi

Menurut E. Kast dan James E. Rozenzweig (1974), struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan bagian formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Menurut Stoner (1986), struktur organisasi dibangun oleh lima unsur, yaitu: (a) spesialisasi aktivitas; (b) standarisasi aktivitas; (c) koordinasi aktivitas; (d) sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan (d) ukuran unit kerja. Standarisasi aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakgunaan (*predictability*) aktivitas. Banyak prosedur ditetapkan dengan memformulasikan aktivitas dan hubungan dalam organisasi. Menstandarisasi berarti menjadikan seragam dan menggunakan peraturan, uraian jabatan dan program seleksi, orientasi kerja, dan keterampilan kerja. Koordinasi aktivitas, yakni prosedur yang memadukan fungsi dalam organisasi. Sentralisasi dan

²⁰⁸Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 187-188.

desentralisasi pengambilan suatu keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Sentralisasi, adalah proses konsentrasi wewenang dan pengambilan keputusan tingkat atas organisasi. Untuk mengatasi kelemahan sentralisasi dalam organisasi, dilakukan pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi yang disebut desentralisasi. Desentralisasi lebih diperlukan manakala suatu organisasi semakin berkembang. Organisasi yang berdasarkan desentralisasi tidak akan dapat mewadahi masalah yang timbul dan mengalir ke atas. Salahsatu tuntutan desentralisasi adalah koordinasi, baik koordinasi vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal mengandung unsur: rantai komando, rentan pengawasan, dan delegasi. Dan koordinasi horizontal, yaitu proses pengintegrasian kegiatan pada tingkat yang sama.²⁰⁹

5) Wewenang dan Kekuasaan

Wewenang merupakan hak kelembagaan menggunakan kekuasaan. Wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang sebenarnya, adalah kekuatan untuk mengendalikan orang lain sehingga orang lain sama sekali tidak punya pilihan karena tidak berdaya untuk menentukan diri sendiri atau tidak mengetahui bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan. Kekuasaan tidak hanya diperoleh semata dari tingkatan seseorang dalam hierarki organisasi, akan tetapi bersumber dari jenis psikologi kekuasaan. Menurut Edgar H. Schein (1980), kekuasaan terdiri dari: (a) kekuasaan yang memaksa, didasarkan pada kemampuan pemberi pengaruh untuk menghukum penerima pengaruh apabila tidak memenuhi permintaan. Hukuman dapat berupa kehilangan fasilitas, bahkan kehilangan pekerjaan. Kekuasaan paksaan ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan prestasi minimum atau kepatuhan bawahan; (b) kekuasaan imbalan, didasarkan pada kemampuan untuk member imbalan kepada orang lain. Semakin besar kekuasaan imbalan, makin besar pengaruh yang memberi perintah; (c) kekuasaan jabatan/sah, berhubungan dengan hak kelembagaan, terjadi apabila bawahan menerima pengaruh

²⁰⁹Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 73-74.

mengakui bahwa atasan secara sah berhak untuk memerintah atau member pengaruh dalam batas tertentu. Ini berarti bawahan mempunyai kewajiban mengakui kekuasaan; (d) kekuasaan ahli, didasarkan pada keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan dan tidak dimiliki oleh penerima pengaruh. Misalnya, jika seorang pasien melakukan apa saja yang diperintahkan seorang dokter, berarti mengakui kekuasaan keahliannya; (e) kekuasaan acuan, berpijak pada keinginan penerima pengaruh untuk meniru pemberi pengaruh. Kekuasaan ini berhubungan dengan faktor seperti gengsi, kekaguman, kebanggaan, dan atau sebagai figur atau tokoh idola; dan (f) kekuasaan pribadi, berpijak pada kualitas pribadi yang memberi pengaruh. Misalnya, kharisma pimpinan, seperti JF Kennedy, Mahatma Gandhi, Martin Luther, yang mendapat tanggapan emosional yang sangat besar dari pengikut.

6) Hubungan dalam Organisasi

Hubungan dalam organisasi menunjukkan kaitan dengan tanggungjawab, wewenang, pelaporan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah keharusan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Hubungan dalam organisasi, di antaranya: (a) hubungan staf, yaitu hubungan antar unsur dalam organisasi yang menunjukkan penugasan untuk membantu kegiatan unsure lain dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam struktur organisasi sering digambarkan dalam bentuk garis ke samping tetapi berada di bawah garis yang dibantu. Misalnya, hubungan antara Inspektorat Jenderal, Balitbang, dan Sekretaris Jenderal, semuanya di bawah Menteri terkait; (b) hubungan konsultatif, adalah hubungan antara unsur yang berada dalam organisasi dengan kedudukan setara. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk garis putus ke samping. Sebagai contoh, hubungan Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan Ditjen Pendidikan Tinggi. Hubungan Ditjen tersebut hanya bersifat pertimbangan/konsultasi; (c) hubungan koordinatif, yaitu merupakan pola hubungan yang menunjukkan hubungan antara unit dalam

suatu organisasi bertujuan mensinkronkan, saling mendukung, agar searah dan tidak tumpangtindih.²¹⁰

c. Actuating (Pelaksanaan/Pergerakan)

1) Pengertian dan Hakikat Pergerakan

Pergerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pentingnya unsure manusia, jelas terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan hidup manusia. Tepat tidaknya strategi dasar telah ditetapkan sebagai penunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan itu hanya bermakna apabila diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Karena itulah tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa sentralnya posisi manusia dalam organisasi, agar mereka mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya.²¹¹

Fungsi pergerakan merupakan fungsi paling sulit dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor, antara lain: (a) dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia seperti sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi dalam usaha akumulasi teori tentang seluk-beluk manusia. Ia tetap merupakan makhluk yang masih penuh dengan misteri sehingga dapat ditetapkan bahwa lebih banyak yang belum diketahui dibandingkan yang telah diketahui manusia; (b) dari semua sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, hanya manusialah yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak perlu hanya diakui, akan tetapi juga diakui. Penghargaan dan pengakuan akan harkat dan martabat harus dibarengi oleh anggota organisasi; (c) seluruh sumber daya dan dana yang terdapat dalam organisasi pada dirinya hanya merupakan benda mati yang instrinsik tidak mempunyai nilai

²¹⁰Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 83.

²¹¹Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 129.

apa-apa; dan (d) sumber daya manusia merupakan modal terpenting yang dimiliki oleh organisasi dan merupakan unsur pembangunan organisasi yang sangat tangguh apabila digerakkan secara cepat.²¹²

2) Karya Tulis/Tokoh tentang Pergerakan/Pelaksanaan

Beberapa karya tulis/tokoh tentang pergerakan/pelaksanaan (*actuating*) sebagai berikut: (a) Henry Fayol, dalam bukunya "*General and Industrial Administration*", yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan memberikan komando dan tanggungjawab utama kepada bawahan dan terletak pada pelaksanaan perintah yang diberikan; (b) Luther Gullick, dalam karyanya "*Papers on the Science of Administration*" menggunakan istilah *directing* sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah *directing* mempunyai makna pemberian petunjuk dan pemberian arah yang harus ditempuh oleh para pelaksana kegiatan operasional. Di kalangan manajer terdapat persepsi bahwa para bawahan adalah orang yang tingkat kematangannya, perlu dibimbing, dituntun, dan diarahkan secara kontinyu. Dalam pengambilan keputusan misalnya, pimpinanlah yang mengambil keputusan, namun sebelum keputusan dilaksanakan terlebih dahulu diinformasikan kepada para pelaksana agar mereka dapat mempersiapkan diri; (c) George R. Terry, yang menggunakan istilah *actuating* untuk menggerakkan seperti yang terdapat dalam bukunya *Principles of Management*, bahwa manajer yang bersangkutan sebenarnya telah memiliki gambaran tentang bentuk dan jenis keputusan yang akan diambilnya, namun sebelum keputusan diambil untuk adanya pergerakan, biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang bertindak sebagai pelaksana; (d) John F. Mee, menggunakan istilah *motivating* untuk dapat menggambarkan cara menggerakkan bawahan yang dipandanginya paling cepat. *Motivating* sebagai fungsi organik manajemen, pada dasarnya adalah manajer berusaha memberikan dorongan kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga

²¹²Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 130.

kemampuan secara intrinsik terdapat dalam diri bawahan yang digabung dengan dorongan dari luar dirinya.²¹³

3. Prinsip Pokok *Human Relation* dalam *Actuating*

Prinsip pokok *human relation* dalam *actuating*, sebagai berikut: sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu anggota organisasi. Manusia mempunyai berbagai kepentingan dan kebutuhan yang tidak dapat dipuaskan dengan bekerja sendirian melainkan dengan jalur organisasi. Dengan demikian harus meyakinkan anggota organisasi, bahwa dengan tercapainya tujuan organisasi, di dalam sudah tercakup pencapaian tujuan pribadi anggota organisasi, suasana kerja yang menyenangkan. Suasana yang dimaksud, adalah tidak terbatas pada masalah sarana dan prasarana kerja yang bersifat fisik, akan tetapi juga dalam arti interaksi dalam satuan kerja. Salahsatu faktor penting diperhatikan dalam suasana kerja ialah pemeliharaan persepsi di kalangan anggota organisasi bahwa mereka diperlakukan secara adil, hubungan kerja yang serasi. Hubungan kerja dapat digolongkan dua kategori, yaitu hubungan formal, dan hubungan informal. Hubungan formal bersifat dominan dalam interaksi atasan dan bawahan yang tergantung dengan gaya manajerial. Dan hubungan informal bersifat menunjang dalam interaksi atasan dan bawahan agar tidak kaku dan terjalin keharmonisan; (d) tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.

Berbeda dari semua sumber daya dan alat produksi dalam organisasi. Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal serta memiliki harkat dan martabat dengan jatidiri yang khas, pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. Penelitian para ilmuwan dan pengalaman para praktisi membuktikan bahwa dalam diri setiap orang terdapat potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan. Misalnya, apabila terjadi musibah kebakaran, orang yang ditimpa musibah itu dapat mengangkat benda yang beratnya melebihi berat benda dalam situasi normal, dan pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Seseorang yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi

²¹³Sondang, P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 131-132.

akan senang menerima tanggungjawab yang lebih besar. Berarti orang demikian, pekerjaan rutin, mekanistik dan refetitif akan tidak disenangi karena dianggapnya membosankan, pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. Untuk mendorong kegairahan kerja di kalangan bawahan, manajer hendaknya cepat mengakui dan menghargai prestasi kerja, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Betapapun besarnya perhatian yang diberikan, arti penting sarana dan prasarana kerja tetap perlu mendapat perhatian. Dedikasi, kemampuan kerja, keterampilan dan niat yang besar untuk mewujudkan prestasi kerja yang tinggi tidak akan besar manfaatnya tanpa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, penempatan tenaga kerja yang tepat. Penempatan yang dimaksud, adalah yang sesuai dengan bakat, kemampuan, keahlian (*skill*), keterampilan dan pengalaman seseorang; dan imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan. Seseorang berkarya dalam organisasi dengan mengerahkan tenaga, kemampuan, pengetahuan, keahlian, waktu, dan pengalamannya dalam melaksanakan tugas dipercayakan kepadanya akan mengharap imbalan yang sesuai.²¹⁴

d. Controlling (Pengawasan)

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan dilakukan pimpinan organisasi.²¹⁵ Menurut Murdick, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; dan menentukan kesenjangan (*deviasi*) antara pelaksanaan dengan standard rencana.²¹⁶

2) Proses Pengawasan

Proses pengawasan terbagi dua tahap, yakni: (a) menetapkan

²¹⁴Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, 137-143.

²¹⁵Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 137.

²¹⁶Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 101.

standar pelaksanaan pekerjaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua jenis dan tingkat pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Umumnya standar pelaksanaan pekerjaan menyangkut kriteria ongkos, waktu, kuantitas dan kualitas; (b) pengukuran hasil/pelaksanaan pekerjaan. Metode koreksinya dapat dilihat dari kalsifikasi fungsi manajemen: perencanaan garis umpan balik proses manajemen dapat berwujud meninjau kembali rencana mengubah tujuan atau mengubah standar, pengorganisasian memeriksa, apakah struktur organisasi yang ada sesuai dengan standar; penataan staf: memperbaiki sistem seleksi, sistem latihan, dan menata kembali tugas; dan pengarahan, mengembangkan kepemimpinan yang baik, meningkatkan motivasi, dan menjelaskan pekerjaan yang sukses.

3) Jenis Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan

Jenis pengawasan di lingkungan pemerintah,²¹⁷ sebagai berikut pengawasan melekat. Efektivitas manajerial seseorang yang menduduki suatu jabatan pimpinan tanpa mempersoalkan tingkatannya dalam jajaran kepemimpinan itu, sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat di samping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi organik. Pengawasan melekat tersebut sangat ditentukan oleh pribadi seseorang dalam menduduki suatu jabatan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, dan dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan di luar instansi dalam lingkungan instansi pemerintah pengawasan oleh lembaga konstitusional. Dalam sistem administrasi Negara terdapat dua lembaga konstitusional yang turut melakukan pengawasan, yakni Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertanggungjawab atas pemeriksaan seluruh keuangan Negara yang dikelola semua aparat yang terdapat dalam lingkungan Negara Republik Inndonesia. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang salahsatu tugasnya adalah melakukan pengawasan sifatnya politis; (d) pengawasan sosial.

²¹⁷Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 199-204.

Dalam satu masyarakat yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Salahsatu bentuknya adalah turutserta mengamati tugas umum pemerintahan, seperti adanya pelayanan kepada masyarakat.²¹⁸

4) Evaluasi Program

Evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Rumusan itu mempunyai tiga implikasi. *Pertama*, evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya sampai dengan berakhirnya pengajaran. *Kedua*, proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Dan *ketiga*, evaluasi menuntut penggunaan alat ukur yang akurat dan bermakna mengumpulkan informasi.²¹⁹

Evaluasi belajar mengajar merupakan bagian integral dalam proses pendidikan. Karena itu harus dilakukan oleh setiap pendidik sebagai bagian dari tugasnya. Secara umum evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemajuan belajar peserta didik yang telah tercapai dalam program pendidikan yang telah dilaksanakannya. Untuk itu diperlukan alat evaluasi yang disusun menurut langkah kerja. Evaluasi pada umumnya mengandung fungsi dan tujuan untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dan menempatkan peserta didik ke dalam situasi belajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik.²²⁰

Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, tujuan evaluasi, antara lain: untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum

²¹⁸Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 204.

²¹⁹Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Cet. VII; PT. Bumi Aksara, 2008), h. 210.

²²⁰Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, h. 212.

dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis, untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu, misalnya, program tahunan, dan kemajuan belajar. Yahya Qohar al-Haj, melihat fungsi evaluasi dari segi peserta didik secara individual dan program pengajaran. Dari segi peserta didik, evaluasi berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses belajar mengajar, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan, member basis laporan kemajuan peserta didik serta menghilangkan halangan atau memperbaiki kekeliruan. Dan dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi member dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik, dan memberikan motivasi belajar peserta didik.²²¹

Islam menginspirasi bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Ada tiga tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia, sebagai berikut: untuk menguji kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya, untuk mengetahui sejauhmana hasil pendidikan wahyu yang telah ditetapkan Rasulullah saw. terhadap umatnya; dan untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu paling bertakwa kepadaNya, manusia sedang dalam iman ketakwaannya, dan manusia yang ingkar kepada ajaran Islam.²²²

Manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan berbagai kelengkapansesuai dengan kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat

²²¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaktif Edukatif: suatu Pendekatan Teoretis Psikologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2005), h. 248.

²²²H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 163.

menata kehidupan di muka bumi dengan baik. Segala kelengkapan itu bersifat potensial. Melalui berbagai tahapan waktu dan perkembangannya ia akan mampu hidup mandiri. Setelah manusia dilahirkan ke dunia ia akan sangat bergantung kepada pihak lain dalam menggunakan dan mengembangkan potensinya itu.²²³

Manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting karena dalam ilmu manajemen dipelajari tentang seni mengelola organisasi, seni berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain serta seni memimpin organisasi. Manajemen pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang telah lama dipelajari, dikaji, dan dijadikan landasan teoretis untuk penelitian. Bahkan manajemen pendidikan telah menjadi kajian khusus untuk pendidikan setingkat magister dan program doktor sehingga terdapat gelar khusus bagi yang mengambil bidang kajian utama manajemen pendidikan, yaitu Magister Manajemen Pendidikan (M.MPd.).²²⁴

Pentingnya kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasional kualitas produk merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar perusahaan.²²⁵

Kontribusi sumber daya manusia (human resources) bermutu terhadap peningkatan mutu pendidikan tidak diragukan lagi baik peningkatan mutu bidang akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik misalnya, untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang merupakan syarat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara dalam bidang non akademik, misalnya untuk meningkatkan mutu manajemen keuangan, manajemen

²²³ Syahidin. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv. 2009, h. 23.

²²⁴ Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h. 7.

²²⁵ M. Nur Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

sarana, manajemen prasarana, manajemen personil, manajemen operasioanal, tata usaha, kesehatan organisasi, dan lain-lain.²²⁶

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penerjemahan kurikulum yang berlaku yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran. Robert Yinger (Sambaugh, 2006), memandang empat bentuk perencanaan yang masing-masing membentuk sebuah siklus (*cycles*), yakni perencanaan tahunan (*school year*), perencanaan term (*term/grading cycle*), perencanaan unit (*unit plan development*), dan perencanaan harian (*daily lessons*).²²⁷

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin (Roger A. Kauffman, 1972). Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan, yakni: perumusan tujuan yang ingin dicapai; pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; dan identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlah selalu terbatas.²²⁸

B. Urgensi dan Manfaat Bidang Keagamaan

Implementasi dalam bidang agama merupakan kewajiban. Bagi umat Islam, tujuan pelaksanaan bidang agama adalah mengetahui pokok-pokok agama Islam, yakni Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam yang dimaksud, adalah: mengucapkan dua kalimat syahadat. Manusia yang belum mengucapkan kalimat ini tidak dapat sebagai seorang muslim. Kalimat syahadat ini adalah “kunci” orang menganut kepercayaan Islam. Karena tanpa syahadat tersebut, manusia tidak dapat dikategorikan sebagai muslim. Orang yang beragama lain dan ingin memeluk Islam harus terlebih dahulu berikrar dengan mengucapkan kalimat ini kemudian ia baru dapat disebut “*Muallaf*”, mendirikan shalat. Mendirikan shalat yang

²²⁶ Maswardi Muhammad Amin, dan Yulianingsih M. *Manajemen Mutu: Aplikasi dalam Bidang Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Mefia Akademi, 2016, h. 38.

²²⁷ Wina Sanjaya. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010, h. 47.

²²⁸ Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 49.

dimaksud, adalah melakukan suatu kewajiban shalat sesuai yang diperintahkan Allah Swt., baik syarat maupun rukunnya sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban tersebut dilakukan lima kali dalam sehari semalam, yakni empat rakaat untuk shalat Isya, dua rakaat untuk shalat Shubuh, empat rakaat untuk shalat Dhuhur, empat rakaat untuk shalat Azhar, dan tiga rakaat untuk Shalat Maghrib. Selain shalat fardu tersebut juga ada shalat sunat yang lebih baik bila dilakukan, berpuasa pada bulan Suci Ramadhan. Puasa yang dimaksud, adalah berpuasa dalam satu bulan penuh pada bulan suci Ramadhan selama 29–30 hari pada siang hari sesuai syariat Islam, membayar zakat. Membayar zakat yang dimaksud, adalah membayar zakat fitrah (diri) sekali setiap tahun, dan zakat mal (harta) apabila cukup *nisab* dan *haul*-nya; dan (e) Melakukan ibadah haji ke Baitullah di Mekkah bagi orang yang mampu. Orang Islam yang dianggap mampu, adalah mampu mental, fisik, dan biaya. Kewajiban ini hanya sekali seumur bagi setiap umat Islam.

Selain Rukun Islam, maka orang yang beragama Islam wajib mengetahui Rukun Iman, yakni: iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah iman kepada Allah, Swt. yakni tiada Tuhan selain Allah. Dia sifatnya Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Apabila ada orang Islam berpaham selain paham ini maka baginya dapat diberikan sebagai orang “musyrik” atau “kafir” menurut ajaran Islam. Iman kepada Allah inilah yang paling dominan membedakan kepercayaan orang Islam dengan kepercayaan agama lain, iman kepada Malaikat-Nya. Selain iman kepada Allah, juga diwajibkan beriman kepada Malaikat. Malaikat yang dimaksud di sini adalah suatu makhluk lain selain manusia yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan tidak terlihat oleh manusia (selain Nabi dan Rasul sesuai kehendak Allah). Nama malaikat ini: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Ridwan, dan Malik. Iman kepada Kitab-KitabNya. Orang Islam juga wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, seperti al-Qur’an. Karena kitab ini juga merupakan pedoman bagi umat Islam, iman kepada Rasul-Rasul-Nya. Orang Islam diwajibkan percaya kepada perkataan dan kerasulan Nabi. Seperti Nabi

Muhammad Saw. adalah Nabi terakhir dan tidak akan ada nabi sesudahnya sampai hari kiamat, iman kepada hari kiamat dan pembalasan. Hari kiamat benar adanya dan akan terjadi. Hal ini menjadi keyakinan umat Islam, dan iman kepada qada, dan qadar. Qada dan qadar yang dimaksud di sini adalah percaya bahwa takdir baik dan buruk itu sudah kehendak Allah Swt.

Apabila semua yang diuraikan tersebut ada pada diri umat Islam, Allah Swt. dapat memberikan predikat kepada orang yang bersangkutan dengan predikat “takwa” sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 102:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۤ وَ لَا تَمُوْنُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.

Perintah dan larangan Allah Swt. wajib dipelajari, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan suatu pengamalan agama Islam yang merupakan Implementasi bidang keagamaan. Dan sebagai orang mukmin pengamalan ajaran Islam wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengabdian kepada Allah Swt.

C. Urgensi dan Manfaat Bidang Sosial Kemasyarakatan

Implementasi bidang sosial kemasyarakatan adalah pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Misalnya, anak-anak terlantar yang ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mendapatkan pertolongan agar mereka dapat hidup seperti anak-anak lainnya. Dan banyak masalah sosial lainnya, seperti mengurangi pengangguran terdidik, upaya pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba, balapan liar, buta huruf, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini penting bagi keluarga untuk membina anak-anaknya sebelum terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan group dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah

barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah, dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang pertama di mana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama pula untuk megajar pada anak iru sebagaimana dengan hidup dengan orang lain.²²⁹

Orang tua di rumah adalah guru dan pembimbing pertama sebelum guru di sekolah mengajarnya. Karena anak yang telah mendapatkan bimbingan dari orang tuanya di rumah kemudian mendapatkan bimbingan di sekolah, maka sikapnya akan berbeda dengan anak yang tidak mendapatkan bimbingan oleh orang tuanya di rumah. Sehingga anak yang mnedapatkan bimbingan tersebut akan menjadi orang yang lebih baik dalam lingkungan sosial kemasyarakatan apabila sudah menjadi remaja dan dewasa.

D. Urgensi dan Manfaat Bidang Profesi

Dalam dunia kerja atau profesi banyak hal yang menjadi perhatian dalam mengimplementasikan profesi. Di antaranya manusia wajib bekerja sesuai dengan keahliannya atau bidangnya agar mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Terkait dengan implementasi bidang profesi tersebut, termaktub dalam QS.Az-Zumar (39): 39:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۤ اَعْمَلُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.

Implementasi bidang profesi wajib memperhatikan kriteria, syarat dan keahlian orang yang akan bekerja dalam suatu sekolah, lembaga dan atau perusahaan. Untuk mendapatkan hasil secara optimal, maka harus setiap calon tenaga kerja dan institusi atau lembaga dan perusahaan yang menerima yenaga kerja wajib memperhatikan hal tersebut di atas. Dan bila hal ini diperhatikan,

²²⁹Abu Ahmadi. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h. 108.

maka kualitas bidang profesi dapat diwujudkan dengan baik. Implikasinya adalah institusi, lembaga dan perusahaan saling berkontribusi dan memberikan manfaat.

BAB VII

URGENSI DAN MANFAAT PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI

A. Urgensi dan Manfaat Bidang Pendidikan

A.1. Psikologi Pendidikan

Secara umum, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkahlaku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia. Psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan manusia dalam hubungannya situasi pendidikan, misalnya, bagaimana cara menarik perhatian peserta didik agar pelajaran dengan mudah dapat diterima, bagaimana cara belajar, dan sebagainya.²³⁰ Dengan demikian dapat memberikan penilaian yang simpatik terhadap orang lain. Penilaian merupakan rangsangan dalam berbagai aktivitas serta pembinaan terhadap peserta didik menemukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Baik guru maupun peserta didik sangat berpaedah untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah dicapai.²³¹

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiah Daradjat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran dan sebagainya merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama sebagaimana yang dikemukakan Zakiah Daradjat, tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang melainkan yang dipersoalkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Dengan ilmu jiwa ini seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini agama

²³⁰ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum: untuk Umum, IAIN, STAIN, PTAIS Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 16.

²³¹ Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 47.

akan menemukan cara teapt dan cocok untuk menanamkannya.²³²

A.2. Sosiologi Pendidikan

Masalah sentral sosiologi pendidikan ialah aspek sosiologi pengembangan pendidikan mengingat aspek pengembangan pendidikan adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidikan denga peserta didik. Pendidik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, dan pendidik dengan masyarakat. Hubungan dan pergaulan sosial ini secara totalitas tumbuh dalam masyarakat yang memberikan pengaruh dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konkrit, di dalam sosiologi pendidikan bukan saja terdapat sosiologi ataupun pendidikan tetapi terdapat suatu ilmu baru, yakni integrasi antara keduanya dengan mempergunakan prinsip sosiologi di dalam proses pendidikan.²³³ Interaksi sosial memerlukan etika dan moral yang mendukungnya. Howard J. Curzer, memiliki teori, yakni aspek yang bermanfaat adalah kenyataan bahwa masyarakat telah menunjukkan dirinya berkomitmen untuk menghapus diskriminasi yang tidak adil.²³⁴

Pendidikan dapat dirumuskan dari sudut normatif, karena pendidikan menurut hakikatnya sebagai peristiwa yang memiliki norma. Artinya bahwa dalam peristiwa pendidikan, pendidik dan peserta didik yang berpegang pada ukuran, norma hidup, pandangan terhadap individu dan masyarakat, nilai-nilai moral, kesusilaan yang semuanya yang merupakan sumber norma di dalam pendidikan. Aspek itu sangat dominan dalam merumuskan tujuan secara umum. Persoalan ini merupakan bidang pembahasan teori ilmu pendidikan, tetapi di samping perumusan secara normatif, pendidikan dapat dirumuskan dari sudut proses teknis. Peristiwa tersebut adalah suatu rangkaian komunikasi antarmanusia, rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi. Satu rangkaian perubahan dan pertumbuhan fungsi jasmaniah, watak, intelek, dan

²³²Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 50.

²³³Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 5-6.

²³⁴Howard J. Curzer, *Ethical Theory and Moral Problems* (London: Wardword Publishing Company, 1999), h. 585.

pertumbuhan sosial.²³⁵

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuhnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Soerjono Sukanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu itu juga dibahas soal tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salahsatu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan berilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak dan akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Mengapa dapat melaksanakakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu dengan Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa tersebut sudah dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Di sinilah letaknya sosiologi sebagai salahsatu alat dalam memahami ajaran agama.²³⁶

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari

²³⁵Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 14.

²³⁶Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 38.

suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa tidak mengacu pada kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen, dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku pada bentuk pemikiran teologis. Karena sifat dasarnya yang partikularistik, maka dengan mudah kita mudah menemukan teologi Kristen, Katolik, teologi Kristen Protestan dan begitu seterusnya. Dan bila diteliti lebih mendalam lagi dalam intern umat beragama tertentu pun masih dapat dijumpai berbagai paham atau sekte keagamaan.²³⁷ Interaktif edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif.

Semua unsur interaktif edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Karena itu interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan (Abu Ahmadi dan Shuyadi: 1985: 47). Proses interaktif edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu, wajarlah jika interaktif edukatif tidak berproses dalam kehampaan tetapi dalam penuh makna. Interaktif edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara perbuatan yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik.²³⁸

Dalam konteks pendidikan, ide-ide atau nilai-nilai dasar itu seharusnya diturunkan ke bawah yaitu ke dalam UUD 1945, Undang-Undang dan secara operasional sampai kepada Peraturan-Peraturan Pemerintah ke bawah. Hanya saja pada tataran yang lebih operasional, ide-ide atau nilai-nilai itu mulai

²³⁷ *Ibid*, h. 28.

²³⁸ Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019, h. 11.

tidak jelas atau menghilang terutama ketika diimplementasikan ke dalam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi di mana keilmuan dan ketakwaan kepada Allah swt belum sepenuhnya menjadi inti atau *core* dalam pengembangan pendidikannya. Akibatnya kurang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis multidimensional sebagaimana keadaan bangsa saat ini.²³⁹

Pendidikan sebagai institusi sosial, jika dilihat dari organisasi pelaksanaannya dapat dikelompokkan ke dalam pendidikan formal, nonformal dan informal. Secara garis besar, ketiga jalur pendidikan tersebut dapat dibedakan: 1) Pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang (Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi), terkait dengan penyiapan seperangkat kemampuan tertentu yang waktunya relatif panjang; 2) Pendidikan nonformal, dapat terstruktur dan berjenjang sebagaimana pendidikan formal, hanya saja programnya terkait dengan kebutuhan prgmentarik (bagian-nagian tertentu); 3) Pendidikan Informal, pendidikan keluarga dan lingkungan, ia mempunyai program tetapi yang diprogramkan bukan isi teksnya. Jadi isi programnya adalah insidental dan lebih berfsifat kasus dehingga tidak wajar diprogramkan adalah lingkungannya, situasinya, sarananya. Iklimnya dan yang semacamnya.²⁴⁰

Pendidikan merupakan suatu proses ketika kemampuan manusia (bakat dan kemampuan diperoleh) hendak dikembangkan secara terus menerus. Kemampuan (bakat) merupakan faktor dasar, sedangkan kemampuan yang diperoleh merupakan faktor sebagai konsekuensi dari interaksi individu dengan lingkungannya. Faktor pertama dalam terminologi para psikolog dikenal dengan istilah "potensi bawaan" (*heredity*), sedangkan faktor kedua dinamakan dengan lingkungan (*environment*). Persoalan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dirumuskan oleh para ahli dengan jawaban yang beragam. Pendapat itu pada pokoknya dapat digolongkan menjadi tiga

²³⁹ Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

²⁴⁰ *Ibid.*, h. 93.

golongan, yaitu pendapat para ahli yang mengikuti aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi.²⁴¹

Sebagai suatu sistem tentu saja interaksi edukatif mengandung sejumlah komponen yang meliputi: 1) Tujuan, kegiatan interaktif edukatif tidaklah dilakukan secara serampangan dan di luar kesadaran. Kegiatan interaksi edukatif adalah suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru melakukan pembuatan program pengajaran dengan prosedur dan langkah-langkah sistematis; 2) Bahan Pelajaran, bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Karena itu guru yang akan mengajar pasti mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik; 3) Kegiatan belajar mengajar, adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses di dalamnya. Komponen inti yakni manusiawi, guru dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas dan tanggungjawab dalam kebersamaan berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran; 4) Metode, adakah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru guna kepentingan pembelajaran; 5). Alat, adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran,. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan; 6) Sumber pelajaran, interaksi edukatif tidaklah berproses dalam kehampaan akan tetapi ia berproses dalam kemaknaan. Di dalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya tetapi diambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam proses interaksi edukatif; dan 7) Evaluasi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang

²⁴¹Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 71.

sejauhmana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar/ Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggali data seperti tese perpuatan, tes tertulis dan tes lisan.²⁴²

Tujuan pendidikan nasional merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan pendidikan dalam jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan tujuan lainnya sebagai tujuan bawahannya. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional masih memerlukan tujuan yang lebih khusus sebagai perantara untuk mencapainya. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki: (1) Tujuan pendidikan nasional, disebut juga tujuan umum adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Tujuan umum inilah yang dijadikan dasar dan pedoman bagi penyusunan kurikulum untuk semua lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi; (2) Tujuan institusional, merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Tujuan ini disesuaikan dengan jenis dan tingkatan sekolah masing-masing. Hasil pencapaian dari tujuan institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu pula. Tujuan institusional ini tercantum dalam kurikulum sekolah/lembaga pendidikan dan menggambarkan secara umum anak didik yang dihasilkan setelah menyelesaikan di suatu sekolah. Setiap jenis dan tingkatan lembaga pendidikan yang berbeda akan menghasilkan anak didik yang berbeda pula. Dengan demikian tujuan institusional madrasah aliyah tidak sama dengan tujuan institusional SMU dan sebagainya; (3) Tujuan kurikuler, disebut juga tujuan kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang-bidang studi; dan (4) Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya

²⁴² Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019, h. 16–20.

berwujud anak didik yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikir dan keterampilan teknologinya. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dari bahan pelajaran pokok bahasan (topik-topik atau sub topik yang akan diajarkan oleh guru).²⁴³

Menurut Mansyur (1991), batasan belajar mengajar yang bersifat umum mempunyai empat dasar strategi, yakni: 1) Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman; 2) Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat; 3) Memilih dan menetapkan prosedur metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar; 4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi kegiatan hasil belajar nmengajar selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Dari keempat uraian tersebut jika diterapkan dalam konteks belajar mengajar, maka strategi belajar mengajar pada dasarnya memiliki implikasi: proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui pembelajaran, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, aspirasi, dan pandangan filosofis masyarakat; memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik mengajar, dan menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar.²⁴⁴

Defenisi para ahli tentang belajar, di antaranya: 1) Skinner (dalam Barlow, 1985), mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif; 2) Hilgard & Bower, dalam bukunya *Theories of Learning* (1975) mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu

²⁴³ Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019, h.

²⁴⁴ Pupu Faturrahman, M. Sobri Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010, h. 3–4.

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon, pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seorang, misalnya; kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya; 3) M. Sobry Sutikno dalam bukunya *Menuju Pendidikan Bermutu* (2004), mengartikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kaki seseorang patah karena terkena benda yang berat yang terjatuh dari atas loteng, ini tidak bisa disebut perubahan hasil dari belajar. Jadi perubahan yang bagaimana yang dapat disebut belajar? Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi secara sadar (disengaja) dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya; 4) C.T. Morgan dalam *Introduction of Psychology* (1962) merumuskan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu; dan 5) Thursan Hakim dalam bukunya *Belajar Secara Efektif* (2002), merumuskan belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian.²⁴⁵

Defenisi para ahli tentang mengajar, di antaranya: 1) Muhammad Ali (1992), mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Oleh karena itu rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam arti membutuhkan rumusan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri; 2) Bohar Suharto (1997), mendefenisikan mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur mengelola lingkungan sehingga tercipta suasana yang sebaik-baiknya dengan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan; 3) Oemar Hamalik (1992), mendefenisikan mengajar sebagai proses

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 5–6.

menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada siswa . Dalam pengertian yang lain juga dijelaskan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan menyangkut pengambilan keputusan.²⁴⁶

B. Urgensi dan Manfaat Bidang Keagamaan

Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatisme ialah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi , kebenaran mistis, semuanya bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah “manfaat bagi hidup praktis.” Sedangkan tujuan pendidikan Barat yang berpaham pragmatisme adalah: 1) pendidikan adalah bentuk pengembangan kecerdasan manusia yang bermanfaat bagi manusia maka manfaat menjadi tujuan pendidikan; 2) Manfaat dan kegunaan pendidikan dapat bersifat teoretis maupun praktis yang mempermudah kehidupan manusia; 3) Kenikmatan, kemakmuran, dan kemuliaan yang diperoleh melalui pendidikan menjadi pusat tujuan pendidikan Barat sehingga pragmatisme dapat melahirkan hedonisme, liberalisme, atheisme, dan yang menyimpang dari substansi pendidikan Islam.²⁴⁷

Tawakkal (berasal dari verba *wakala*) berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain yang disertai dengan keyakinan bahwa ia betul-betul mempunyai sifat kasih sayang terhadap yang memberikan perwakilan dan dapat membimbing yang mewakilkan itu. Frngan pengertian tawakkal dapat dipahami bahwa tawakkal sebagai sikap mental seorang sufi, merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat sepenuhnya kepada Allah. Diyakininya Allah ada dengan sendirinya. Allah menciptakan segala-galanya,

²⁴⁶ *Ibid.*, h. 7.

²⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, dan Hendra Akhdiyati. *Ilmu Pendidikan Islam 1*. Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 196.

pengetahuan-Nya Mahaluas. Karena keyakinannya ia mendorong seseorang sufi menyerahkan urusannya kepada Allah, maka hatinya tenang, tentram, tidak timbul rasa curiga. *Tawakal* terdiri dari tiga tingkatan: Pertama, tingkat *bidayah* (pemula), yakni tawakal pada tingkat hati yang selalu merasa tenteram terhadap apa yang sudah dijanjikan Allah. Kedua, tingkat *muthawassithah* (pertengahan), tawakal pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusan kepada Allah karena yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya. Ketiga, tingkat nihaya (terakhir), yakni tawakkal pada tingkat terjadi penyerahan diri seseorang pada ridha atau merasa lapang menerima segala ketentuan Allah. Tawakal ini menyerah sebulat-bulatnya kepada Allah. Pada tahapan iniseseorang bagaikan berada di depan orang yang memandikannya, ia tidak bergerak dan tidak pula menolak.²⁴⁸

Takwa (berasal dari kata *wiqayah*) berarti terpelihara dari kejahatan, karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkan kejahatan. Dalam Al-Qur'an terdapat kata takwa dalam beberapa pengertian, di antaranya takut (QS. Al-Baqarah: 41), ketaatan dan ibadah (QS. Ali Imran: 102), dan bersih dari dosa (QS. An-Nur:52). Menurut kaum sufi, takwa dalam pengertian terakhirlah yang mereka maksudkan, yakni terpeliharanya hati dari berbagai dosa yang mungkin terjadi karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkannya sehingga mereka terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk (jahat). Al-Ghazali mengatakan bahwa merupakan ketundukan dan ketaatan (manusia) kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibnu Athaillah membagi takwa menjadi dua macam: takwa lahir dan takwa batin. Takwa lahir dilakukan melalui pemeliharaan terhadap huklum-hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya, sedangkan takwa batin dilakukan dengan menanamkan niat suci dan keikhlasan yang murni dalam beramal. Ketakwaan ini tercapai karena adanya dorongan jiwa yang kuat. Dorongan ini menurut mereka terdiri dari peningkatan sikap lapang dada terhadap apa yang sudah dimiliki dan meningkatkan

²⁴⁸Supiana, dan Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 229–230.

kesabaran terhadap yang hilang dari tangnnya. Dasar semua ini adalah keimanan yang kuat dan keikhlasan yang benar.²⁴⁹

Secara umum, ikhlas berarti hilangnya rasa pamrih atas segala sesuatu yang diperbuat. Menurut kaum sufi seperti dikemukakan Abu Zakaryah Al-Anshari, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa lagi. Karena itu jika seseorang masih mengharapkan imbalan dari perbuatannya maka ikhlasnya tidak sempurna bahkan disebut orang yang yang ria. Jadi ikhlas itu bersihnya motif dalam berbuat; semata-mata untuk menuntut ridha Allah tanpa menghiraukan imbalan dari selain-Nya. Darun Al-Nun Al-Misrimengatakan ada tiga ciri orang yang ikhlas, yaitu seimbang sikap dalam menerima pujian dan celaan orang, lupa melihat perbuatan dirinyadan lupa menuntut balasan di akhirat kelas. Sejalan dengan pendapat Dzun Al-Nun, Abu Abbas bin Atha mengatakan bahwa ikhlas adalah perbuatan-perbuatan yang bersih dari maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh pelaku dari perbuatan tersebut.²⁵⁰

C. Urgensi dan Manfaat Bidang Sosial Kemasyarakatan

Adapun model pengembangan interaksi pendidik dan peserta didik dalam penyiapan lulusan yang berakhlak mulia dalam arti luas tersebut, dapat diformulasikan, yakni memposisikan peserta didik sebagai santri. Sebagai santri ia akan berusaha meneladani dan mengikuti jejak gurunya terutama dalam etos belajarnya, etos mengajarnya, etos pengembangan keilmuannya, dedikasinya mauoun etos amaliah personal ibadah sosial dalam perilaku sehari-hari.²⁵¹

D. Urgensi dan Manfaat Bidang Profesi

Urgensi dan manfaat bidang profesi dalam *ukhuwah Islamiyah* adalah untuk memperkuat profesi umat Islam dalam semua bidang profesi dan dapat dimanfaatkan oleh kepentingan kebersamaan dan

²⁴⁹Supiana, dan Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 232–233.

²⁵⁰*Ibid.*, h. 233.

²⁵¹Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.30.

persatuan umat Islam. Dengan profesi yang kuat dan lebih yang dimiliki umat Islam akan berimplikasi pada penguatan persatuan umat Islam itu sendiri.

Dengan demikian bidang profesi akan memberikan kontribusi dalam pembinaan *ukhuwah Islamiyah* di Indonesia dan dunia secara umum termasuk pembinaan toleransi umat beragama, yakni tumbuhnya saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama. *ukhuwah Islamiyah* tersebut dapat menjadi icon pada persatuan-persatuan jenis lainnya.

BAB VIII

URGENSI DAN MANFAAT UKHUWAH ISLAMIYAH

A. Urgensi dan Manfaat Bidang Pendidikan

Pendidikan budi pekerti yang dikembangkan dalam Islam memiliki tiga dimensi: 1) Dimensi ketuhanan (Ilahiyah). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan Tuhannya yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia, seperti sifat-sifat *Ar-Rahman* (nilai kasih), *Ar-Rahim* (nilai sayang), *al-Malik* (nilai kepemimpinan), *al-quddus* (nilai kesucian), *al-salam* (nilai kesejahteraan dan kedamaian), *al-khaliq* (nilai produktivitas dan kreativitas), dan seterusnya yang berhubungan dengan *asmaulu-husna*. 2) Dimensi kemanusiaan (*Insaniyah*). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan sesama manusia yang di dalamnya di tanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti saling menolong atau membantu, hormat-menghormati, saling menanggung, simpati, empati, memiliki tanggung jawab sosial, kepedulian sosial, dan kepekaan sosial. Dan 3) Dimensi kealaman (Alamiyah). Dimensi ini menjelaskan hubungan individu dengan alam semesta karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Nilai-nilai yang ditanamkan pada individu adalah bagaimana ia mampu memelihara, memakmurkan dan memelihara alam ini dengan baik sebagai sarana beribadah kepada-Nya baik terhadap alam abiotik (bebatuan, tambang, air, udara, tanah, api, dan sebagainya) maupun biotik (segala jenis tumbuhan dan hewan).²⁵²

Perbedaan tujuan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional adalah: 1) Pendidikan Islam sumber dan dasar pijaknya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah; 2) Pendidikan nasional sumber dan dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut: "Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

²⁵² Abdul Mujib, dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Jakarta Kencana, 2010, h. XV–XVI.

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengacu pada Pancasila dan UUD 1945; dan 3) Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dijadikan sumber inspirasi dan ide dasar semua pendidikan tidak terkecuali pendidikan nasional.²⁵³

Dalam belajar mandiri, menurut Wedemeyer (1983), peserta didik secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan guru/pendidik di kelas. Peserta didik dapat mempelajari pokok materi tertentu dengan membaca modul atau melihat dan mengakses program *e-learning* tanpa bantuan terbatas dari orang lain. Peserta didik mempunyai otonomi tersebut terwujud dalam beberapa kebebasan: Peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar.²⁵⁴

Kualitas pendidikan setiap individu akan meningkat apabila setiap orang meningkatkan kemampuan belajar dengan cepat sehingga ia diharapkan menjadi pelajar dan pembelajar yang sukses. Pemikiran tersebut mengisyaratkan kepada dunia pendidikan yang terkait untuk melihat berbagai masalah proses pembelajaran yang merupakan tuntutan abad ke 21 menuntut proses pembelajaran yang berbeda dan proses pembelajaran yang bagaimanakah yang sesuai dengan abad tersebut. Perubahan dalam aspek sosial maupun teknologi saat ini telah mengalami percepatan tertinggi sepanjang sejarah manusia. Akumulasi dan percepatan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya menimbulkan formasi dan reformasi struktur sosial ekonomi. Dalam bidang teknologi dan bidang kebudayaan pada umumnya. Percepatan tersebut disebabkan oleh sifat penemuan

²⁵³Beni Ahmad Saebani, dan Hendra Akhdiyati. *Ilmu Pendidikan Islam 1*. Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 196–197.

²⁵⁴Rusman. *Model-Mode Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 353.

yang terjadi karena kombinasi dari penemuan-penemuan sebelumnya, penambahan elemen yang dapat dikombinasikan dan penyebaran temuan yang semakin cepat.²⁵⁵

B. Urgensi dan Manfaat Bidang Keagamaan

Dalam pada itu al-Ghazali membagi umat manusia ke dalam tiga golongan. *Pertama*, kaum awam, yang berpikrnya sederhana sekali. *Kedua*, kaum pilihan yang akal nya tajam dan berpikr secara mendalam. Ketiga, kaum penengkar. Kaum awam dengan daya akal nya yang sederhana sekali tidak dapat menangkap hakikat-hakikat. Mempunyai sifat lekas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sifat memberi nasehat dan petunjuk. Kaum pilihan yang daya akal nya yang kuat dan mendalam harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah, sedang kaum penengkar dengan sikap mematahkan argumen-argumen. Pemikiran al-Ghazali ini memberi petunjuk adanya perbedaan cara dan pendekatan dalam menghadapi seseorang sesuai dengan tingkat dan daya tangkap nya. Pemikiran yang demikian akan membantu dalam merumuskan metode dan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan akhlak.

Dalam pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling dapat memasukkannya ke dalam empat area/bidang garapan bimbingan, yakni: bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses bantuan kepada individu agar dapat memahami dan menerima dirinya secara positif dan mengarahkannya secara konstruktif untuk mencapai kematangan pribadi yang mandiri. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi terkait dengan pengembangan karakter personal, yaitu siswa mampu mengaktualisasikan karakter berikut dalam kehidupan sehari-hari: kejujuran, kedisiplinan, *self-respect*, *self-control*, komitmen, kompeten, daya juang, dan estetika. Bimbingan dan konseling sosial adalah proses bantuan kepada individu (siswa) agar dapat memahami norma, aturan atau adat yang dijunjung tinggi di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma tersebut secara positif dan

²⁵⁵*Ibid.*, h. 357.

konstruktif. Bimbingan dan konseling akademik (belajar) adalah proses bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman, sikap dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Bimbingan dan konseling karir adalah proses pemberian bantuan kepada siswa agar memiliki kemampuan untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan kariernya.²⁵⁶ Hal tersebut ada kaitannya dengan jiwa manusia.

Jiwa yang diilhamkan kepada kebaikan akan memberi pedoman hidup manusia dalam beragama melalui tingkah-laku. Fungsi dan peran agama akan memberi pengaruh terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi, maupun membentuk kata hati (*conscience*).²⁵⁷

Orang yang mencapai aktualisasi diri memiliki karakteristik berikut: persepsi yang efisien tentang realitas, mereka menilai situasi secara akurat dan jujur serta memperhatikan kebohongan dan ketidakjujuran; penerimaan: diri, orang lain, dan lingkungan. Mereka menerima kekurangan diri sendiri, juga kelemahan orang lain serta pertentangan hidup, spontanitas: mereka tidak dapat dilarang, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, aktif dan terlibat, orientasi tugas: mereka mempunyai misi, tugas, tujuan, atau masalah di luar diri pribadi yang harus diselesaikan, otonomi: mereka relatif bebas ikatan budaya, banyak akal dan tidak tergantung pada orang lain atau otoritas luar, selalu menghargai kehidupan: mereka memiliki keluguan visi seorang anak, terus memperbaharui rasa menghargainya terhadap anugerah kehidupan, keterikatan dengan kemanusiaan: mereka mengidentifikasi secara dalam dengan kondisi manusia dan dengan orang lain secara umum; (h). Hubungan interpersonal yang dalam: mereka memiliki ikatan-ikatan dalam, mencintai dengan sedikit

²⁵⁶Syamsu Yusuf L.N., dan Nani M. Sugandhi. *Perkembangan Peserta Didik: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 39–40.

²⁵⁷Baharuddin. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 29.

orang yang terpilih, selera humor yang tidak menyinggung: mereka bisa mentertawai diri sendiri dan kejadian-kejadian hidup yang menggelikan dan pengalaman puncak (mistis atau oseanik): terjadi secara berkala.²⁵⁸

Kekuatan alamiah dan kesenangannya merujuk pada makan, tidur dan sebagainya. Seorang pencari harus melalui tahapan ini dan memisahkan ciri-ciri manusia dari tingkah laku yang dapat dikenali pada binatang dan tumbuhan. Seorang pencari harus disiplin pada dirinya sendiri agar ambil bagian dengan jumlah minimum dalam makanan dan insting alamiah lainnya.

C. Urgensi dan Manfaat Bidang Sosial Kemasyarakatan

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi atau kondisi), fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu terhadap perkembangan anak. Dalam salahsatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw. Bersabda: *“Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanyalah membuat ia menjadi Yahudi (jika mereka Yahudi), Nasrani (jika mereka Nasrani, atau Majusi (jika mereka Majusi). Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir”* (Aliah B. Purwakaniah Hasan, 2006).²⁵⁹

Orang tua mempunyai peranan sangat penting bagi tumbuh-kembangnya anak sehingga menjadi pribadi yang sehat, terampil, mandiridan berakhlak mulia. Seiring dengan fase perkembangan anak maka peran orang tua juga mengalami perubahan. Menurut Hamner dan Tunner (Adiasari TA, 2008: 8), peranan orang tua yang sesuai dengan fase perkembangan anak adalah; 1) pada masa bayi berperan sebagai perawat; 2) pada masa kanak-kanak sebagai pelindung; 3) pada usia pra sekolah sebagai pengasuh; 4) pada masa sekolah dasar sebagai pendorong; dan 5) pada masa

²⁵⁸ Lynn Wilcox. *Psikologi Kepribadian: Analisis Kepribadian Manusia*. Cet. II; Yogyakarta; IRCiSoD, 2013, h. 302.

²⁵⁹ *Ibid.*, h. 259.

pra remaja dan remaja berperan sebagai konselor.²⁶⁰

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi atau kondisi), fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu terhadap perkembangan anak. Dalam salahsatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw. Bersabda: *“Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanyalah membuat ia menjadi Yahudi (jika mereka Yahudi), Nasrani (jika mereka Nasrani, atau Majusi (jika mereka Majusi). Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir”* (Aliah B. Purwakaniah Hasan, 2006).

Orang tua mempunyai peranan sangat penting bagi tumbuh-kembangnya anak sehingga menjadi pribadi yang sehat, terampil, mandiridan berakhlak mulia. Seiring dengan fase perkembangan anak maka peran orang tua juga mengalami perubahan. Menurut Hamner dan Tunner (Adiasari TA, 2008: 8), peranan orang tua yang sesuai dengan fase perkembangan anak adalah pada masa bayi berperan sebagai perawat, pada masa kanak-kanak sebagai pelindung, pada usia pra sekolah sebagai pengasuh; 4) pada masa sekolah dasar sebagai pendorong, dan pada masa pra remaja dan remaja berperan sebagai konselor.

Kompetensi sosial dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan pengalaman belajar, yakni: berkomunikasi secara efektif dan empatik denganm pesertadidik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global; dan memanfaatkan tekhnologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi mengembangkan diri.²⁶¹

²⁶⁰ *Ibid.*, h. 24.

²⁶¹ Abdul Hadis, dan Nurhayati, B. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, cv., 2014, h. 29.

D. Urgensi dan Manfaat Bidang Profesi

Dalam pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling dapat memasukkannya ke dalam empat area/bidang garapan bimbingan, yakni bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses bantuan kepada individu agar dapat memahami dan menerima dirinya secara positif dan mengarahkannya secara konstruktif untuk mencapai kematangan pribadi yang mandiri. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi terkait dengan pengembangan karakter personal, yaitu siswa mampu mengaktualisasikan karakter berikut dalam kehidupan sehari-hari: kejujuran, kedisiplinan, *self-respect*, *self-control*, komitmen, kompeten, daya juang, dan estetika. Bimbingan dan konseling sosial adalah proses bantuan kepada individu (siswa) agar dapat memahami norma, aturan atau adat yang dijunjung tinggi di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma tersebut secara positif dan konstruktif. Bimbingan dan konseling akademik (belajar) adalah proses bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman, sikap dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Bimbingan dan konseling karir adalah proses pemberian bantuan kepada siswa agar memiliki kemampuan untuk dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangan kariernya.

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kode diartikan sebagai tanda dalam bentuk kata-kata tulisan ataupun gambar yang telah disepakati dengan maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan suatu hal. Kode juga dapat diartikan dengan dua pengertian. Kode adalah kumpulan peraturan yang bersistem; dan 2) Kode adalah prinsip yang bersistem. Pada kamus besar bahasa Indonesia, etik diartikan dalam dua pengertian berikut ini. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Etik adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pada dasarnya etik pada asas-asas atau nilai-nilai yang harus dipahami dan diperbuat oleh seseorang dalam organisasi tertentu yang ia ikuti. Sedangkan etiket pada dasarnya merujuk pada tata cara dalam suatu masyarakat yang beradab yang ditujukan untuk memelihara hubungan sesama manusia. Dan kata

“profesi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*profession*” yang berarti *accopation requiring education, and career* atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pelatihan dan karir. Jadi mudahnya profesi bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan berjejnjang karir yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan dalam melakukannya. Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia, kode etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok orang (tertentu) sebagai landasan tingkah-lakunya. Jadi kode etik profesi adalah norma atau asas yang diterima oleh sekelompok pekerja sebagai landasan tingkah-lakunya dalam bekerja dalam suatu organisasi atau lembaga. Misalnya, kode etik profesi jurnalis, kode etik profesi advokat, kode etik profesi pustakawan, kode etik profesi kedokteran, kode profesi keguruan, dan lainnya.²⁶²

Setiap orang yang bekerja di dalam suatu organisasi akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasinya, ketika tujuan organisasi tercapai maka tercapailah tujuan pribadi setiap orang yang ada di organisasi tersebut. Kemudian jika ada seseorang yang tidak mau bekerja sama dan hanya bekerja untuk tujuan pribadinya, maka ia dapat menghambat pencapaian tujuan organisasinya. Untuk menghindari terjadinya hal itu, maka disusunlah kode etik profesi dengan tujuan agar semua orang yang ada dalam suatu organisasi profesi dapat saling bekerja sama untuk mmencapai tujuan organisasi yang telah mereka sepakati. Tujuan umum ditetapkan kode etik mprofesi adalah untuk menjunjung tinggi martabaty suatu profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejateraan anggota organisasi profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota organisasi profesi, untuk meningklatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi, untuk mencipatan organisasi profesi yang kuat, untuk mencipatakan hubungan yang harmonis antar anggota-anggota organisasi profesi, dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota

²⁶²Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media: 2015, h. 15–16.

organisasi profesi. Dan untuk menentukan suatu standar kinerja anggota organisasi profesi.²⁶³

Fungsi kode etik profesi, antara lain: memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan, profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan. Kode etik profesi menjadi sesuatu yang harus ada dalam suatu organisasi profesi. Jika tidak ada kode etik profesi maka tidak ada asas atau nilai yang dapat dijadikan oleh setiap anggota organisasi profesi. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Seperti yang telah dikaji di atas bahwa kode etik profesi memiliki fungsi sebagai pemberi pedoman bagi anggota organisasi profesi dalam berbuat baik. Mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Agar kode etik profesi dapat berfungsi dengan baik maka ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri. Hal itu penting agar muncul kesadaran untuk melaksanakan kode etik tersebut tanpa ada keterpaksaan. kode etik harus menjadi hasil pengaturan diri (*self-regulation*) dari profesi tersebut, ini berarti kode etik profesi yang menguntungkan organisasi profesinya dan masyarakat umum; dan pelaksanaan kode etik harus diawali secara terus menerus dengan prosedur-prosedur yang humanis.²⁶⁴

²⁶³Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media: 2015, h. 17.

²⁶⁴Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media: 2015, h. 21–23.

BAB IX

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI

A. Faktor Pendukung dan Penghambat Bidang Pendidikan

Faktor pendukung dan penghambat bidang pendidikan, yakni:

1) Faktor Pendukung Bidang Pendidikan

Adapun faktor pendukung bidang pendidikan dalam implementasi Korelasi Pendidikan Agama Islam dengan *Majelis Taklim* dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah: (a) Banyaknya penduduk yang beragama Islam. Kita ketahui bahwa warga masyarakat atau penduduk setempat memberikan kontribusi yang besar dalam menumbuhkan jiwa agama kepada anak usia dini, remaja dan orang dewasa; (b) Banyaknya alumni PAI dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Kita menyadari bahwa apabila Guru PAI sangat kekurangan di sekolah maka akan berdampak negatif pada upaya menumbuhkan jiwa agama kepada peserta didik. Sebaliknya, dengan tidak kekurangannya Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah memberikan dampak positif, yakni banyaknya dari mereka yang bersedia membimbing peserta didik di sekolah; (c) Banyaknya lembaga pendidikan Islam nonformal khususnya Majelis Taklim. Terutama di daerah perkotaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan lainnya. Di kota ini banyak kita jumpai Majelis Taklim; dan (d) Banyaknya peserta didik yang dapat dijadikan obyek menumbuhkan jiwa agama (Islam). Beberapa faktor ini menjadi faktor pendukung bidang pendidikan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam.

2) Faktor Penghambat Bidang Pendidikan

Adapun faktor penghambat bidang pendidikan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Kurangnya dana untuk honorarium Guru Agama Pendidikan Agama Islam di sekolah. Kita ketahui bahwa di setiap sekolah negeri maupun swasta saat ini umumnya memiliki tenaga honorarium atau tenaga sukarela/sosial atau semacamnya dengan itu yang mengabdikan diri

kepentingan pendidikan. Namun juga diketahui bahwa umumnya mereka mendapatkan gaji/honorarium yang nominalnya terbilang “kecil” bahkan “sangat kecil” untuk biaya hidup dalam sebulannya. Mereka tidak dapat berbuat banyak tentang hal ini. Namun hal ini berdampak pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Jika seorang guru tidak cukup biaya memiliki kendaraan termasuk biaya bahan bakarnya, maka apakah hal ini menjadi daya dukung atau menjadi penghambat. Tentunya hal ini menjadi penghambat dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama; (b) Karena pengaruh media sosial, banyak peserta didik lebih berminat memperhatikan media sosial yang kontennya berisi hiburan dibandingkan dengan pengetahuan agama; (c) Sebagian Guru Agama Islam belum memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat mengajar secara optimal. Misalnya, penguasaan ayat al-Qur’an dan hadis sehubungan dengan materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik di kelas. Banyak Guru Pendidikan Agama Islam tidak mampu mengaplikasikan pola dan metode mengajar sehingga banyak peserta didik tidak dapat menerima pelajaran dengan baik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bidang Keagamaan

Faktor pendukung dan penghambat bidang keagamaan, yakni:

1) Faktor Pendukung Bidang Keagamaan

Adapun faktor pendukung bidang keagamaan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Banyaknya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Majelis Taklim sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendirikan bangunan tersendiri atau menyewa suatu tempat. Sehingga secara finansial menguntungkan bagi kegiatan Majelis Taklim. Di samping itu juga banyak peserta Majelis Taklim rumahnya bersedia di tempati menjadi acara kegiatan Majelis Taklim secara bergilir; (b) Adanya support dari Guru Agama Islam ketika peserta didik di sekolah mengikuti ceramah agama yang dilakukan oleh ustad karena banyak materi ceramah berkaitan dengan pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah; dan (c)

Orang tua peserta didik di sekolah menyambut baik kehadiran Majelis Taklim yang banyak melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya.

2) Faktor Penghambat Bidang Keagamaan

Adapun faktor penghambat bidang keagamaan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Banyak peserta didik di sekolah dan orang tua peserta didik tidak menguasai membaca al-Qur'an dengan benar sehingga bila dirangkaikan dengan baca tulis al-Qur'an memiliki kendala; (b) Pemanfaatan ustad pada Majelis Taklim terkadang seperti acara seremonial semata sehingga kesan ta'lim dan ta'dib-nya kurang; dan (c) Acara kegiatan Majelis Taklim terkesan identik dengan acara arisan. Dan memang secara fakta banyak anggota Majelis Taklim ingin ber-Majelis Taklim karena dirangkaikan dengan arisan ibu-ibu.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bidang Sosial

Kemasyarakatan

Faktor pendukung dan penghambat bidang sosial kemasyarakatan, yakni:

1) Faktor Pendukung Bidang Sosial Kemasyarakatan

Adapun faktor pendukung bidang sosial kemasyarakatan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Tidak adanya warga masyarakat yang keberatan dengan adanya penyelenggaraan Majelis Taklim. Kita ketahui bahwa warga masyarakat yang beragama Islam terutama di kompleks-komplek perumahan apabila ada tetangga yang rumahnya di tempati acara Majelis Taklim, maka ia merasa keberatan. Bahkan banyak kita jumpa merasa senang. Ini sebagai indikator bahwa lingkungan sosial suka dengan adanya Majelis Taklim sepanjang tidak mengganggu ketenangan tetangga; (b) Pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) siap menugaskan Penyuluh Agama Islam sebagai Pemateri / Narasumber pada acara Majelis Taklim, dan (c) Guru Agama Pendidikan Islam di sekolah banyak bersedia

siswanya dibimbing oleh Penyuluh Agama Islam di luar jam sekolah untuk penguatan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.

2) Faktor Penghambat Bidang Sosial Kemasyarakatan

Adapun faktor penghambat bidang sosial kemasyarakatan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Terutama warga masyarakat yang banyak disibukkan dengan pekerjaan kurang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Majelis Taklim sehingga upaya menumbuhkan jiwa agama tidak dapat dilakukan melalui majelis taklim. Padahal warga masyarakat seperti ini sangat potensial menjadi peserta mengingat potensi yang dimiliki dapat membantu eksistensi Majelis Taklim; (b) Hampir tidak ada Guru Pendidikan Agama Islam berkolerasi dengan Pengurus Majelis Taklim secara bersama-sama menumbuhkan jiwa agama kepada peserta didik di sekolah maupun anggota majelis taklim, dan (c) Pendanaan Majelis Taklim belum seperti pendanaan di sekolah seperti Dana BOS, sehingga berjalan tidaknya suatu Majelis Taklim bukan karena dana dari pemerintah akan tetapi swadaya anggota Majelis Taklim. Sehingga anggota Majelis Taklim jika tidak memberikan kontribusi, maka bisa saja Majelis Taklim tidak dapat lagi berjalan seperti biasanya, terutama untuk honorarium/biaya transpor ustad yang diundang.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Bidang Profesi

Faktor pendukung dan penghambat bidang profesi:

1) Faktor Pendukung Bidang Profesi

Adapun faktor pendukung bidang sosial kemasyarakatan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Banyak anggota Majelis Taklim senang dengan informasi tentang dunia kerja terutama dengan informasi lowongan pekerjaan tetap bagi anak-anak mereka yang sudah sarjana; (b) Ada lulusan SLTA dan Sarjana ingin mengikuti ceramah para ustad di Majelis Taklim untuk dapat menambah pengetahuan agama mereka karena mereka tidak memiliki waktu luang untuk belajar pada lembaga pendidikan keagamaan formal lainnya; dan (c) Adanya Majelis Taklim dapat

memperkuat profesi bimbingan keagamaan bagi ustad dan tenaga pendidik dalam bidang agama yang merupakan pokok profesi mereka dalam mengembangkan misi pendidikan dan dakwah kepada warga masyarakat muslim.

2) Faktor Penghambat Bidang Profesi

Adapun faktor penghambat bidang sosial kemasyarakatan dalam implementasi korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Majelis Taklim dalam menumbuhkan jiwa agama, adalah (a) Banyak warga masyarakat yang beragama Islam tidak mengintegrasikan Majelis Taklim dengan dunia profesi. Majelis Taklim dianggap hanya sebagai pertemuan silaturahmi dengan rekan-rekan seprofesi atau teman sejawat, tidak lebih dari hal tersebut sehingga eksistensi Majelis Taklim hanya stagnan pada urusan agama saja. Padahal potensi majelis taklim memiliki potensi dunia kerja atau profesi yang dapat dikembangkan selanjutnya; (b) Adanya berbagai macam kesibukan para anggota Majelis Taklim sehingga untuk mencari waktu kegiatan yang sama tidaklah mudah walaupun itu dilakukan pada hari Sabtu atau Ahad karena alasan tidak mau meninggalkan profesi yang dianggap lebih penting; dan (c) Kebanyakan ibu tertarik dengan materi yang bersifat karir atau profesi sehingga materi pokok terkadang kurang diperhatikan. Padahal eksistensi Majelis Taklim tujuan utamanya adalah wadah untuk menambah pengetahuan agama sesuai yang di sunnahkan Rasulullah Saw.

BAB X ASPEK PENUNJANG PROSESI KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM

A. Aspek Manajemen Pendidikan

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam buku *Perencanaan Pendidikan*, yang ditulis oleh Sarbini dan Neneng Lina. Bintoro Tjokroaminoto, yang mengemukakan tahapan dalam suatu proses perencanaan.²⁶⁵ Peneliti menjadikan acuan dalam proses perencanaan implementasi pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal khususnya pada pendidikan keagamaan khususnya Majelis Taklim sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana, yang terdiri atas unsur: (a) tinjauan keadaan; (b) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana; (c) penetapan tujuan rencana (dan pemilihan cara pencapaian tujuan rencana; (d) identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; dan (e) peresetujuan rencana. Unsur penyusunan rencana dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi pendidikan keagamaan khususnya majelis taklim.

Penyusunan rencana tersebut, yakni: 1) tinjauan keadaan, yakni suatu lembaga pendidikan keagamaan yang akan diselenggarakan terlebih dahulu dilakukan peninjauan yang terkait dengan situasi di lapangan, apakah tepat dan sesuai diselenggarakan atau tidak. Apabila peninjauan keadaan dinilai tepat dan sesuai maka proses penyusunan rencana selanjutnya dapat dilakukan; 2) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*), yakni dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, harus ada perkiraan masa tenggang waktu yang akan digunakan dalam penyusunan rencana. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui sangat menentukan keberhasilan suatu penyusunan rencana; dan 3) penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara pencapaian tujuan, yaitu

²⁶⁵Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, h. 139-140.

penyusunan rencana pendidikan keagamaan yang akan dilakukan harus memiliki tujuan agar penyusunan rencana memiliki arah yang jelas; 4) identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana, yakni kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan rencana pendidikan keagamaan, terlebih dahulu harus diidentifikasi kebijakannya agar substansi penyusunan rencana pendidikan keagamaan diketahui oleh penyusun rencana tersebut; 5) persetujuan rencana, yakni penyusunan rencana pendidikan keagamaan yang ada harus disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam penyusunan rencana agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Satu atau dua orang yang tidak setuju dalam penyusunan rencana pendidikan keagamaan dapat mempengaruhi keberhasilan bahkan membatalkan penyusunan rencana tersebut.

b. Penyusunan Program Rencana

Penyusunan program rencana, yakni melakukan suatu perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan agar mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flow chart* atau *network planning*.

Unsur penyusunan program rencana jika dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Keagamaan (Majelis Taklim): (1) melakukan perumusan yang terperinci, yakni penyusunan program rencana pendidikan keagamaan, rumusannya diuraikan secara terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu sesuai yang diperlukan dalam penyusunan program rencana; (2) perincian jadwal kegiatan, dan jumlah pembiayaan. Penyusunan program suatu rencana pendidikan keagamaan harus memiliki jadwal kegiatan agar proses pelaksanaan rencana dilakukan secara tertib dan teratur. Dan jumlah pembiayaan harus diketahui agar program perencanaan dilakukan transparan dan akuntabilitas; dan (3) pengesahan rencana, yakni penyusunan program rencana yang telah disetujui seyogyanya mendapatkan pengesahan dari pengurus/pejabat yang berwenang agar penyusunan program rencana memiliki legalitas.

c. Pelaksanaan Rencana

Dalam pelaksanaan suatu operasi perlu dipertimbangkan kegiatan pemeliharaan. Kebijakan harus diikuti dengan implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian. Unsur pelaksanaan rencana tersebut jika dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi pendidikan keagamaan: (1) perlunya pertimbangan kegiatan pemeliharaan, yakni pelaksanaan suatu rencana pendidikan keagamaan harus memiliki pertimbangan untuk memelihara perencanaan tersebut agar dapat terlaksana dengan stabil dan kontinyu; dan (2) kebijakan harus diikuti implikasi pelaksanaannya, yakni kebijakan yang telah ditetapkan pengurus/pejabat berwenang mewujudkan dan menjabarkan pelaksanaan rencana agar adanya kesesuaian program dan implementasinya.

d. Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana. Tujuan pengawasan adalah: (1) mengusahakan agar pelaksanaan berjalan sesuai yang ditetapkan; (2) apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui penyebab penyimpangan tersebut; dan (3) dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk ini, diperlukan suatu sistem monitoring dan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik dari pelaksanaan rencana.

Unsur pengawasan atas pelaksanaan rencana jika dikaitkan dengan proses perencanaan implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan keagamaan, yakni (1) mengusahakan pengawasan atas pelaksanaan rencana pendidikan keagamaan agar berjalan sesuai yang ditetapkan. Tanpa pengawasan, pelaksanaan dapat menimbulkan penyimpangan dan ketidakseriusan; 2) apabila terdapat suatu penyimpangan pelaksanaan rencana pendidikan keagamaan yang sedang berjalan, perlu diketahui penyebab penyimpangan pelaksanaannya, dan 3) melakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan rencana pendidikan keagamaan.

e. Evaluasi Perencanaan

Evaluasi kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan hasil evaluasi perencanaan dapat dilakukan

perbaikan untuk perencanaan selanjutnya atau penyesuaian dalam pelaksanaannya. Unsur evaluasi perencanaan dikaitkan proses perencanaan implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan keagamaan khususnya Majelis Taklim: (1) pelaksanaan evaluasi pendidikan keagamaan dilakukan secara kontinyu. Karena evaluasi dilaksanakan secara terputus memberikan ruang terputusnya kegiatan evaluasi yang berdampak pada terputusnya kegiatan korektif perencanaan pendidikan keagamaan yang sedang berjalan, dan (2) hasil evaluasi perencanaan pendidikan keagamaan dapat dilakukan perbaikan selanjutnya. Artinya, perencanaan pendidikan keagamaan setelah dievaluasi, terbukti ditemukan kekurangan di dalamnya, maka diperlukan koreksi dan selanjutnya diadakan perbaikan untuk proses pelaksanaan perencanaan pendidikan keagamaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut pendapat Ernest Dale, yang dikutip Nanang Fattah dalam buku *Landasan Manajemen Pendidikan*, bahwa pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlandaskan jamak yang terdiri dari rincian kerja, pembagian kerja, penyatuan suatu pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan monitoring dan reorganisasi.²⁶⁶ Peneliti menjadikan acuan dalam proses perencanaan implementasi pendidikan keagamaan khususnya pada Majelis Taklim, sebagai berikut:

a. Rincian Pekerjaan

Tahap pertama yang harus dilakukan merinci suatu pekerjaan dalam organisasi pendidikan keagamaan adalah menentukan tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Rincian pekerjaan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam organisasi pendidikan keagamaan. Sebab pelaksana organisasi mengetahui jenis pekerjaan, beban kerja yang harus diemban dan merupakan tanggungjawabnya. Suatu organisasi yang tidak merinci pekerjaan akan mengakibatkan organisasi tidak memiliki arah rencana kerja sehingga para anggota organisasi pendidikan keagamaan tidak memiliki pedoman yang jelas. Untuk itu, sebelum pembagian kerja

²⁶⁶Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 72.

dilakukan, terlebih dahulu menetapkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan sehingga para anggota mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukannya.

b. Pembagian Kerja

Tahap kedua yang harus dilakukan dalam pembagian pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi pendidikan, tidak membebani pekerjaan terlalu berat dan juga terlalu ringan. Pembagian kerja organisasi pendidikan keagamaan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Misalnya, pembagian kerja bidang pendidikan, dakwah, pendanaan, sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

Pimpinan dalam suatu organisasi pendidikan keagamaan seyogyanya secara cermat agar memperhatikan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan integritas para pelaksana. Dan mempertimbangkan bakat dan minat bagi orang yang diserahi tugas. Misalnya, seorang yang berminat berperan sebagai Penceramah Agama karena alasan honorariumnya tinggi bila dibandingkan honorarium profesi lainnya. Namun bakat yang dimiliki dan kompetensinya lebih menguasai bidang lainnya, pembagian kerja untuk orang seperti ini tidak tepat sebagai Penceramah Agama meskipun keinginannya sangat menggebu.

c. Penyatuan Pekerjaan

Tahap ketiga yang dilakukan dalam menyatukan suatu pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan jika organisasi telah membesar atau kompleks. Penyatuan pekerjaan sangat diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan dan memerlukan pekerjaan bersifat kolejial. Perlu dipahami bahwa tidak semua organisasi pendidikan keagamaan mengutamakan penyatuan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan, apakah efektif atau tidak apabila penyatuan

pekerjaan dilakukan. Misalnya, beberapa pekerjaan disatukan untuk dikerjakan satu orang dalam rangka efisiensi.

d. Koordinasi Pekerjaan

Tahap keempat yang dilakukan dalam kegiatan koordinasi suatu pekerjaan organisasi pendidikan keagamaan adalah menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap orang dan bagian melaksanakan aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota. Dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi pendidikan keagamaan untuk tetap bekerja efektif, bahwa kegiatan koordinasi pada pendidikan keagamaan memiliki manfaat ganda, yakni di samping berfungsi sebagai pengawasan, motivasai, musyawarah kerja, penataan, juga sebagai ajang silaturahmi sesama pelaksana dalam suatu organisasi. Fungsi silaturahmi ini dapat menghilangkan konflik yang sering timbul dalam unit kerja pendidikan keagamaan berkaitan dengan urusan pekerjaan.

B. Aspek Koordinasi dengan Pemerintah

Seorang penyelenggara organisasi pendidikan keagamaan yang baik, adalah ketika melakukan koordinasi pekerjaan dan menetapkan mekanisme kerja yang dilandasi keharmonisan sesama anggota organisasi. Dan apabila terdapat perbedaan pendapat bahkan konflik yang timbul, maka melalui koordinasi pekerjaan dapat dimusyawarkan untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam organisasi pendidikan keagamaan yang diselenggarakan. Koordinasi pekerjaan juga berfungsi untuk mengetahui semua aktivitas seluruh anggota organisasi termasuk hasil kegiatan yang telah dilakukannya. Dan dapat menjadi perbandingan anggota organisasi yang satu dengan anggota organisasi lainnya atas kedisiplinan dan prestasi kerja. Misalnya, ada anggota organisasi tidak disiplin dan didalam pertemuan koordinasi pekerjaan, kedisiplinan sering dibahas dan menjadi permasalahan yang esensial, maka anggota organisasi yang tidak disiplin, tentunya diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinanya dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

e. Monitoring dan Reorganisasi

Tahap kelima yang dilakukan dalam pendidikan keagamaan adalah melakukan monitoring dan mengambil suatu langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang harus dipertahankan dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram/ berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien.

Kegiatan monitoring dalam organisasi pendidikan keagamaan diperlukan untuk memantau semua aktivitas dalam organisasi untuk mengetahui perilaku dan hasil kerja para anggota organisasi. Karena tanpa monitoring dalam organisasi dapat menimbulkan aktivitas yang menyimpang dari perencanaan organisasi akibat bebas dari pantauan pimpinan. Dan reorganisasi merupakan upaya organisasi untuk dapat mempertahankan dan *sustainability* organisasi dalam jangka waktu yang lama. Untuk mewujudkan reorganisasi yang baik, maka seluruh anggota organisasi pendidikan keagamaan harus patuh dan mengindahkan proses organisasi.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam proses pelaksanaan pendidikan keagamaan, seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ayat 1), setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (ayat 3), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (ayat 4), dan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (ayat 5).²⁶⁷

Dalam melakukan proses pelaksanaan pendidikan keagamaan yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi:

a. Penyelenggaraan Pendidikan

Proses implementasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan khususnya pada majelis taklim, umumnya diselenggarakan oleh warga masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi indikator bahwa warga masyarakat telah menerima implementasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah swt.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan keagamaan lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau pada perkumpulan kemudian berkembang menjadi satuan pendidikan dan program pendidikan keagamaan formal, nonformal dan informal.

Pasal 30 ayat (1), ditekankan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan tersebut termasuk pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat memerlukan layanan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan seyogyanya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar tetap antusias dan optimis

²⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945: yang Sudah Diamandemen* (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h.22-23.

menyelenggarakan lembaga pendidikan keagamaan. Avisabilitas pendidikan keagamaan patut memperoleh prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menganut paham religius cukup tinggi. Apabila pendidikan keagamaan tidak diselenggarakan, maka substansi ajaran agama tidak memiliki asedensi di dalam masyarakat. Dan pencapaian dan *susnaibility* mutu pendidikan Islam tidak dapat terwujud secara komprehensif.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003, terdapat pada Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²⁶⁸ Penyelenggaraan pendidikan keagamaan tidak dapat diselenggarakan dengan sistem otoriter dan kemauan pejabat tertentu, akan tetapi melibatkan komponen masyarakat agar terhindar dari unsur diskriminatif. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang kredibel, akuntabel, dan berkesinambungan.

Dan, Pasal 4 (ayat 4), dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan keagamaan diselenggarakan disertai dengan sikap keteladanan baik oleh penyelenggara negara, dan masyarakat penyelenggara pendidikan keagamaan agar menjadi panutan dalam masyarakat. Membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik harus menjadi prioritas penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam proses belajar mengajar. Dan membangun kreativitas sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

²⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 6.

Pendidikan Nasional, menjadi eksotik dalam masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan keagamaan eksis memberikan warna edukatif dan menghindari deviasi keagamaan, seperti munculnya agama baru, dan sejenisnya. Peluang penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang telah diberikan pemerintah, harus tetap diapresiasi oleh tokoh agama, akademisi, dan masyarakat. Apresiasi ini tidak cukup dengan menganalisis penyelenggaraan pendidikan yang berkembang saat ini, akan tetapi juga memiliki kepedulian berpartisipasi secara langsung dengan mengkonstruksi suatu penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar terbangun secara optimal dan berkesinambungan.

Aktualisasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan dibarengi dengan afiliasi pemerintah dan masyarakat agar tercipta keharmonisan dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan termasuk pendidikan keagamaan di dalamnya. Secara faktualisasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak sedikit lembaga pendidikan keagamaan mengalami hambatan, di antaranya; adalah masalah pengurusan pada instansi terkait yang memerlukan waktu cukup lama, pendanaan yang kurang memadai sehingga masyarakat berpikir dan kurang antusias untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Untuk itu, aspek sinkronisasi diperlukan untuk mencari visi dan misi yang sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan sehingga akuntabilitasnya dapat dipercaya oleh komponen masyarakat. Aktualisasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Aspek keadilan harus diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar realisasi dan pelayanannya berdampak pada peningkatan pembinaan dan pengembangannya. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan harus memperhatikan unsur keadilan dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan. Padahal daerah yang terbelakang pendidikan agama dan keagamaannya seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan tersebut. Fenomena ini sebagai indikator bahwa aspek keadilan dan pemerataan dalam penyelenggaraan

pendidikan keagamaan perlu dievaluasi oleh pemerintah agar dapat terwujud secara merata dan optimal agar peran dan fungsi pendidikan keagamaan terealisasi secara optimal dan menjadi dambaan masyarakat.

C. Aspek Perhatian Terhadap Kebijakan Pemerintah

Proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan, harus memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut: 1) Proses penyelenggaraan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62, yang menyatakan bahwa: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah (ayat 1). Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan (ayat 2). Pemerintah atau Pemerintah Daerah member atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 3).²⁶⁹ 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 21, yang menyatakan bahwa pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis (ayat 1). Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan (ayat 2). Dan, Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan (ayat 3).²⁷⁰

²⁶⁹Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 30-31.

²⁷⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 22.

Proses penyelenggaraan terhadap Majelis Taklim, dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, khususnya Majelis Taklim, meliputi: (a) memiliki akta pendirian atau Surat Keterangan dari pejabat berwenang atau minimal telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Majelis Taklim; (b) memiliki pengurus/pengelola yang beragama Islam; (c) memiliki peserta didik/anggota Majelis Taklim; (d) memiliki sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dengan Majelis Taklim dan tertelak di Kabupaten/Kota; (e) mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/terdaftar beserta persyaratan administrasi yang ditentukan dan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan (f) memperoleh izin penyelenggaraan/terdaftar sebagai Majelis Taklim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Fungsi Pendidikan Keagamaan

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan keagamaan merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang turutserta berkontribusi dalam usaha pembinaan dalam bidang agama yang dapat dijadikan potensi untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Fungsi pendidikan keagamaan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat (2), disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Fungsi keagamaan ini sesuai dengan tujuan pendidikan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan

Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.²⁷¹

Proses yang dilakukan organisasi pendidikan keagamaan yang dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi pendidikan keagamaan, adalah mengembangkan potensi peserta didik lembaga pendidikan keagamaan. Pengembangan potensi peserta didik yang menjadi prioritas utama adalah pembinaan yang berkaitan: 1) Pembinaan Kognitif. Pendidikan keagamaan memiliki fungsi kognitif, yakni peserta didik dapat mengembangkan dirinya melalui pengembangan kecerdasan intelektual dalam ilmu agama dan ilmu umum. Fungsi kognitif pendidikan keagamaan yang telah diamanatkan undang-undang memberikan kesempatan kepada peserta didik meningkatkan kualitas belajar lembaga keagamaan.

Fungsi kognitif merupakan instrumen pendidikan dalam meningkatkan potensi kecerdasan peserta didik; 2) Pembinaan afektif. Fungsi afektif, yakni peserta didik dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi ahli ilmu agama, memiliki keterampilan, bersikap dan berkepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik disebut berhasil apabila memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang mulia merupakan refleksi pendidikan keagamaan dalam upaya menghindari dekadensi moral. Dekadensi moral yang melanda kebanyakan remaja saat ini merupakan indikator bahwa pembinaan keagamaan harus difungsikan secara optimal. Menurut Sitti Hartinah, dalam bukunya "*Perkembangan Peserta Didik*", menyatakan bahwa afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran.²⁷² Dan 3) Pembinaan Psikomotorik.

²⁷¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 7.

²⁷²Sitti Hartinah, *Perkembangan Peserta Didik*, h. 6.

Fungsi psikomotorik, yakni peserta didik memiliki peluang mengembangkan keterampilan (*skills*) dalam rangka peningkatan potensi dan kualitas dirinya baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan menjadi keahlian (*skills*). Fungsi kognitif dan afektif akan sempurna bila disertai fungsi psikomotorik yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi peserta didik untuk mempraktekkan atau mengaktualisasikan potensi pengetahuan keagamaan yang dimiliki. Fungsi pendidikan keagamaan dalam pengembangan potensi peserta didik, menjadi penguatan fungsi kognitif, dan afektif yang saling terkait.

c. Jalur Pendidikan Keagamaan

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat (3), disebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Apabila menganalisis landasan tersebut, Pemerintah selaku penyelenggara negara memberikan ruang terhadap pendidikan keagamaan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk tiga jalur; pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan kesesuaian kompetensi. Pendidikan nonformal, tertera dalam Pasal 26 ayat (4), disebutkan bahwa pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.²⁷³

Jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal, dikenal pula dengan istilah tripusat pendidikan, yakni pendidikan formal yang berpusat di sekolah/madrasah, pendidikan nonformal berpusat pada lembaga dan masyarakat, dan pendidikan informal berpusat dalam keluarga dan lingkungan. Pendidikan keagamaan khususnya Majelis Taklim termasuk pendidikan nonformal yang memerlukan pendekatan profesional agar program pelaksanaan dapat terwujud secara kontinyu dan komprehensif.

²⁷³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 14.

Pendekatan profesional mengacu pada pendidikan berdasarkan kompetensi sebagai indikator keahlian dalam bidang tertentu. Dewasa ini profesionalisasi dengan kompetensi berdasarkan pandangan behavioristik mulai ditinggalkan (khususnya negara maju), yang selanjutnya beralih pada pandangan behavioral humanism, yang mengembangkan proses pendidikan yang membentuk manusia yang adaptif dengan konsep bagaimana belajar.²⁷⁴

d. Bentuk Pendidikan Keagamaan

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat (4), disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabhaja sammanera*, dan bentuk lain yang sejenis.²⁷⁵ Hal ini menjadi indikator bahwa pemerintah memberikan peluang kepada pemeluk agama untuk membina dan mengembangkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 30 ayat (4) tersebut sebagai bukti konkrit Pemerintah Indonesia toleran dengan pemeluk agama minoritas. Seandainya kebijakan pemerintah lebih memihak salahsatu agama dalam penyelenggaraan pendidikan, akan mengganggu toleransi beragama yang telah terjalin. Kebijakan pemerintah tersebut seyogyanya diapresiasi oleh warga masyarakat agar pelaksanaan pendidikan keagamaan berjalan dengan baik. Bukti konkrit idealisnya landasan implementasi pendidikan keagamaan di Indonesia adalah selama ini pelaksanaan pendidikan keagamaan masing-masing agama berlangsung dengan baik dari tahun ke tahun hingga saat ini.

e. Ketentuan Pendidikan Keagamaan

Ketentuan pendidikan keagamaan diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat (5), disebutkan bahwa ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan

²⁷⁴Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, h. 135.

²⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 16.

Peraturan Pemerintah.²⁷⁶ Kebijakan Pemerintah tentang ketentuan pendidikan keagamaan yang termaktub dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan suatu hal yang menjadi acuan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Kurikulum merupakan bagian dari proses pelaksanaan pendidikan termasuk pendidikan keagamaan di dalamnya. Dalam mengimplementasikan suatu kurikulum pendidikan keagamaan harus mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.²⁷⁷

Menurut al-Abrasy, dikutip oleh Khoiron Rosyadi, dalam buku Pendidikan Profetik, menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, adalah: (1) pengaruh mata pelajaran itu dalam pendidikan jiwa serta kesempurnaan jiwa. Dan itu diberikan oleh pelajaran keagamaan dan ketuhanan. Karena ilmu paling mulia, ialah mengenai Tuhan serta sifat-sifat yang pantas pada-Nya; dan (2) pengaruh suatu pelajaran dalam bidang petunjuk, tuntunan dengan menjalani cara hidup yang mulia dan sempurna, seperti ilmu akhlak, ilmu hadis, fiqh, dan sebagainya.²⁷⁸

Perencanaan pelaksanaan pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal, menjadi perhatian utama. Karena proses pelaksanaan pembinaan organisasi harus memiliki kurikulum/

²⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 16.

²⁷⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 19.

²⁷⁸Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 258.

silabus sebelum penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan. Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Oemar Hamalik, dalam bukunya *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, yang menyatakan bahwa perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan serta kebutuhan dasar manusia.²⁷⁹

Menganalisa kebijakan pemerintah tersebut, kurikulum dalam proses pelaksanaan pendidikan keagamaan pada Pendidikan Majelis Taklim, dengan materi pembelajaran yang meliputi: 1) Peningkatan Iman dan Takwa. Proses pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan iman dan takwa adalah tujuan utama pendidikan keagamaan untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Peningkatan iman dan takwa merupakan prioritas substansi kurikulum pendidikan keagamaan. Proses pelaksanaan kurikulum berorientasi agama dan keagamaan. Sehubungan dengan kurikulum yang berbasis peningkatan iman dan takwa, maka perlu memahami tantangan dunia pendidikan keagamaan saat ini agar program kurikulum dapat berjalan dengan baik. Menurut Muhaimin, dalam bukunya *Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, dinyatakan bahwa globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Para peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran, baik yang bersifat pedagogis terkontrol maupun nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol mempengaruhi perubahan budaya, etika, dan moral para peserta didik atau masyarakat.²⁸⁰

Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Akhlak Mulia

²⁷⁹Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, h. 172.

²⁸⁰Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, h. 16.

Proses pelaksanaan pendidikan keagamaan mendidik peserta didik untuk meningkatkan akhlak mulia. Perlu dipahami bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam lembaga pendidikan keagamaan, seperti Pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, dan Majelis Taklim, memprioritaskan pada pembinaan akhlak mulia. Hal tersebut diungkapkan Sukri Kahar (Kepala Ponpes Darul Istiqamah), menyatakan bahwa salahsatu kelebihan pendidikan keagamaan adalah lebih banyak terhadap pembinaan akhlak yang didasarkan pendekatan agama. Karena proses pembinaan yang didasarkan pada agama, maka proses pembinaan lebih cepat diwujudkan jika dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Sebenarnya arah dan tujuan kurikulum inilah yang harus ditonjolkan dan diunggulkan agar mendapat simpati dan empati masyarakat.

- 2) Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat Peserta Didik
Proses pelaksanaan kurikulum pada pendidikan keagamaan, tidak terbatas pada peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, dan proses pembelajaran pendidikan keagamaan dituntut untuk meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Peningkatan ini dimaksudkan agar *output* peserta didik lembaga pendidikan keagamaan dapat mengembangkan dirinya. Peserta didik juga dituntut memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan, peningkatan *knowledge* untuk pengembangan potensi akademik, dan peningkatan minat peserta didik dalam proses belajar pada pendidikan keagamaan sehingga dapat bersaing secara kompetitif.
- 3) Keragaman Potensi Daerah dan Lingkungan
Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan tidak hanya dituntut pada pengembangan pengetahuan agama, tetapi juga dituntut mengetahui keragaman potensi daerah dan lingkungan sehingga peserta didik memiliki kebanggaan akan potensi daerahnya dan selalu mencintai lingkungannya. Substansi kurikulum tersebut, mendidik peserta didik untuk memberdayakan dan memanfaatkan berbagai potensi di daerah serta tidak merusak ekosistem lingkungan dalam suatu daerah. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan ajaran Islam.

4) Tuntutan Pembangunan Daerah dan Lingkungan

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan menuntut pengetahuan pembangunan daerah. Setelah mengetahui keragaman potensi daerah dan lingkungan, selanjutnya peserta didik dituntut mengetahuinya. Kurikulum yang memuat pembangunan daerah dan lingkungan merupakan upaya Pemerintah agar peserta didik banyak mengetahui pembangunan yang ada di daerah dan lingkungan agar peserta didik mampu membangun daerahnya, mencintai dan memberdayakan lingkungannya.

5) Tuntutan Dunia Kerja

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan menuntut peserta didik memiliki kompetensi dan *skills* untuk memiliki kompetensi yang digunakan dalam dunia kerja. Pendidikan keagamaan patut memperhatikan materi pembelajaran keterampilan untuk mendidik peserta didik memiliki keahlian dalam memasuki dunia kerja dan tidak akan tertinggal dari program pokok, bahkan menjadi ikon terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal lainnya utamanya aspek apektif. Selain menuntut penguasaan pengetahuan agama juga menuntut pengetahuan umum yang ada relevansinya dengan dunia kerja dan kesejahteraan.

6) Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan juga tidak terlepas dari tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk itu lembaga pendidikan keagamaan seyogyanya diupayakan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan segala cara dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam hal seni, kurikulumnya sesuai tradisi masyarakat Indonesia dan nilai-nilai pendidikan Islam. Hal seperti ini yang menjadi acuan pendidikan keagamaan saat ini dan ke depan sehingga ada perbedaan dengan pendidikan nonkeagamaan.

7) Agama

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan adalah suatu upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan agama khususnya agama Islam. Mengingat pendidikan keagamaan khususnya Pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, dan Majelis Taklim, sangat relevan dengan pembinaan dan pengembangan agama, maka kurikulum yang ada harus mempertahankan pengetahuan agama sebagai substansi pokok dalam pembelajaran. Eksistensi pendidikan keagamaan dalam masyarakat mempertahankan pengembangan agama Islam yang berbasis masyarakat.

8) Dinamika Perkembangan Global

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan, peserta didik harus mampu mengetahui dinamika perkembangan global yang terjadi. Perlunya pengetahuan keagamaan untuk memacu peserta didik lebih maju dan memiliki pengetahuan yang tidak bersifat statis sehingga mampu memahami dinamika perkembangan global. Dengan memahami dinamika global, maka peserta didik mampu beradaptasi dengan dunia luar tanpa harus meninggalkan substansi ajaran agama Islam.

9) Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan, peserta didik dituntut agar mampu memahami persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan secara komprehensif. Artinya, pengetahuan tentang manfaat persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, peserta didik dipacu untuk mencintai Negara Kesatuan RI dan menghormati orang lain meskipun berbeda suku, dan agama. Dan, peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. serta menjadi panutan dalam kerukunan umat beragama.

d. Penilaian Proses Belajar Mengajar

Penilaian proses belajar mengajar yang juga diterapkan dalam proses pelaksanaan pendidikan keagamaan, sesuatu yang mutlak dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan para pengelola lembaga pendidikan keagamaan agar terjadi

proses belajar mengajar yang bersifat evaluatif dan kontrol pelaksanaan, baik terhadap pengajar dan pengelola maupun peserta didik. Penilaian proses belajar mengajar pendidikan keagamaan, substansinya lebih pada penilaian terhadap pengetahuan Islam.

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, disebutkan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan melaksanakan proses penilaian hasil belajar, yakni merumuskan atau mempertegas tujuan pengajaran; mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus; menyusun alat-alat penilaian; dan menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian.²⁸¹

Proses pelaksanaan pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan penilaian proses belajar mengajar, adalah langkah yang menjadi tolak-ukur penilaian proses belajar mengajar, meliputi: (1) merumuskan dan mempertegas tujuan pembelajaran, yakni mengadakan penilaian dengan merumuskan dan mempertegas tujuan penilaian yang dilakukan oleh pengajar/pengelola. Hal ini bertujuan memperjelas arah dan tujuan pembelajaran; (2) mengkaji kembali materi pembelajaran berdasarkan kurikulum atau silabus. Materi pembelajaran berdasarkan kurikulum atau silabus yang diajarkan oleh pengajar, harus dilakukan penilaian dan kajian ulang, apakah kurikulum atau silabus yang diterapkan efektif digunakan atau tidak. Jika efektif digunakan, maka materi pembelajaran dipertahankan, namun bila tidak efektif, maka materi pembelajaran harus dievaluasi; dan (3) menyusun alat penilaian terutama dengan menggunakan tes sebagai alat penilaian hasil belajar. Tes dimaksud, adalah tes uraian, yaitu pertanyaan menuntut peserta didik menjawabnya dalam bentuk menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Soal bentuk obyektif ada beberapa bentuk, yaitu jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan pilihan ganda.²⁸²

²⁸¹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, h. 9-10.

²⁸²*Ibid.*, h. 44.

e. Akreditasi Lembaga Pendidikan

Pendidikan keagamaan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memerlukan akreditasi lembaga pendidikan. Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (22) yang menyebutkan, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan di dalam buku *Kebijakan Akreditasi Pendidikan Nonformal* oleh Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa satuan pendidikan nonformal yang perlu diakreditasi, adalah: lembaga PAUD, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim, dan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), serta satuan pendidikan yang sejenis.²⁸³

Apabila memperhatikan ruang lingkup akreditasi tersebut, maka pendidikan keagamaan khususnya Majelis Taklim perlu diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) untuk menentukan kelayakan program Majelis Taklim. Karena fungsi akreditasi tersebut, adalah melakukan penilaian terhadap Majelis Taklim, apakah pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (*confirmaty*). Hasilnya sebagai rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program Majelis Taklim dan kepada pemerintah.

f. Penerapan Konsepsi Manajemen Islam

Pendidikan keagamaan dalam pelaksanaannya memerlukan suatu penerapan manajemen menurut Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan keagamaan (Majelis Taklim) tidak hanya menggunakan aturan umum yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi juga menerapkan konsepsi manajemen menurut kaidah Islam agar kegiatan pendidikan keagamaan memiliki corak dan warna yang Islami tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya dengan penerapan konsepsi manajemen Islam dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan, perlu diperhatikan

²⁸³Kementerian Pendidikan Nasional, *Kebijakan Akreditasi Pendidikan Nonformal* (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, 2011), h. 8.

konsepsi manajemen menurut Islam, telah diungkapkan oleh Abu Sin yang dikutip oleh Saifullah dalam bukunya "*Manajemen Pendidikan Islam*", yang menyatakan bahwa:

- 1) Landasan nilai-nilai dan akhlak Islami. Manajemen Islami harus berdasarkan universalitas nilai, yaitu kasih sayang, kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan kesederajatan insani.
- 2) Seluruh aktivitas manajemen merupakan salahsatu bentuk penghambaan kepada Allah swt. Nilai ibadah harus dibangun dengan landasan ketauhidan.
- 3) Hubungan atasan dengan bawahan merupakan hubungan persaudaraan umat Islam, hubungan antarmanusia yang sederajat, egalitarian, dan berprinsip pada nilai-nilai universalitas, kemanusiaan, kebangsaan, kemerdekaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebaikan seorang pemimpin pada bawahannya tidak akan sia-sia apabila dilandasi oleh niat yang baik. Oleh sebab itu semua bentuk kebaikan yang diberikan harus berdasarkan niat baik karena Allah. Untuk itu manajemen dalam Islam memiliki perbedaan yang signifikan dengan manajemen yang selama ini dikembangkan. Perbedaan itu terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya didasarkan pada niat kepada Allah. Artinya, adanya tanggungjawab teologis bagi individu dalam mengembangkan manajemen sebagai alat atau media seseorang untuk hidup teratur agar mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat.
- 4) Manajemen Islam yang dilandasi oleh etika dan nilai-nilai agama menjadi salahsatu alternatif dalam menyelesaikan problem individu dan sosial di tengah zaman yang semakin tidak menentu secara moral. Apabila ada keinginan untuk mengembangkan secara profesional yang sesuai dengan aturan ilmu yang telah disepekat, perlu diperjelas suatu pengertian dari manajemen Islam secara epistemologis. Harus dilakukan pengkajian secara mendalam dan terus-

menerus melakukan penelitian. Dengan demikian, ditemukan dasar-dasar ilmiah dari manajemen Islam tersebut.²⁸⁴

4. Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengawasan dalam organisasi pendidikan keagamaan perlu mengacu pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 66, yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing (ayat 1). Dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Sondang P. Siagian, dalam bukunya *Fungsi-Fungsi Manajerial*, dikatakan bahwa penciptaan aparatur pengawasan, baik di dalam maupun di luar instansi pemerintahan, menunjukkan pengawasan sebagai salahsatu fungsi organik manajemen dalam keseluruhan rangkaian usaha pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Penempatan pengawasan dalam suatu organisasi didasarkan pada kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang makin lama semakin meningkat, dihadapkan pada keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya serta tenaga. Oleh karenanya, semua langkah yang ingin ditempuh untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan dalam kedudukan, wewenang dan jabatan diambil secara konsisten, maka perlu meningkatkan aktivitas pengawasan dalam suatu lembaga pendidikan keagamaan.²⁸⁵

Dalam buku *Manajemen Pendidikan*, karya Hikmat yang disebutkan bahwa pengawasan atau *controlling* adalah fungsi yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan. Semua pekerja dan proses kegiatan lembaga pendidikan diawasi oleh pimpinan. Apabila pendidik telah melaksanakan tugas dan

²⁸⁴U.Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 48.

²⁸⁵Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, h. 202.

kewajiban dengan baik, biasanya mereka memperoleh suatu penghargaan dari pimpinan lembaga pendidikan. Setiap unit kerja dikompetisikan keberhasilannya dalam berbagai bidang sehingga memacu dan mendorong pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja.²⁸⁶

Menurut Murdick, yang dikutip oleh Nanang Fattah dalam bukunya *Landasan Manajemen Pendidikan*, disebutkan bahwa proses pengawasan mencakup penetapan standar pelaksanaan yang terdiri dari pembiayaan, waktu, kualitas, dan kuantitas. Dan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari perencanaan umpan-balik proses manajemen, pemeriksaan struktur organisasi, penataan staf, dan pengarahan.²⁸⁷ Dan sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 66 ayat (1), bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasaan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.²⁸⁸

Implementasi pendidikan keagamaan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan khususnya Majelis Taklim, yakni adanya transparansi penyelenggaraan Majelis Taklim yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan *susnaibility* proses pembinaannya. Transparansi yang diperlukan pada Majelis Taklim, adalah transparansi dalam pembentukan kepengurusan, proses pembinaan, masalah keuangan, dan kegiatan ekstra anggota Majelis Taklim. Tujuan transparansi ini untuk menghindari diskomunikasi sesama anggota Majelis Taklim yang sekaligus merupakan peserta didik. Apabila penyelenggarannya tidak terbuka dalam aspek pengelolaan, akan melemahkan fungsi pengawasan kepada anggotanya. bahwa Ketua Majelis Taklim tidak dapat mengawasi anggotanya dengan efektif apabila di antara mereka terjadi diskomunikasi. Di sinilah pentingnya transparansi kepada

²⁸⁶Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, h. 127.

²⁸⁷Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, h. 101.

²⁸⁸Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 32.

seluruh anggota Majelis Taklim tanpa diskriminasi untuk dapat melakukan pengawasan internal. Apabila terjadi diskomunikasi sesama anggota, akan menghambat proses pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim. Dan proses pengawasan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Akuntabilitas publik sangat diperlukan untuk mendapatkan kredibilitas sesama anggota yang sekaligus sebagai peserta didik Majelis Taklim, maka seyogyanya memiliki konsep pengawasan internal dan eksternal sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas publik tersebut mencakup: (1) akuntabilitas proses pembelajaran, yakni penyelenggara Majelis Taklim memberitahukan kepada ustad (penceramah) dan seluruh anggota/peserta didik tentang proses pembelajaran; (2) akuntabilitas pemanfaatan keuangan; yakni penyelenggara Majelis Taklim mengumumkan sumber dan pemanfaatan dana, baik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi/organisasi, masyarakat maupun orang tua peserta didik; dan, (3) akuntabilitas mutu dan hasil yang telah dicapai Majelis Taklim, yakni pihak penyelenggara mempublikasikan kepada seluruh anggotanya akan hasil pembinaan yang telah dicapai.

Majelis Taklim harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sekaligus sebagai bentuk pengawasan secara berkala, minimal sekali setiap enam bulan agar penyelenggara Majelis Taklim tetap memperoleh bimbingan dan arahan minimal sekali setiap enam bulan berjalan dan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan Majelis Taklim mempertanggungjawaban kepada publik, yakni seluruh anggota Majelis Taklim bertanggungjawab secara moralitas untuk meningkatkan akhlak dan kepribadian yang baik kepada masyarakat dan lingkungannya.

Sesuai pertimbangan itu, proses pengawasan pendidikan keagamaan, sebagai berikut:

a. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapangan pekerjaan yang terdapat dalam organisasi pendidikan. Standar

pendidikan keagamaan adalah kriteria untuk mengukur pelaksanaan pendidikan keagamaan. Standar pelaksanaan pendidikan keagamaan adalah pernyataan mengenai kondisi apabila dikerjakan secara memuaskan. Proses penetapan standar pelaksanaan pendidikan keagamaan yang dimaksud, mencakup: (1) pembiayaan merupakan unsur yang paling mendasar dalam organisasi pendidikan keagamaan karena merupakan sarana penggerak selain faktor sumber daya manusia. Untuk terwujudnya hasil pelaksanaan, perlu dilakukan pengawasan terkait pembiayaan operasional, apakah dana digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Apabila penggunaannya sesuai dengan sasaran pelaksanaan, akan dikategorikan sebagai proses penetapan sesuai standar pelaksanaan dalam organisasi pendidikan keagamaan; (2) waktu yang digunakan merupakan salahsatu penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi pendidikan keagamaan. Penggunaan waktu yang efektif dan tepat sasaran adalah hal yang seharusnya dilakukan. Perlu dilakukan pengawasan penggunaan waktu, apakah aktivitas yang dilakukan dapat memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak. Apabila menggunakan waktu dengan baik, maka hal tersebut sesuai dengan penetapan standar pelaksanaan; (3) kualitas pekerjaan dalam organisasi pendidikan keagamaan sangat diperlukan untuk menjadikan hasil yang bermutu pula. Untuk itu, diperlukan pengawasan kualitas kerja dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan dan *output* peserta didik. Apabila data empiris menyatakan bahwa *output* peserta didik bermutu, maka standar pelaksanaan pendidikan dapat terwujud dengan baik; dan (4) selain masalah kualitas, masalah kuantitaspun diperlukan organisasi pendidikan keagamaan. Perlu melakukan pengawasan untuk meningkatkan aktivitas pengembangan organisasi pendidikan keagamaan agar dapat berkembang dengan jumlah lembaga pendidikan keagamaan lebih banyak jika dibandingkan sebelumnya. Tanpa pengawasan maka organisasi tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan terutama hasil pekerjaan.

b. Pengukuran Hasil Pelaksanaan

Pengukuran hasil pelaksanaan yang merupakan bagian dari proses pengawasan organisasi pendidikan keagamaan, adalah

untuk dapat mengukur hasil pelaksanaan organisasi pendidikan keagamaan. Metode dan koreksinya dapat dijelaskan dengan klasifikasi yang mencakup: (1) perencanaan umpanbalik proses manajemen, yakni setiap perencanaan dalam proses manajemen, diperlukan umpanbalik (*feedback*). Perencanaan yang baik ketika substansi perencanaan mendapat persetujuan oleh banyak pihak, bukan atas kemauan sendiri; (2) pemeriksaan struktur organisasi, yakni pengukuran suatu hasil pelaksanaan yang terkait dengan organisasi. Struktur organisasi yang terukur menyebabkan organisasi semakin kuat dan berkembang. Sebaliknya, organisasi yang tidak melakukan pemeriksaan struktur organisasinya, menjadikan pimpinan otoriter; (3) penataan staf atau personil dalam suatu organisasi diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia; dan (4) pengarahan, yakni seluruh bentuk pengukuran hasil pelaksanaan yang telah dilakukan untuk memberikan motivasi kepada staf dan pendidik dalam organisasi.

c. Faktor Penunjang Lainnya

Walaupun potensi tersebut cukup baik, namun lembaga pendidikan keagamaan seyogyanya mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia bagi pengajar dan harus memperhatikan tantangan dunia pendidikan Islam secara keseluruhan yang berdampak pada lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Di antara tantangan itu, adalah globalisasi budaya dan etika Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan akibat dari kemajuan teknologi di bidang informasi yang merusak generasi muda. Para peserta didik telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran, baik yang bersifat pedagogis maupun nonpedagogis dan sulit terkontrol serta dapat mempengaruhi perubahan budaya, etika, dan moral peserta didik. Masyarakat yang semula merasa asing bahkan tabu terhadap model pakaian (*fashion*) yang terbuka dan hiburan (*fun*) atau sadisme kemudian menjadi biasa saja (*permissive*).²⁸⁹

Dalam suatu daerah yang di dalamnya terdapat masyarakat kategori religius sangat berbeda apabila masyarakat pada umumnya telah dipengaruhi oleh faktor sekulerisasi yang sangat

²⁸⁹Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 15-16.

mementingkan urusan dunia, tentunya akan mempengaruhi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan. Namun yang masyarakatnya yang pada umumnya religius merupakan salahsatu faktor pendukung pendidikan keagamaan. Karena masyarakat religius tersebut, membantu dari unsur moril maupun materil.

Aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakat merupakan suatu ibadah karena di dalam aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakat Islam lebih banyak membicarakan masalah kebaikan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Ibadah dapat diklasifikasikan atas ibadah yang sifatnya kemasyarakatan dan sifatnya perorangan. Ibadah dalam konteks kemasyarakatan harus didahulukan daripada ibadah individu pada hal-hal tertentu. Misalnya, diutamakannya ahli ilmu daripada ahli ibadah, diutamakannya perdamaian daripada sedekah.²⁹⁰

Dan aktivitas keagamaan yang berdampak pada pertumbuhan masyarakat yang madani. Masyarakat madani dimaksudkan adalah suatu masyarakat yang mengembangkan dan menetapkan pola hidup sosial politik-budaya dengan pranata kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat.²⁹¹

Masyarakat yang religius adalah salahsatu potensi untuk pengembangan dakwah kepada masyarakat Islam. Potensi ini sebagai upaya menjalankan perintah dan sekaligus merupakan amanah dari Allah Swt., kepada para pimpinan, pendidik, dan da'i/ustad untuk menyeru kepada kebaikan demi kemaslahatan umat Islam untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat yang berpotensi religius tidak berarti bebas dari seruan untuk melakukan kebaikan.

Sebagaimana QS. Ali-Imran/3 : 104

²⁹⁰Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 35.

²⁹¹Badan Litbang dan Diklat Depag., *Konsolidasi Civil Society Pendidikan Keagamaan* (Jakarta: Pusdiklat Pendidikan Keagamaan, 2007), h.19.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*²⁹²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 2, disebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dan Pasal 8 ayat (2), menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.²⁹³ Dalam suatu organisasi pendidikan keagamaan, memerlukan tenaga pengajar yang profesional bahwa tenaga pengajar pada lembaga pendidikan keagamaan jalur pendidikan nonformal. Fenomena ini disebabkan Tenaga pengajar yang cukup merupakan salahsatu modal utama selain finansial dalam proses pembinaan dan pengembangannya. Fenomena ini menjadi pendukung pelaksanaan pendidikan.

Tenaga pengajar yang cukup merupakan modal utama penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dan sumber dana penyelenggaraan pendidikan keagamaan pendidikan nonformal umumnya tidak menggunakan dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sumber pokok dana diperoleh dari swadaya penyelenggara dan bantuan masyarakat. Keinginan penyelenggara dan pengurus

²⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79,

²⁹³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, h. 9.

pendidikan keagamaan yang telah mendanai penyelenggaraannya patut diapresiasi oleh umat Islam. Walaupun diketahui bahwa sumber dana tersebut belum dapat menjamin kecukupan dana yang dibutuhkan dalam usaha pendirian dan proses pembinaan yang dilakukan.

Potensi sumber dana yang cukup baik akan menjadi faktor pendukung utama dari aspek materil. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun dalam pendiriannya masih banyak kekurangan materil. Namun hal tersebut bukan suatu halangan merealisasikan rencana yang dimiliki warga masyarakat.

Menurut peneliti, sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan yang masih kurang profesional khususnya dalam pengelolaan pendidikan keagamaan. Hal ini disebabkan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan belum sepenuhnya diketahui dan atau tidak diaplikasikan. Akibatnya, lembaga pendidikan keagamaan mengalami masalah dalam operasionalnya, yakni kesulitan pendanaan,

Pengembangan keterampilan fungsional merupakan alternatif menghindari asumsi sebahagian masyarakat yang menganggap bahwa lulusan lembaga pendidikan keagamaan hanya terampil dalam masalah agama dan tidak terampil dalam urusan dunia. Pengembangan keterampilan dilakukan untuk dapat memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan dan menghindari kemiskinan dan kefakiran. Hal tersebut sesuai pernyataan Abdullah Nasih bin al-Ufwan dalam sebuah buku, menyatakan bahwa seorang yang tumbuh dilingkungan kefakiran akan berusaha meninggalkan lingkungannya dan mencari penghidupan yang layak.²⁹⁴

Kedisiplinan merupakan sesuatu kebaikan. Apapun kebaikan yang dilakukan meskipun urusan dunia akan mendapat pahala di Allah swt. Kebaikan yang dilakukan termasuk disiplin di dalamnya, sesuai QS. al-Baqarah/2: 110

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

²⁹⁴ Abdullah Nasih al-Ufwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (Cet. XXI; Kairo: Darussalam, 1992), h. 122.

Dan segala kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapat (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹⁵

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pilar utama dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini karena para pelaksana kebijakan tidak sedikit yang melakukan pelanggaran sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat merugikan orang lain. Salahsatu faktor yang mendominasi, adalah kurangnya pengetahuan agama atau pendidikan keagamaan pada dirinya. Sudah saatnya penyelenggaraan pendidikan menjadi edukasi yang eksklusif untuk membangun manusia yang religius dan akan berimplikasi pada tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus menjadi eksotik dalam masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan keagamaan eksis memberikan warna edukatif dan menghindari deviasi keagamaan, seperti munculnya agama baru, dan sejenisnya. Peluang penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang telah diberikan Pemerintah, harus tetap diapresiasi oleh tokoh agama, akademisi, dan masyarakat. Apresiasi ini tidak cukup hanya dengan menganalisis penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang berkembang, akan tetapi juga memiliki partisipasi secara langsung dengan mengkonstruksi penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar terbangun secara optimal dan komprehensif.

Urgensi penyelenggaraan pendidikan keagamaan bukan suatu hal yang harus diperdebatkan secara tajam dan melahirkan potensi konflik kepentingan. Urgensi pendidikan keagamaan merupakan kebutuhan pokok spiritual manusia menjadi instrumen utama untuk dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21.

Seandainya penyelenggaraan pendidikan keagamaan ditiadakan Pemerintah, maka stabilisasi pendidikan agama dan keagamaan akan terganggu. Pemerintah telah memberikan ruang gerak yang cukup baik bagi kepentingan umat beragama dalam membina dan mengembangkan nilai dan ajaran agamanya. Dengan dasar inilah, kehadiran UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 yang terkait dengan pendidikan keagamaan harus menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan harus direspon oleh seluruh komponen bangsa.

Aktualisasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan dibarengi dengan afiliasi Pemerintah dan masyarakat agar tercipta keharmonisan dan sinkronisasi pelaksanaan pembanguana bidang pendidikan termasuk pendidikan keagamaan di dalamnya. Secara faktualisasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak sedikit lembaga pendidikan keagamaan mengalami hambatan, di antaranya; masalah pengurusan pada instansi yang terkait dan memerlukan waktu cukup lama, pendanaan yang kurang memadai sehingga masyarakat berpikir dan kurang antusias untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Untuk itu, aspek sinkronisasi diperlukan untuk mencari visi dan misi yang sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Dan akuntabilitasnya dapat dipercaya oleh seluruh komponen masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam. Dalam proses pembinaan Majelis Taklim merupakan wadah berkumpul umat Islam dengan tujuan sebagai pusat pembelajaran, pusat konseling Islam, pusat pengembangan budaya dan kultur Islam, pusat pengkaderan ulama/cencekiawan, pusat pemberdayaan ekonomi jamaah, dan sebagai lembaga kontrol dan motivator di tengah masyarakat.

Proses penyelenggaraan Majelis Taklim umumnya dilakukan pada sore hari. Anggota Majelis Taklim selaku peserta didik

umumnya orang dewasa yang berstatus istri/suami. Majelis Taklim umumnya dilakukan di Kabupaten Gowa dilakukan sekali setiap bulan dan dirangkaikan dengan kegiatan ekstra berupa arisan dari anggota Majelis Taklim itu sendiri. Proses pembinaannya berbeda dengan TKQ/TPQ, dan Diniyah Takmiliah. Proses pembinaan yang dilakukan Majelis Taklim bersifat penyuluhan. Setiap pertemuan, seorang ustad yang diundang dan atau Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama yang memberikan ceramah agama kepada anggota Majelis Taklim yang hadir. Kegiatan ceramah agama tersebut merupakan rangkaian kegiatan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan meningkatkan iman dan ketakwaan serta wawasan keislaman kepada anggota Majelis Taklim.

Menurut penulis, agar pembinaan dapat tercapai secara optimal, kegiatan pembinaan Majelis Taklim dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan kelas, yakni pengaturan jama'ah secara keseluruhan. Kegiatan pembukaan yang diawali dengan kegiatan *tadarrus* al-Qur'an secara bersama-sama atau pengajian al-Qur'an yang dibacakan oleh *qari'*/*qari'ah*. Kegiatan inti diisi dengan ceramah agama sesuai bahan ajar dengan narasumber seorang ustad atau lebih dan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Dan kegiatan penutup, dilakukan dengan pembacaan doa penutup oleh para jama'ah.

Menurut penulis, hasil proses pembinaan Majelis Taklim yang efektif, adalah apabila anggota Majelis Taklim semakin bertambah pengetahuan dan wawasan keislaman serta perilaku silaturahmi tetap dijaga bahkan meningkat dibandingkan sebelum menjadi anggota Majelis Taklim. Dalam kenyataannya di lapangan, peneliti mengkhawatirkan fungsi Majelis Taklim tidak berjalan optimal sesuai fungsi yang sebenarnya, akan tetapi eksistensi Majelis Taklim lebih kepada wadah tempat berkumpulnya warga muslim dengan mengedepankan tujuan yang bersifat duniawi, seperti kegiatan arisan dalam pertemuan Majelis Taklim yang berpotensi mengganggu pokok pembinaan, yakni acara ceramah oleh ustad. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya Kantor Kementerian Agama tetap eksis mensosialisasikan tujuan utama

Majelis Taklim sebagai suatu majelis ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah swt.

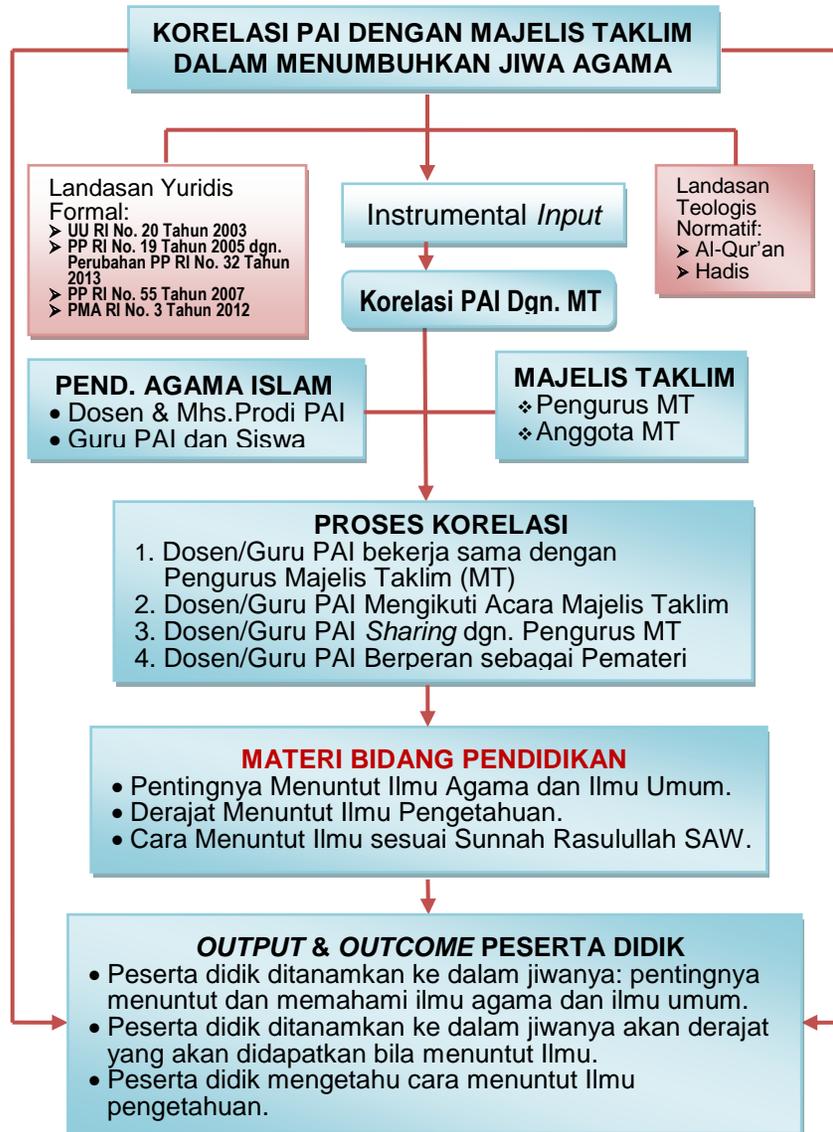
Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan keagamaan merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang turutserta berkontribusi dalam usaha pembinaan terhadap peserta didik. Dengan demikian, penyelenggara pendidikan keagamaan telah berpartisipasi dalam pengembangan potensi peserta didik.

Fungsi pendidikan keagamaan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat (2), disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Fungsi ini sesuai dengan tujuan pendidikan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif,

BAB XI

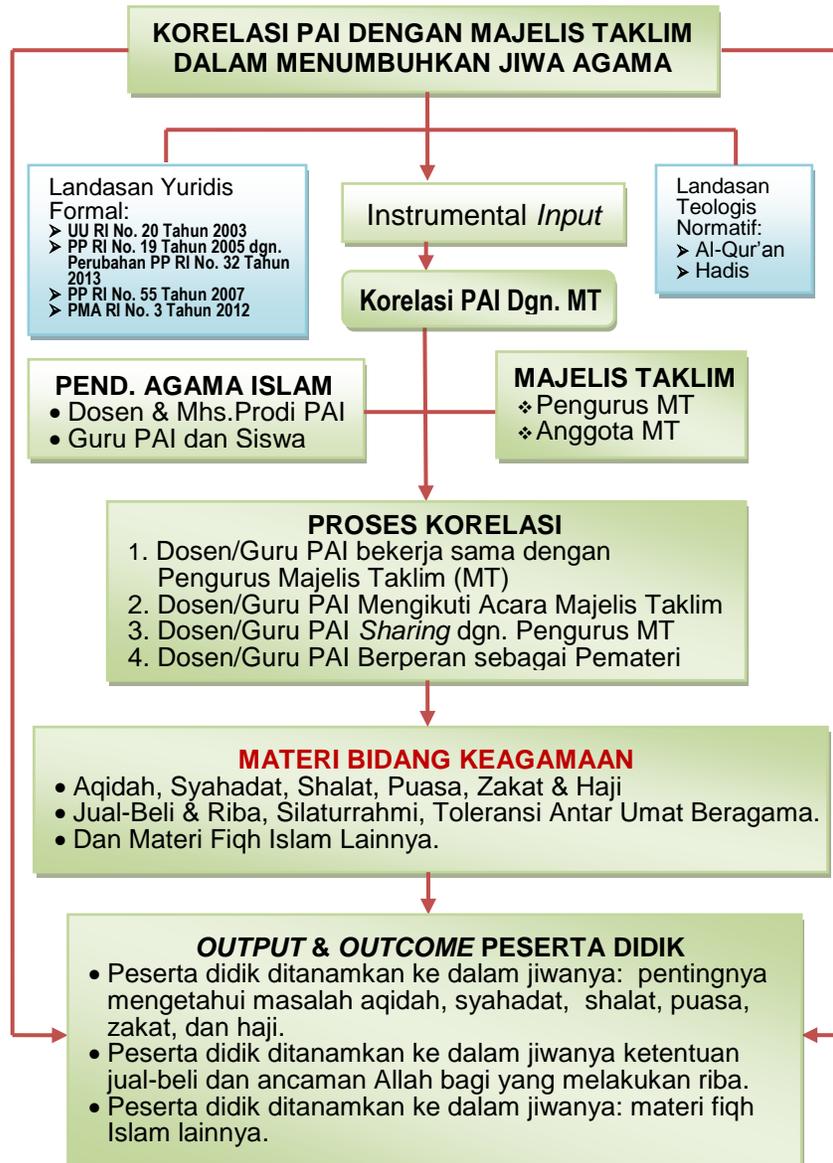
KERANGKA KONSEPTUAL KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENUMBUHKAN JIWA AGAMA

A. Bagan Konseptual Bidang Pendidikan



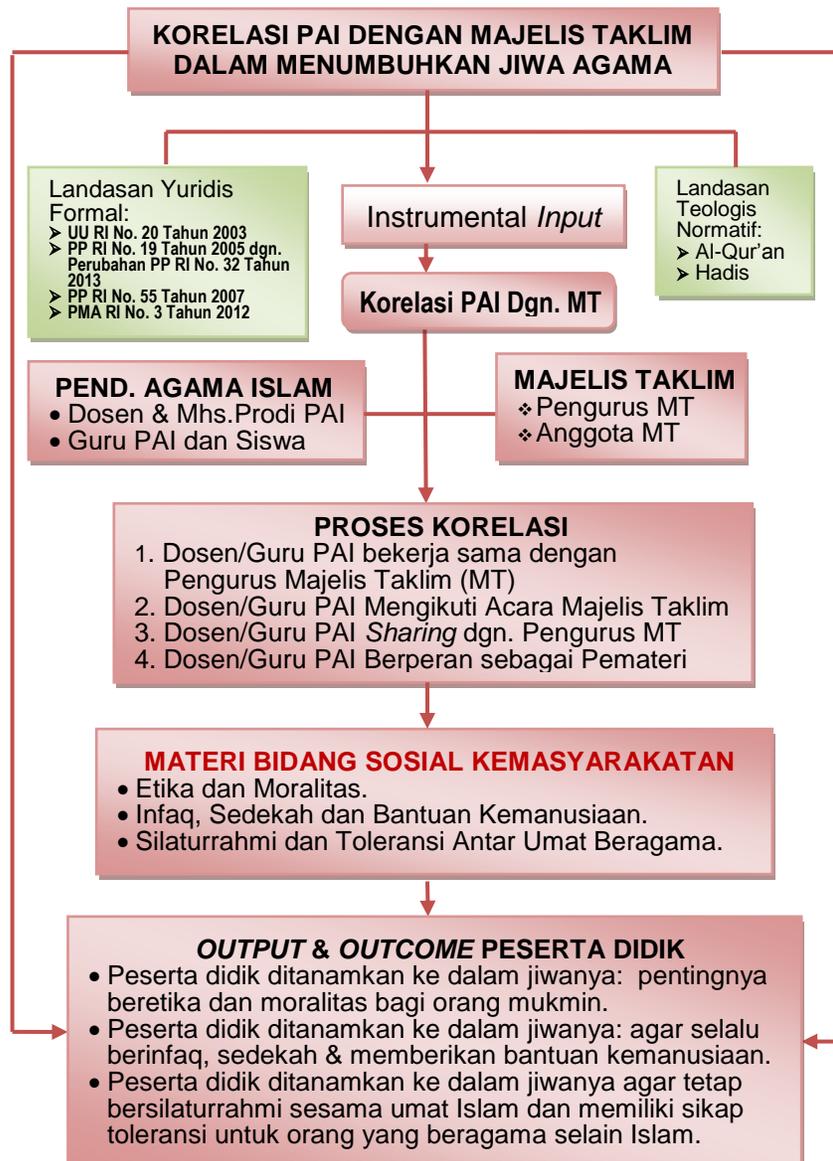
KERANGKA KONSEPTUAL KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENUMBUHKAN JIWA AGAMA

A. Bagan Konseptual Bidang Keagamaan



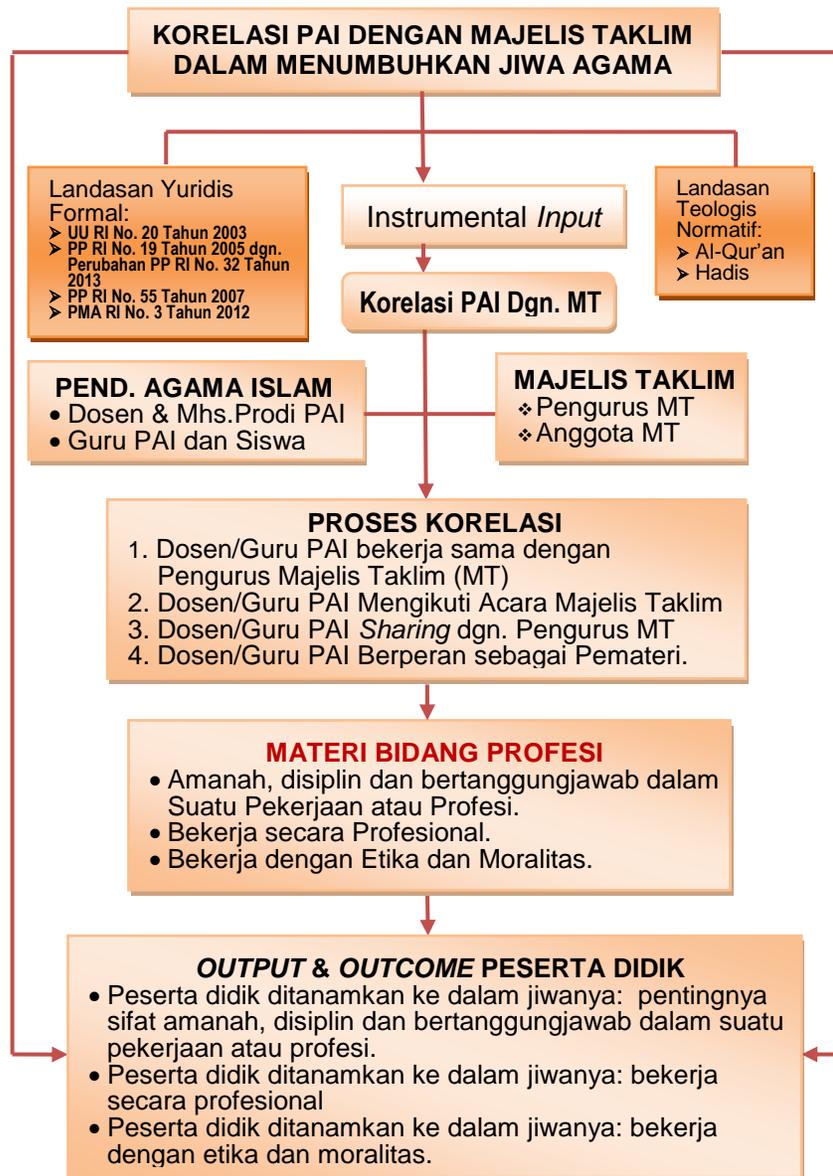
KERANGKA KONSEPTUAL KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENUMBUHKAN JIWA AGAMA

C. Bagan Konseptual Bidang Sosial Kemasyarakatan



KERANGKA KONSEPTUAL KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENUMBUHKAN JIWA AGAMA

D. Bagan Konseptual Bidang Profesi



BAB XII

KORELASI PAI DENGAN MAJELIS TAKLIM DALAM UPAYA MENINGKATKAN JIWA AGAMA

A. Korelasi dalam Bidang Pendidikan

A.1. Menuntut Ilmu Agama dan Ilmu Umum

Telah diketahui bersama bahwa menuntut ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum terlebih ilmu pengetahuan agama hukumnya fardu atau wajib bagi setiap umat Islam. Apabila orang Islam yang sudah *mukallaf* tidak menuntut ilmu terutama ilmu agama Islam, maka Allah Swt. dapat memberikan ganjaran sebagai orang-orang yang tidak patuh pada perintah-Nya.

Selain ilmu agama, orang-orang mukmin juga diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan umum yang dapat menunjang kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh, bagaimana umat Islam pergi ke Tanah Suci Mekkah jika pesawat tidak ada, tidak mungkin manusia dengan waktu yang singkat, bukan berbulan-bulan kalau seumpama pesawat tidak. Bagaimana orang bisa berobat di rumah sakit jika dokter dan atau perawatnya tidak ada. Untuk memenuhi hal tersebut, maka mereka ini terlebih dahulu belajar ilmu pengetahuan umum. Sangat berharga apabila setiap atau kebanyakan umat Islam di samping mengetahui ilmu agama juga banyak mengetahui ilmu pengetahuan umum.

Namun secara faktual yang kita lihat dalam kehidupan nyata saat ini, banyak orang-orang memiliki ilmu agama akan tetapi belum tentu memiliki ilmu umum, begitu sebaliknya. Sebagai contoh, seorang muslim setiap harinya hanya membaca buku-buku doa atau buku sejenisnya, maka kita bisa melihat orang tersebut waktunya banyak dihabiskan pada kegiatan zikir atau sejenisnya. Sedangkan kegiatan mengurus urusan dunia biasanya tidak banyak dilakukan. Walaupun kita sadari bahwa tidak semua orang muslim seperti ini. Namun yang terbaik dan yang diharapkan adalah hasil menuntut ilmu tersebut adanya keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Karena urusan dunia yang akan menunjang urusan akhirat itu juga mendatangkan suatu amaliyah di sisi Allah Swt.

A.2. Derajat Menuntut Ilmu Pengetahuan.

Orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan mencari keridhaan Allah Swt. akan mendapatkan beberapa derajat. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Mujadilah/58: 11:

dalam QS. Al-Mujadilah/58 : 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

...Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.²⁹⁶

Menuntut ilmu bukan hanya mendapatkan kemaslahatan di akhirat kelak, akan tetapi di dunia ini sudah dapat diberikan kepada orang-orang yang telah menuntut ilmu tersebut. Misalnya, seorang yang telah berhasil mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, seperti halnya PNS dengan jabatan sebagai Guru. Untuk mendapatkan pekerjaan ini tentu harus melalui sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratan adalah memiliki ijazah sarjana. Untuk menjadi sarjana harus melalui pendidikan kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya. Selama empat tahun ini dikategorikan menuntut ilmu sehingga ia menjadi seorang PNS. Ketika menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai guru, banyak orang menghargai dia dan berbeda ketika ia belum menjadi seorang guru. Inilah yang dimaksudkan bahwa baru di dunia ini, ia telah mendapatkan hasilnya, apalagi nantinya di akhirat kelak. Itulah derajat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang sungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum.

Derajat menuntut ilmu ini hanya diberikan kepada orang-orang menuntut ilmu dengan kategori beriman, dan beramal shaleh. Apabila orang dinyatakan oleh Allah tidak beriman, maka derajat ini tidak dapat diberikan. Begitu pula orang yang menyombongkan diri

²⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 793.

karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ia tidak diberikan derajat oleh Allah.

A.3. Korelasi Guru Pendidikan Agama Islam dengan Pengurus Majelis Taklim dalam Bidang Pendidikan

Dengan menyimak uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu upaya terutama kepada para pelajar untuk menumbuhkan jiwa agama. Oleh karena itu Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah sangat diharapkan melakukan korelasi (hubungan) dengan Pengurus Majelis Taklim terdekat untuk dapat melakukan pembinaan kepada siswa-siswa dari sekolah. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan kerjasama pembinaan atau bimbingan untuk memperkuat pengetahuan agama Islam bagi siswa-siswa yang beragama Islam.

Adapun tujuan Guru Pendidikan Agama Islam berkorelasi dengan Pengurus Majelis Taklim, adalah: 1) Guru mengupayakan siswanya untuk banyak memberikan bimbingan yang berkaitan dengan materi ilmu agama Islam melalui wadah Majelis Taklim dalam rangka menumbuhkan jiwa agama bagi siswa. Dan pengurus majelis taklim mengupayakan peserta didik (anggota majelis taklim) untuk menumbuhkan atau meningkatkan jiwa agama melalui majelis taklim dengan peran serta Guru Agama Islam dan ustad lainnya dalam acara kegiatan. Pentingnya ilmu pengetahuan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rabii', yang artinya: *"Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. (HR. Ar-Rabii')²⁹⁷*

B. Korelasi dalam Bidang Keagamaan

B.1. Aqidah, Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat & Haji

Korelasi dalam bidang keagamaan, yang meliputi: aqidah, syahadat, shalat, zakat dan haji yang akan diceramahkan ustad pada

²⁹⁷ Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. II; Depok: Gema Insani, 2008, h. 206.

Majelis Taklim kepada peserta didik. Adapun detail materi adalah: (a) Aqidah, Aqidah merupakan suatu keyakinan umat Islam tentang adanya Allah Swt., ke-Esaan Allah, serta nama dan sifat Allah (*Asmaul Husna*). Apabila umat Islam melakukan shalat setiap harinya akan tetapi dia ragu akan adanya Allah Swt, maka shalat yang dilakukan tidak diterima oleh Allah bahkan dicap sebagai manusia anti tauhid. Untuk itu sebelum melakukan seluruh jenis ibadah terlebih dahulu harus memantapkan aqidah kepada Allah, dalam arti bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran Allah dan firman-Nya melalui al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Masalah aqidah tersebut termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Saw. pada Tahun Hudaibiyah, lalu kami di timpa hujan pada malam hari . Kemudian Rasulullah Saw. shalat Subuh mengimani kami, lalu beliau menghadap ke arah kami dan bertanya, *"Tahukah kalian apa Firman Rabb kalian? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda: "Allah berfirman: Di antara hamba-hamba-Ku ada yang masuk pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan kafir kepada-Ku. Orang yang berkata: "Kita diberi hujan karena rahmat Allah, karena rezeki Allah, karena karunia Allah, berarti ia beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata: kita diberi hujan karena bintang ini, berarti ia beriman kepada bintang dan kafir kepada-Ku (HR. Bukhari).*"²⁹⁸

Bila memperhatikan hadis di atas dan melihat fenomena saat ini misalnya seseorang sakit dan berobat ke rumah sakit, kemudian orang tersebut sembuh dan dia meyakini bahwa sakitnya tersebut disembuhkan oleh dokter, maka orang ini dapat dikategorikan kafir kepada Allah dan beriman kepada dokter. Dan orang yang meyakini bahwa yang menyembuhkan sakitnya adalah Allah, dokter hanya perantara saja, dokter hanya ikhtiar manusia saja, maka orang ini beriman kepada Allah dan kafir kepada dokter.

²⁹⁸ Irfan bin salim al-Asysya Hassunah ad-Dimasyqi. *Hadits Qudsi Shahihain (Bukhari Muslim)*. Cet. I; Yogyakarta: Media Hidayah, 2006, h. 23–24.

Untuk itu korelasi Pendidikan Agama Islam dan majelis taklim dalam upaya meningkatkan jiwa agama dapat direalisasikan dengan segera agar paham-paham warga masyarakat yang menyimpang dapat diluruskan agar jiwa agama bisa tumbuh dan ditingkatkan dalam diri manusia. Dengan demikian masalah tauhid adalah hal pertama dan utama diketahui dan diamalkan oleh umat Islam; (b) Syahadat. Orang baru dapat dikatakan beragama Islam apabila sudah mengucapkan “Dua Kalimat Syahadat”. Pengakuan dan kesaksian ke-Esaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, Saw.

Hal yang utama selain hal di atas adalah shalat. Shalat adalah kewajiban umat Islam untuk melakukan shalat lima dalam sehari semalam. Shalat adalah kunci ibadah. Artinya, bila shalat seseorang diterima oleh Allah, maka jenis ibadah lain ikut diterima, namun bila shalat ditolak oleh Allah, maka jenis ibadah lainnya juga ikut tertolak. Menyangkut shalat ini termaktub dalam QS. Attaubah (9): 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*²⁹⁹

Selain tentang shalat di atas juga umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Dan materi ini juga disampaikan kepada ustad yang berceramah pada majelis taklim agar peserta didik memahami puasa tersebut secara komprehensif. Terkait dengan kewajiban berpuasa, termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*³⁰⁰

²⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 279.

Masalah lain yang diceramakan atau dibimbingkan oleh ustad adalah masalah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh orang Islam yang mampu. Mampu yang dimaksud di sini adalah mampu finansial (keuangan), fisik dan rohani. Terkait masalah haji termaktub dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ahmad), yang artinya: "Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan yang dapat menyampaikannya ke *Baitillahil-haram* dan tidak menunaikan (ibadah) haji, maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani (HR. Attirmidzi dan Ahmad).³⁰¹

B.2. Jual-Beli & Riba, Silaturrahmi, Toleransi Beragama.

Masalah jual-beli, riba, silaturrahmi dan tolrensi beragama merupakan materi yang akan dicerahmahkan pada majelis taklim. Peserta didik akan mendapatkan ceramah atau bimbingan agar peningkatan jiwa agama tentang hal ini dapat diwujudkan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٤﴾

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di

³⁰⁰ *Ibid.*, 44.

³⁰¹ Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. II; Depok: Gema Insani, 2008, h. 110.

dalamnya.³⁰²

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.³⁰³

B.3. Materi Fiqh Islam lainnya.

Selain hal tersebut di atas, juga akan diceramahkan atau dibimbing masalah fiqh Islam lainnya agar peserta didik banyak mendapatkan ilmu agama Islam. Dengan metode ini jiwa keagamaan dapat tumbuh dan ditingkatkan terkait dengan masalah fiqh Islam.

C. Korelasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

C.1. Etika dan moralitas.

Etika dan moralitas seyogyanya menjadi perhatian utama bagi setiap Dosen/Guru Pendidikan Agama Islam terhadap mahasiswa dan peserta didik. Sebagai pengajar dalam program studi atau mata pelajaran ini diharapkan berkolerasi dan berkolaborasi dengan pengurus majelis taklim agar baik peserta didik yang berstatus pelajar, mahasiswa maupun warga masyarakat yang menjadi anggota majelis taklim dapat mengetahui dan mengaplikasikan etika dan moralitas dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan sehingga masyarakat sekitar dia menjalani kehidupan dengan simpati dan empati dari orang lain. Dengan demikian etika dan moralitas yang baik harus terjaga bagi setiap umat Islam.

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ar-Ridha, yang

³⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 69.

³⁰³*Ibid.*, h. 69.

artinya: “Paling dekat dengan aku kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Ar-Ridha).³⁰⁴

C.2. Infaq, Sedekah dan Bantuan Kemanusiaan.

Memberikan infaq, sedekah dan bantuan kemanusiaan adalah perbuatan terpuji. Dalam agama Islam, orang-orang yang berinfaq dan bersedekah dinyatakan sebagai perbuatan yang terpuji dan dianggap berjihad di ajalan Allah atau membela agama Allah. Untuk itu orang-orang yang berinfaq dan bersedekah disediakan pahala yang besar oleh Allah Swt.

Begitu pula dengan bantuan kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, dan ras, kita seyogyanya membantu dari sisi sosial yakni memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Seorang muslim yang baik memberikan minuman kepada binatang yang kehausan adalah sikap terpuji, apalagi kalau ia adalah manusia maka sikap seorang muslim yang melakukan hal ini adalah sikap dan perilaku terpuji dan menjadi contoh kepada orang lain.

C.3. Silaturahmi dan Toleransi Antar Umat Beragama

Silaturahmi kepada sesama umat Islam merupakan akhlak mulia kepada orang lain karena dengan banyak mengadakan hubungan silaturahmi dengan orang lain maka potensi kebaikan akan muncul termasuk peluang rezeki lebih banyak terbuka. Untuk itu orang yang bijaksana terkadang mengatakan bahwa “banyak teman akan mendatangkan banyak rezeki”. Hal ini menjadi indikator bahwa bahwa kebaikan dan rezeki itu juga berasal dari banyaknya silaturahmi dengan sesama muslim. Hal tersebut ditegaskan dalam

QS. Al-Hujurat (49): 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua

³⁰⁴ Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. II; Depok: Gema Insani, 2008, h. 110.

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁰⁵

Begitu pula dengan toleransi umat beragama, maka secara kemanusiaan kita wajib menghormati sesama umat manusia, sesama anak bangsa yang hidup di muka bumi pertiwi, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama dicintai dan dibanggakan. Toleransi umat beragama wajib kita pupuk dan lestarikan bersama. Hal ini merupakan sikap dan perilaku terpuji seorang muslim. Persoalan keyakinan itu adalah urusan pribadi warga masyarakat Indonesia. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Kafirun (109): 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

*"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*³⁰⁶

D. Korelasi Bidang Profesi

D.1. Amanah, Disiplin' Jujur dan Bertanggungjawab dalam Suatu Pekerjaan atau profesi

Dalam dunia kerja atau profesi, sifat amanah, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab dalam suatu pekerjaan atau profesi adalah sesuatu yang mutlak dilakukan karena bila hal ini tidak diindahkan maka akan menimbulkan masalah pada tempat di mana kita bekerja atau memegang suatu jabatan. Secara faktual di lapangan, banyak orang masuk penjara karena melakukan korupsi, ada yang dipecat karena tidak disiplin dan ada pula yang tidak diberikan jabatan karena dianggap tidak amanah atau tidak bertanggungjawab.

Salah satu sifat yang terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan adalah jujur. Hal ini ditegaskan dalam Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ad-Dailani, yakni: "Kejujuran mendatangkan rezeki, khianat membawa kepada kemiskinan (HR. Ad-Dailani). Sifat jujur dapat membawa rezeki dan sikap khianat atau dusta dapat menyebabkan kemiskinan. Bilamana seseorang berdagang dengan jujur maka dagangannya akan laku sehingga usahanya terus

³⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 846.

³⁰⁶*Ibid*, h. 111.

berlangsung dan dan berkembang, kemudian rezeki datang kepadanya secara berlimpah. Sedangkan bila seseorang dalam usahanya berbuat tidak jujur alias khianat, maka usahanya itu pasti bangkrut karena orang-orang tidak mau percaya lagi kepadanya. Apabila usahanya bangkrut, maka ia akan jatuh menjadi orang yang miskin.³⁰⁷

D.2. Bekerja secara Profesional.

Setiap umat Islam yang akan mencari pekerjaan terlebih dahulu harus mempersiapkan dirinya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan dibuktikan dengan ijazah yang dipersyaratkan oleh instansi atau lembaga, memiliki kompetensi atau kemampuan dalam bidang pekerjaan yang akan dilamar. Dan setelah diterima bekerja dan dengan kompetensi yang dimilikinya itu, wajib baginya untuk bekerja secara profesional agar kehadirannya bekerja dapat menjadi keberuntungan instansi atau lembaga tempat bekerja, dan begitu kuga sebaliknya, dia mendapatkan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.

³⁰⁷Sayyid Ahmad Al-Hasyim. *Syarah Muktaarul Ahaadiitts*. Cet. IX; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo Bandung, 2008, h. 175–176.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Ifabeta, cv, 2019.
- Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Abdul Mudjib, dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III: Jakarta; Jakarta Kencana, 2010.
- Abdul Muiz Kabry. *Pengantar Ilmiu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang: Universitas Islam DDI, 2013.
- Abd. Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I: Jogjakarta, Grha Guru, 2009.
- Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Ahmad Muhaimin Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Cet. II; Jokyakarta, Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Akyaz Azhari. *Psikologi Pendidikan*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996.
- Badruzzaman, dkk. *Quality Improvement (Eksplorasi Kebutuhan Madrasah)*. Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, CV. 2017.
- Baharuddin. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002).
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Cet. IX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Hamzah B. Uno. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta, 2009.
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Iwan Ampulembang, *Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Makassar.
- Koko Abdul Kadir, M.A. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Linn Wilcox. *Psikologi Kepribadian: Analisis Seluk-Beluk Kepribadian Manusia*. Cet. II; Jogyakarta: IRCISoD, 2013.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar; Alauddin Press, 2010.
- Martinus Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta Gunung Persada Press, 2009.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar. Alauddin Press, 2010.
- Moh. Alifuddin. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2011.
- Mohamad Syarif Sumantri. *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktek di di Tingkat Pend. Dasar*. Cet. II: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Cet. I: Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani8, 1991.
- Muhaimin, M.A. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Nurussakinah Dauly. *Pengantar Psikologi: dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I: Yogyakarta; Gava Media, 2015.
- Pupuh Faturrahman. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Pupuh Faturrahman, dan M. Sobri Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Sardiman AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, h. 73.
- Syamsu Yusuf LN dan Nani M. *Sughandi. Perkembangan Peserta Didik: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

- Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Grha, 2009.
- Republik Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- Rusmin Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama: The Psychology of Religion*. Cet. I; Jakarta: 2014.
- Salah Marzuki. *Pendidikan Nonformal dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Cet. I; Bandung: Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Samsu Yusuf L.N., dan Nani M. Sughandi. *Perkembangan Peserta: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sarbini, dan Neneng Linja. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Sitti Hartinah DS. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Soetjipto, dan Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.
- Syahidin. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv, 2009.
- Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Cet. I; Bandung: Alfabeta cv., 2013.
- Syaiful Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Peluang dan Tantangan*. Cet. I; Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Syaiful Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. I; Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2005.
- U. Saifullah, M. *Manajemen Pendidikan Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan Pembaruan Indonesia: Konsep, Teori, dan Model*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Zakiah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XVII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Mukhtar Mas'ud, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1969, adalah anak kedua dari ayah Mas'ud dan ibu Lumu. Penyusun adalah PNS yang bertugas sebagai Dosen IAIN Parepare, dan berdomisili di Jalan Tamangapa Raya, No. 239, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, HP. 085299664466.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah: SDN 60 Ponrang (1982), SMPN Padang Sappa (1985), SMAN 3 Palopo (1988), S1 Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam IAIN Alauddin Makassar (1998), S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UMI Makassar (2010), dan S3 Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (2014).

Selain berprofesi sebagai Dosen IAIN Parepare juga aktif berperan pada Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebagai Narasumber dalam pertemuan Sosialisasi Mitra Pembimbing kepada para Guru Sekolah Dasar/Sederajat se-Sulawesi Selatan yang dilakukan sejak tahun 2005–2019. Dan hingga saat ini sebagai Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing (BEMP) di Sulawesi Selatan.